KOENTJARANINGRAT

Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan

KEBUDAYAAN, MENTALITAS DAN PEMBANGUNAN

BUNGA RAMPAI

KEBUDAYAAN, MENTALITAS DAN PEMBANGUNAN

oleh
KOENTJARANINGRAT

Penerbit PT Gramedia
Jakarta 1985

KATA PENGANTAR

Pada pertemuan dengan para cendekiawan di mana diadakan diskusi tentang masalah pembangunan, atau pada kursus-kursus penataran yang diselenggarakan oleh berbagai konsorsium, lembaga nasional atau departemen, saya berkali-kali dihadapi pertanya-an-pertanyaan yang serupa. Pertanyaan-pertanyaan itu berkisar sekitar masalah aspek-aspek kebudayaan dan mentalitet dari pembangunan kita.

Kebetulan pada akhir tahun 1973 saya dihubungi oleh wartawan KOMPAS dan diberi suatu daftar pertanyaan untuk dijawab, sedangkan jawaban-jawaban tadi di-maksudkan untuk dijadikan bahan bagi suatu reportase dalam surat kabar mengenai masalah mentalitas dan pembangunan. Hal yang menarik adalah bahwa pertanyaan dalam daftar tadi hampir tepat sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah sering saya diskusi-kan pada kesempatan-kesempatan tersebut di atas.

Dengan demikian saya mengerti bahwa rupa-rupanya ada suatu perhatian yang besar terhadap masalah-masalah kebudayaan dan pembangunan dalam kalang-an yang luas dan hal tersebut mendorong saya untuk menulis suatu seri karangan populer yang sebenarnya merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam daftar wartawan Kompas tersebut di atas. Untuk mengikat rangkaian karangan-karangan yang sebenar-nya berkaitan satu dengan yang lain itu, maka seri yang dimuat dalam surat kabar Kompas terbitan bulan

Januari, Februari dan Maret itu, saya beri judul pengikat: *Kini Orang Sering Bertanya.*

Sekarang PT Gramedia telah meminta saya untuk menerbitkan kembali seri tadi dalam bentuk sebuah buku bunga rampai yang akan diberi judul *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.* Pada ke-15 buah karangan yang dimuat dalam KOMPAS dalam bulan-bulan Januari, Februari dan Maret 1974 itu saya tambahkan sepuluh buah karangan lain, dua di antaranya saya tulis dalam tahun 1971 untuk KOMPAS juga, sebagai laporan perjalanan saya ke Jepang ketika saya memenuhi undangan International House of Japan.

Atas kesanggupan Redaksi KOMPAS untuk memuat tulisan-tulisan saya dalam surat kabar mereka dan atas saran dan kesediaan PT Gramedia untuk menerbitkannya dalam bentuk buku ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Ucapan terima kasih itu juga saya tujukan kepada semua teman sejawat, para cendekiawan, dan para mahasiswa saya, yang selama tahun-tahun terakhir ini telah memperkaya saya dengan gagasan-gagasan mereka mengenai masalah kebudayaan dan pembangunan.

Jakarta, April 1974
Koentjaraningrat

DAFTAR ISI

Kata pengantar v

1. Apakah Sebenarnya Isi Kebudayaan? 1
2. Bagaimanakah Kebudayaan itu Berwujud? 5
3. Apakah Beda Antara Adat, Kebudayaan dan Peradaban? 9
4. Apakah Pranata Kebudayaan? 14
5. Apakah Beda Antara Adat dan Hukum Adat? 19
6. Apakah Sistem Nilai-Budaya? 25
7. Apakah Mentalitas Pembangunan? 32
8. Apakah Kelemahan Mentalitas Kita Untuk Pembangunan? 37
9. Apakah Kelemahan Mentalitas Kita yang Timbul Sesudah Revolusi? 43
10. Apakah Orientasi Vertikal itu Cocok Dengan Pembangunan? 50
11. Apakah Gotong Royong itu Sebenarnya? 56
12. Apakah Nilai Gotong Royong itu Menghambat Pembangunan? 62
13. Adakah Nilai Tradisional yang Bisa Mendorong Pembangunan? 68
14. Bagaimana Mengembangkan Mentalitas Pembangunan? 73

15. Apakah Artinya Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan? 79

16. Apakah Sebenarnya Tujuan Pembangunan Kita? 83

17. Apakah Kita Bisa Meniru Pembangunan Jepang? 90

18. Mengapakah Orang Jepang Menganggap Kita Bermoral Lemah? 97

19. Apakah Benar bahwa Orang Jepang itu Bersifat Hemat? 102

20. Apakah Kebudayaan Nasional Indonesia? 107

21. Bidang-Bidang Kesenian Apakah Memberi Isi Kepada Kebudayaan Nasional? 112

22. Apakah Kepribadian Menurut Suatu Konsepsi Non Barat? 123

23. Apakah Perbedaan Dasar antara Mentalitas Barat dan Timur? 131

24. Apakah Modernisasi itu Berarti Westernisasi? 138

25. Apakah Beda Antara Agama, Religi dan Kepercayaan? 144

Riwayat Singkat Mengenai Diri Pengarang 151

1

APAKAH SEBENARNYA ISI KEBUDAYAAN?

KINI banyak orang suka berdiskusi tentang masalah kebudayaan dan pembangunan, masalah hubungan kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern, masalah perobahan nilai-nilai budaya, masalah mentalitas pembangunan, masalah pembinaan kebudayaan nasional, masalah hubungan antara agama dan kebudayaan dan sebagainya. Dalam diskusi-diskusi di berbagai studi-klab, dalam konversasi pada pertemuan-pertemuan dengan para cendekiawan, dalam kursus-kursus penataran para karyawan atau dosen, atau dalam pertemuan-pertemuan tanya-jawab dengan para wartawan, saya sering dihadapkan dengan berbagai pertanyaan tentang masalah yang berkisar sekitar pokok-pokok tadi.

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah misalnya: "Apakah sebenarnya yang tercakup dalam konsep kebudayaan itu?" Banyak orang mengartikan konsep itu dalam arti yang terbatas, ialah pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. Dengan singkat: kebudayaan adalah kesenian. Dalam arti seperti itu konsep itu memang terlampau sempit.

Sebaliknya, banyak orang terutama para ahli ilmu sosial, mengartikan konsep kebudayaan itu dalam arti yang amat luas yaitu seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Konsep itu

adalah amat luas karena meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Hal-hal yang tidak termasuk kebudayaan hanyalah beberapa reflex yang berdasarkan naluri, sedangkan suatu perbuatan yang sebenarnya juga merupakan perbuatan naluri seperti makan misalnya, oleh manusia dilakukan dengan peralatan, dengan tata-cara sopan santun dan protokol, sehingga hanya bisa dilakukannya dengan baik sesudah suatu proses belajar tata-cara makan.

Karena demikian luasnya, maka guna keperluan analisa konsep kebudayaan itu perlu dipecah lagi ke dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur terbesar yang terjadi karena pecahan tahap pertama disebut "unsur-unsur kebudayaan yang universal", dan merupakan unsur-unsur yang pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat kekotaan yang besar dan komplex. Unsur-unsur universal itu, yang sekalian merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini, adalah:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan,
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan,
3. Sistem pengetahuan,
4. Bahasa,
5. Kesenian,
6. Sistem mata pencaharian hidup,
7. Sistem teknologi dan peralatan.

Ketujuh unsur universal tersebut masing-masing dapat dipecah lagi ke dalam sub-unsur-unsurnya. Demikian ketujuh unsur kebudayaan universal tadi memang mencakup seluruh kebudayaan mahluk manusia di manapun juga di dunia, dan menunjukkan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya.

Susunan tata-urut dari unsur-unsur kebudayaan universal seperti tercantum di atas dibuat dengan sengaja untuk sekalian menggambarkan unsur-unsur mana yang paling sukar berobah atau kena pengaruh kebudayaan lain, dan mana yang paling mudah berobah

atau diganti dengan unsur-unsur serupa dari kebudayaan-kebudayaan lain. Dalam tata-urut itu akan segera terlihat bahwa unsur-unsur yang berada di bagian atas dari deretan, merupakan unsur-unsur yang lebih sukar berobah daripada unsur-unsur yang tersebut kemudian. Sistem religi dan sebagian besar dari sub-unsur-unsurnya biasanya memang mengalami perobahan yang lebih lambat bila dibandingkan dengan misalnya suatu teknologi atau suatu peralatan bercocok tanam tertentu. Namun toh harus diperhatikan bahwa ini hanya dalam garis besarnya saja, karena ada kalanya ada sub-sub-unsur dari suatu unsur lebih sukar dirobah daripada sub-sub-unsur dari suatu unsur yang tercantum di atasnya. Kita bisa membayangkan bahwa sub-sub-unsur hukum waris misalnya, merupakan hal yang lebih sukar berobah bila dibandingkan dengan sub-sub-unsur arsitektur sesuatu tempat pemujaan. Hal yang pertama merupakan bagian dari sub-unsur hukum, yang sebaliknya merupakan bagian dari unsur sistem dan organisasi kemasyarakatan; hal yang kedua merupakan bagian dari sub-unsur prasarana upacara, yang sebaliknya merupakan bagian dari unsur sistem religi. Namun dalam garis besarnya tata-urut dari unsur-unsur universal tercantum di atas, toh menggambarkan kontinuum dari unsur-unsur yang paling sukar berobah ke unsur-unsur yang lebih mudah berobah.

Sudah tentu dalam praktek kita sering tidak mungkin mempergunakan konsep kebudayaan dengan ruang lingkup seluas yang terurai di atas, dan yang dipergunakan oleh kebanyakan ahli ilmu sosial. Kalau demikian, maka misalnya Direktorat Kebudayaan dari Departemen P. dan K. Republik Indonesia akan merupakan satu-satunya badan yang harus melaksanakan semua sektor dalam hidup manusia Indonesia, dan dengan demikian semua Departemen dapat dihapuskan saja. Hal itu tentu tidak mungkin. Maka timbul pertanyaan lain: Kalau banyak sektor lain dalam hidup masyarakat Indonesia itu sudah menjadi tanggungjawab dari berbagai Departemen dan lembaga di pusat pemerin-

tahan Negara Indonesia, maka sektor-sektor apakah yang harus tercakup dalam ruang-lingkup Direktorat Kebudayaan?

Dalam kenyataan ruang-lingkup Direktorat Kebudayaan memang hanya mencakup kesenian. Untuk aktivitas pembinaan unsur-unsur lain, seperti ilmu pengetahuan dan bahasa, di negeri kita ini ada badan-badan khusus seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Lembaga Bahasa Nasional. Walaupun demikian, Direktorat Kebudayaan toh harus dapat menghubungkan kesenian dengan unsur-unsur lain dalam jaringan yang lebih luas, sehingga walaupun fokusnya itu kesenian, soal-soal seperti masalah-masalah pemuda-remaja, masalah komunikasi, masalah pendidikan kesenian dan sebagainya dapat tercakup. Aspek ekonomi dan komersial dari kesenian yang dikembangkan oleh turisme, dan aspek politis dari kesenian, yang harus diterapkan dalam proses pembinaan kepribadian dan integrasi nasional, seharusnya merupakan masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus dari Direktorat Kebudayaan.

2

BAGAIMANAKAH KEBUDAYAAN ITU BERWUJUD?

SAYA berpendapat bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, ialah:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat,
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud idel dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Lokasinya àda di dalam kepala-kepala, atau dengan perkataan lain, dalam alam pikian dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kalau warga masyarakat tadi menyatakan gagasan mereka itu dalam tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideel sering berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat yang bersangkutan. Sekarang kebudayaan ideel juga banyak tersimpan dalam disk, tape, arsip, koleksi microfilm dan microfish, kartu computer, disk, silinder, dan tape computer.

Kebudayaan ideel ini dapat kita sebut *adat tata-kelakuan,* atau secara singkat *adat* dalam arti khusus, atau *adat-istiadat* dalam bentuk jamaknya. Sebutan *tata-kelakuan* itu, maksudnya menunjukkan bahwa kebudayaan ideel itu biasanya juga berfungsi sebagai tata-kelakuan yang mengatur, mengendali, dan mem-

beri arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Dalam fungsi itu secara lebih khusus lagi adat terdiri dari beberapa lapisan, yaitu dari yang paling abstrak dan luas, sampai yang paling konkret dan terbatas. Lapisan yang paling abstrak adalah misalnya sistem nilai-budaya. Lapisan kedua, yaitu sistem norma-norma adalah lebih konkret, dan sistem hukum yang bersandar kepada norma-norma adalah lebih konkret lagi. Sedangkan peraturan-peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas peraturan-peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat manusia (seperti misalnya aturan sopan-santun), merupakan lapisan adat-istiadat yang paling konkret tetapi terbatas ruang-lingkupnya.

Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial, mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lain, yang dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun, selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata-kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia dalam suatu masyarakat, maka sistem sosial itu bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasi.

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, dan memerlukan keterangan banyak. Karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Ada benda-benda yang amat besar seperti: suatu pabrik baja; ada benda-benda yang amat kompleks dan *sophisticated* seperti suatu computer berkapasitas tinggi; atau benda-benda yang besar dan bergerak seperti suatu perahu tangki-minyak; ada benda-benda yang besar dan indah seperti suatu candi yang indah;

atau ada pula benda-benda kecil seperti kain batik; atau yang lebih kecil lagi, yaitu kancing baju.

Sudah tentu dalam analisa sistematis, kebudayaan fisik yang dimiliki atau dihasilkan oleh suatu bangsa itu, harus lebih dulu digolong-golongkan menurut tingkatnya masing-masing. Sebagai pangkal penggolongan dapat kita pakai unsur-unsur kebudayaan yang terbesar, ialah unsur-unsur universal yang telah saya uraikan dalam tulisan ke-1 dalam seri ini. Kemudian tiap unsur besar tadi kita pecah ke dalam sub-unsur-unsurnya; tiap sub-unsur ke dalam sub-sub-unsurnya; tiap sub-sub-unsur ke dalam sub-sub-sub-unsurnya, dan demikian seterusnya. Sebagai contoh: Aspek fisik dari suatu religi sebagai suatu unsur kebudayaan yang universal, adalah gedung (atau bangunan) tempat pemujaan. Unsur besar itu dapat kita pecah ke dalam beberapa sub-unsur, yaitu antara lain misalnya perabot upacara. Sub-unsur tersebut dapat dibagi lagi ke dalam beberapa sub-sub-unsur, dan di antaranya ada misalnya jubah pendeta-pemuka-upacara. Sub-sub-unsur ini kalau dipecah lagi membawa kita kepada bagian-bagian dari jubah tadi, dan suatu sub-sub-sub-unsur yang kecil dari jubah adalah kancing jubah dari sang pendeta-pemuka-upacara.

Ketiga wujud dari kebudayaan terurai di atas, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan lain. Kebudayaan ideel dan adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun perbuatan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik itu membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi cara berpikirnya.

Sungguhpun ketiga wujud dari kebudayaan tadi erat berkaitan, untuk keperluan analisa toh perlu diadakan pemisahan yang tajam. Hal ini yang sering dilupakan;

tidak hanya dalam diskusi-diskusi atau dalam pekerjaan sehari-hari, ketiga wujud (atau paling sedikit wujud pertama dan kedua) dari kebudayaan, sering dikacaukan tetapi juga dalam analisa ilmiah oleh para sarjana yang menamakan dirinya ahli kebudayaan atau ahli masyarakat. Seringkali suatu pemisahan yang tajam antara ketiga hal terurai di atas tidak dibuat.

Dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, dengan tidak disengaja sebenarnya sudah ada semacam pembagian lapangan dalam studi terhadap ketiga wujud kebudayaan tadi. Sarjana-sarjana ilmu kesusasteraan dan ilmu filologi terutama menggarap kebudayaan dalam wujud ideelnya. Demikian juga ilmu-ilmu sosial yang berdasarkan pendekatan normatif, seperti ilmu hukum adat, dan sebenarnya ilmu hukum pada umumnya. Sarjana-sarjana ilmu sosiologi, antropologi dan psikologi serta ilmu-ilmu sosial lain yang tergolong ilmu-ilmu tentang kelakuan manusia *(behavioral sciences)*, terutama menggarap kebudayaan dalam wujudnya yang kedua, sungguhpun mereka juga menaruh perhatian besar terhadap kebudayaan ideelnya. Demikian pula ilmu-ilmu sosial lain seperti ilmu sejarah dan ilmu politik. Para ahli ekonomi menggarap wujud kedua dan ketiga dari kebudayaan, walaupun akhir-akhir ini mereka juga mulai menaruh perhatian terhadap kebudayaan ideel dalam masyarakat mereka. Akhirnya sarjana-sarjana seperti ahli arkeologi (ahli sejarah kebudayaan kuno), terutama menggarap kebudayaan dalam wujudnya yang ketiga. Namun walaupun pusat perhatian dari para ahli arkeologi itu adalah misalnya suatu nekara perunggu yang asal dari zaman prehistori, atau suatu kompleks candi-candi yang indah-megah, mereka toh selalu membuat referensi ke kebudayaan ideel yang merupakan latar belakang dari benda perunggu atau bangunan batu tadi.

3

APAKAH BEDA ANTARA ADAT KEBUDAYAAN DAN PERADABAN?

PERTANYAAN mengenai perbedaan antara *kebudayan* dan *peradaban* adalah yang paling mudah untuk dijawab, karena hanya mengenai soal istilah saja. Kata "kebudayaan" berasal dari kata Sanskerta *buddhayah,* ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Demikian, ke-budaya-an itu dapat diartikan "hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal." Ada pendirian lain mengenai asal dari kata "kebudayaan" itu, ialah bahwa kata itu adalah suatu perkembangan dari majemuk *budi-daya,* artinya daya dari budi, kekutan dari akal (lihat misalnya buku: P.J. Zoetmulder, *Cultuur, Oost en West.* Amsterdam, P.J.. van der Peet, 1951).

Kalau diingat bahwa sebagai konsep, kebudayaan menurut hemat saya antara lain berarti: *keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu,* maka istilah "kebudayaan" memang suatu istilah yang amat cocok. Adapun istilah Inggerisnya berasal dari kata Latin *colere,* yang berati "mengolah, mengerjakan", terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti *culture,* sebagai segala daya dan usaha manusia untuk merobah alam.

Definisi dari kebudayaan tercantum di atas hanya salah satu antara lebih dari 179 buah definisi lain yang pernah dirumuskan di atas kertas. Bahwa ada sekian

banyak definisi dari kebudayaan, tidak mengherankan. Kebudayaan merupakan keseluruhan total dari apa yang pernah dihasilkan oleh mahluk manusia yang menguasai planet ini sejak zaman ia muncul di muka bumi kira-kira empat juta tahun yang lalu, sampai sekarang (perkiraan mengenai waktu munculnya manusia di muka bumi yang panjang ini, adalah hasil analisa-analisa terbaru dengan metode potassium-argon untuk mengukur umur lapisan-lapisan bumi). Dengan demikian dapat dimengerti mengapa konsep kebudayaan itu sedemikian luas ruang-lingkupnya, sehingga seolah-olah tak dapat dibatasi atau didefinisi. Adapun ke-179 definisi yang pernah dirumuskan tentang konsep kebudayaan itu, tidak hanya oleh ahli-ahli antropologi, sosiologi, sejarah atau lain ilmu sosial yang ternama, tetapi juga oleh ahli-ahli filsafat dan pengarang-pengarang terkenal, pernah dikumpulkan oleh dua orang ahli antropologi, A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn. Semua ke-179 definisi itu mereka analisa dan mereka klasifikasi ke dalam tipe-tipe tertentu, kemudian dengan disertai komentar dan kritik, mereka terbitkan dalam sebuah buku berjudul *Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions* (1952).

Adapun istilah *peradaban* dapat kita sejajarkan dengan kata asing *civilization*. Istilah itu biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah, seperti: kesenian, ilmu pengetahuan, serta sopan-santun dan sistem pergaulan yang komplex dalam suatu masyarakat dengan struktur yang komplex. Sering juga istilah peradaban dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan komplex.

Perbedaan antara *adat* dan *kebudayaan* adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, ialah: (1) wujud ideel; (2) wujud kelakuan; dan (3) wujud fisik. *Adat*

adalah wujud ideel dari kebudayaan. Secara lengkap wujud itu dapat kita sebut *adat tata-kelakuan*, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Suatu contoh dari adat ialah: aturan sopan-santun untuk memberi uang kepada seseorang yang mengadakan pesta kondangan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, ialah (i) tingkat nilai-budaya, (ii) tingkat norma-norma, (iii) tingkat hukum (iv) tingkat aturan khusus.

Tingkat pertama adalah lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi-konsepsi serupa itu biasanya luas dan kabur; tetapi walaupun demikian, atau justru karena kabur dan tidak rasional, biasanya berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia. Tingkat ini dapat kita sebut sistem nilai-budaya. Jumlah nilai-nilai-budaya tingkat pertama dalam suatu kebudayaan biasanya tidak banyak.

Contoh dari suatu nilai-budaya, terutama dalam masyarakat kita, adalah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar. Konsep ini, yang biasanya kita sebut nilai gotong-royong, mempunyai ruang-lingkup yang amat luas karena memang hampir semua karya manusia itu biasanya dilakukannya dalam rangka kerjasama dengan orang lain; dengan perkataan lain: konsep tersebut di atas hanya berarti bahwa semua kelakuan manusia yang bukan bersifat bersaing atau berkelahi itu adalah baik. Jelaslah bahwa nilai itu sebenarnya tidak rasional. Contoh lain: Suatu nilai-budaya yang penting terutama dalam masyarakat kebudayaan Barat adalah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu dapat berhasil samasekali atas usahanya sendiri. Ideal yang disebut nilai individualisme ini, juga kabur dan tak rasional,

karena dalam kenyataan jarang terjadi bahwa manusia itu dapat mencapai sesuatu hasil yang samasekali terlepas dari usaha atau bantuan orang lain.

Tingkat adat yang kedua dan lebih konkret adalah sistem norma. Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya adalah banyak, dan manusia sering berobah peranan dari saat ke saat, dari hari ke hari. Pada suatu saat ia berperanan sebagai orang atasan, saat kemudian ia berperanan sebagai orang bawahan, pada suatu hari ia berperanan sebagai guru, pada hari lain ia adalah pemimpin partai politik. Tiap peranan membawakan baginya sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan peranannya yang bersangkutan. Jumlah norma dalam suatu kebudayaan lebih banyak daripada jumlah nilai-budayanya.

Tingkat adat yang ketiga dan yang lebih konkret lagi adalah sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum sudah jelas mengenai bermacam-macam sektor hidup yang sudah terang batas-batas ruang-lingkupnya. Jumlah undang-undang hukum dalam suatu masyarakat sudah jauh lebih banyak daripada jumlah norma yang menjadi pedomannya.

Tingkat adat yang keempat adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang-lingkupnya dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya aturan-aturan khusus ini amat konkret sifatnya dan banyak di antaranya terkait dalam sistem hukum. Contohnya adalah peraturan lalu-lintas. Contoh dari aturan khusus yang tidak tersangkut ke dalam sistem hukum adalah misalnya aturan sopan-santun.

Kembali kepada pertanyaan yang merupakan pangkal dari tulisan ini: Apakah beda antara adat dan

kebudayaan? Maka jawabnya ialah: adat adalah bagian ideel dari kebudayaan.

4

APAKAH PRANATA KEBUDAYAAN ?

SEBELUM saya menjawab pertanyaan itu biasanya saya berusaha untuk mengetatkan istilahnya dahulu. Memang istilah *institution* hampir selalu diterjemahkan dengan kata "lembaga". *Institutionalized* biasanya menjadi "dilembagakan". Saya tidak setuju dengan istilah *lembaga*, dan karena itu mengusulkan suatu istilah lain, ialah *pranata* untuk *institution*, agar tidak dikacaukan dengan istilah *lembaga* untuk *institute* (ialah suatu badan atau organisasi yang berfungsi dalam suatu lapangan kehidupan masyarakat yang khas, biasanya lapangan penelitian, pendidikan, pembinaan, atau .pengembangan).

Adapun *pranata* atau *institution* itu mengenai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya. Mohon perhatian dari para pembaca, bahwa dalam karangan no. 3 yang lalu, telah saya terangkan adanya tiga wujud dari kebudayaan itu, ialah: (i) wujud ideel, (ii) wujud kelakuan, dan (iii) wujud fisik dari kebudayaan. Seluruh total dari kelakuan manusia yang berpola, tentu bisa kita perinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dalam masyarakatnya. Suatu sistem aktivitas khas dari kelakuan berpola (wujud kedua dari kebudayaan) beserta komponen-komponennya, ialah: sistem norma dan tata kelakuannya (wujud pertama dari kebudayaan) dan peralatannya (wujud ketiga dari kebudayaan), ditambah dengan manusia atau personel yang melak-

sanakan kelakuan berpola, itulah yang merupakan suatu *pranata* atau *institution*.
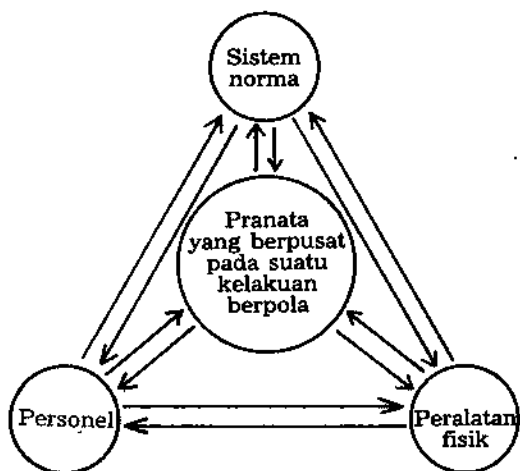
Bagan 1: Komponen-komponen dari Pranata Sosial

Apakah ada suatu daftar standar yang lengkap, yang dapat memberikan suatu pandangan menyeluruh dari semua pranata yang ada dalam kebudayaan manusia itu? Suatu daftar serupa itu biasanya termaktub dalam buku-buku pelajaran sosiologi. Namun, daftar-daftar dari berbagai buku pelajaran biasanya juga berbeda sifatnya. Jadi sebenarnya tidak ada suatu daftar yang baku. Hanya saja kalau daftar-daftar itu kita teliti dengan saksama, maka berbagai macam daftar panjang dari pranata-pranata itu dapat digolong-golongkan sedemikian rupa sehingga jumlahnya dapat diperkecil menjadi suatu daftar dari tujuh sampai sepuluh golongan pranata, yang bentuknya akan menyerupai daftar dari ketujuh *unsur kebudayaan universal* (ialah unsur-unsur kebudayaan yang pasti ada dalam tiap kebudayaan di mana pun juga di muka bumi ini), yang

telah saya sebut dalam karangan pertama dari seri ini. Memang pranata-pranata kebudayaan itu dapat kita anggap sebagai suatu pemerincian lebih lanjut dari ketujuh unsur kebudayaan universal itu.

Di bawah ini akan dicantumkan suatu daftar dari beberapa puluh pranata kebudayaan yang digolongkan ke dalam delapan kelompok, dengan memakai delapan kebutuhan hidup manusia sebagai prinsip penggolongan (tentu kebutuhan hidup manusia itu ada lebih dari delapan, tetapi di sini hanya dicantumkan delapan, hanya sebagai ilustrasi).

1) Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, ialah yang sering disebut *kinship* atau *domestic institutions*. Contoh: pelamaran, perkawinan, poligami, pengasuhan kanak-kanak, perceraian dan sebagainya.
2) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusi harta dan benda, ialah *economic institutions*. Contoh: pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan dan sebagainya.
3) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, ialah *educational institutions*. Contoh: Pengasuhan kanak-kanak, pendidikan rakyat, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keagamaan, pers, perpustakaan umum dan sebagainya.
4) Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya, ialah *scientific institutions*. Contoh: metodik ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah dan sebagainya.
5) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahannya, dan untuk rekreasi, ialah *aesthetic and recreational*

institutions. Contoh: seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, kesusasteraan, sport dan sebagainya.

6) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, ialah *religious institutions*. Contoh: gereja, doa, kenduri, upacara, penyiaran agama, pantangan, ilmu gaib dan sebagainya.
7) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara, ialah *political institutions*. Contoh: Pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan, dan sebagainya.
8) Pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia, ialah *somatic institutions*. Contoh: pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran dan sebagainya.

Penggolongan tersebut tidak memuaskan karena tidak mencakup segala macam pranata yang mungkin ada dalam masyarakat manusia. Kalau dipikirkan secara mendalam dan obyektif, hal-hal seperti kejahatan, banditisme, pelacuran dan sebagainya, juga dapat dianggap sebagai pranata-pranata kemasyarakatan; tetapi dalam penggolongan di atas, pranata-pranata tersebut tidak mendapat tempat. Kecuali itu harus pula diperhatikan bahwa banyak dari pranata tersebut di atas mempunyai demikian banyak aspek, sehingga pranata-pranata itu tidak hanya dapat digolongkan ke dalam satu golongan tetapi juga ke dalam lebih dari satu golongan. Misalnya: feodalisme sebagai suatu sistem hubungan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, yang pada hakekatnya mengakibatkan suatu produksi dari hasil bumi, dapat dianggap suatu *economic institution*, tetapi sebagai suatu sistem hubungan antara pihak berkuasa dan pihak rakyat sebagai dasar suatu negara, dapat dianggap suatu *political institution*. Sekali lagi saya ulangi, penggolongan di atas hanya saya

cantumkan untuk memberi illustrasi secara konkret dari apa yang disebut pranata itu dalam ilmu-ilmu sosial.

5

APAKAH BEDA ANTARA ADAT DAN HUKUM ADAT?

MENGENAI masalah tersebut di atas yang kini juga sering diajukan kepada saya, saya tak mempunyai pendirian sendiri, tetapi hanya dapat mereproduksi pendirian ahli-ahli lain. Seperti apa yang pernah saya uraikan dalam salah satu tulisan dalam rangkaian ini (No. 2), adat merupakan wujud ideel dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata-kelakuan. Adapun soal batas antara adat dan hukum adat telah banyak dipikirkan oleh para ahli antropologi, tetapi justru tidak oleh para ahli hukum adat Indonesia. Para ahli hukum adat, memang amat berjasa dalam hal pengumpulan dan penggolongan data tentang hukum adat Indonesia, tetapi kecuali B. Ter Haar, tidak ada di antara mereka yang banyak memikirkan mengenai soal batas antara adat dan hukum adat, atau dëngan perkataan lain mengenai ciri-ciri dasar dari hukum adat.

Para ahli antropologi yang banyak berpikir mengenai masalah sifat-sifat dasar dari hukum adat, dapat kita golongkan ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama beranggapan bahwa dalam masyarakat yang terbelakang tidak ada aktivitas hukum. Anggapan itu terutama disebabkan karena para ahli ini menyempitkan definisi mereka tentang hukum itu pada aktivitas-aktivitas hukum yang ada dalam masyarakat yang maju saja. Dipandang dari sudut itu, maka aktivitas hukum akan berupa suatu sistem penjagaan tata-tertib masyarakat yang bersifat memaksa dan yang untuk itu disokong oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan yang

diorganisasi oleh suatu negara. Apabila dalam suatu masyarakat terbelakang tak ada suatu sistem yang dapat disamakan dengan itu, maka kata mereka, dalam masyarakat itu memang tak ada sistem hukumnya. Antara lain ahli antropologi terkenal, A.R. Radcliffe-Brown menganut pendirian ini. Pendiriannya mudah, tetapi kemudian timbul masalah: bagaimanakah masyarakat yang tak ada hukumnya, toh dapat menjaga tata-tertib di dalamnya. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka Radcliffe-Brown percaya akan adanya suatu kompleks ide-ide umum, ialah adat, yang berada di atas individu, yang sifatnya mantap dan kontinyu, dan yang mempunyai sifat memaksa. Demikian mereka (ialah para ahli seperti Radcliffe-Brown) berpendirian bahwa tata-tertib masyarakat tanpa sistem hukum itu tetap terjaga, karena warganya mempunyai suatu *ketaatan yang seolah-olah otomatis terhadap adat,* dan kalau ada pelanggaran, maka secara otomatis pula akan timbul reaksi masyarakat untuk menghukum pelanggaran itu. Pendirian Radcliffe-Brown ini tercantum dalam beberapa buah karangannya, dan yang paling mudah untuk didapat adalah karangannya: *Primitive Law* dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* (1933, IX-X: hlm. 202-206).

Golongan kedua tidak mengkhususkan definisi mereka tentang hukum, tetapi hanya kepada hukum dalam masyarakat bernegara dengan suatu sistem alat-alat kekuasaan saja. Di antara golongan kedua ini ada ahli antropologi terkenal bernama B. Malinowski. Ia berpendapat bahwa ada suatu dasar universal yang sama antara hukum dalam masyarakat bernegara dan masyarakat terbelakang. Kemudian berdasarkan atas pengetahuan komparatifnya tentang beraneka warna masyarakat dan kebudayaan yang tersebar di muka bumi, ia mengajukan konsepsinya tentang dasar dari hukum pada umumnya. Katanya: Semua aktivitas kebudayaan itu berfungsi untuk memenuhi suatu rangkaian hasrat naluri dari manusia. Adapun di antara berbagai macam aktivitas kebudayaan itu ada yang

mempunyai fungsi memenuhi hasrat naluri manusia untuk secara timbal-balik memberi kepada dan menerima dari sesamanya, berdasarkan prinsip yang oleh Malinowski disebut *the principle of reciprocity*. Di antara aktivitas-aktivitas kebudayaan yang berfungsi serupa itu termasuk hukum sebagai suatu unsur kebudayaan yang universal. Pendirian ini tercantum dalam karangannya: *Crime and Custom in Savage Society* (1949).

Di atas telah tersebut bahwa di antara para ahli hukum adat Indonesia yang terkenal, hanya B. Ter Haar yang pernah memikirkan mengenai soal batas antara adat dan hukum adat itu. Pendiriannya tentang masalah itu adalah sebagai berikut: pedoman untuk mengetahui kapankah di dalam suatu masyarakat yang mempunyai adat dan sistem hukum yang tak terkodifikasi itu, suatu kasus merupakan kasus hukum atau bukan, adalah keputusan-keputusan dari *para pejabat pemegang kuasa dalam masyarakat*. Pendirian ini diajukan oleh Ter Haar dalam beberapa pidato ilmiah, salah satu di antaranya adalah *Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch-Indië in Wetenschap, Practijk en Onderwijs* (1937).

Pendirian Ter Haar mempunyai dasar kebenaran, namun kurang lengkap untuk dapat membatasi dengan jelas ruang-lingkup dari konsep hukum adat. Hal itu disebabkan karena konsepsi Ter Haar hanya memberikan satu ciri, ialah ciri otoritas, kepada hukum adat; dan itu tidak cukup. Karena itu akan saya ajukan di sini pendirian dari seorang ahli antropologi Amerika yang amat saya kagumi konsepsinya mengenai masalah batas antara hukum dan hukum adat. Ahli itu adalah teman belajar saya di Universitas Yale, USA, bernama L. Pospisil. Ia pernah melakukan penelitian lapangan (tahun 1953-1955) di daerah suku-bangsa Kapauku yang tinggal di lembah Kamu di daerah Enarotali, Irian Jaya. Dalam penelitian itu, ia mencatat 121 aturan adat yang hidup dalam ingatan orang Kapauku (mereka tak mengenal tulisan). Kemudian ia mencocokkan ke-121

aturan abstrak tadi dengan 176 kasus konflik yang dengan nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat desa orang Kapauku. Ternyata, di antara 176 kasus tersebut, hanya 87 buah yang diputuskan menurut salah satu dari ke-121 aturan tadi; sedangkan lebih dari separohnya diputuskan menurut kebijaksanaan tokoh-tokoh masyarakat yang diserahi otoritas. Hasil analisa tadi menimbulkan dalam pikiran L. Pospisil suatu pengertian yang amat penting, ialah pengertian bahwa aturan adat yang abstrak itu, walaupun ada dan diketahui oleh warga masyarakat, toh rupa-rupanya tidak selalu dapat melakukan pengawasan sosial terhadap gerak-gerik masyarakat. Sebaliknya, keputusan-keputusan dari tokoh-tokoh yang diberi otoritaslah yang memegang peranan yang penting.

Berdasarkan pengertian yang dicapai tadi, Pospisil kemudian mengembangkan teorinya dengan mengadakan suatu usaha perbandingan secara *cross-cultural*, terhadap kasus-kasus hukum yang serupa dalam 32 kebudayaan lain dari berbagai daerah yang tersebar luas di muka bumi (bahan ini tentu tidak dikumpulkannya dengan mengunjungi ke-32 daerah itu sendiri, tetapi dari studi di perpustakaan dan dengan mempergunakan arsip etnografi yang terkenal dengan nama *Human Relations Area Files*). Hasil dari analisa komparatif yang amat luas tadi adalah suatu teori tentang batas antara adat dan hukum adat, yang singkatnya berbunyi sebagai berikut:

1. Hukum adalah suatu aktivitas di dalam rangka suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial. Untuk membedakan suatu aktivitas itu dari aktivitas-aktivitas kebudayaan lain yang mempunyai fungsi serupa dalam sesuatu masyarakat, seorang peneliti harus mencari akan adanya empat ciri dari hukum, atau *attributes of law*.
2. *Attribute* yang terutama disebut *attribute of authority* (sampai di sini teori Pospisil tak berbeda dengan teori Ter Haar). Atribut otoritas menentukan bahwa aktivitas kebudayaan yang disebut hukum itu adalah

keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi kuasa dan pengaruh dalam masyarakat. Keputusan-keputusan itu memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial yang disebabkan karena ada misalnya: (i) serangan-serangan terhadap diri individu; (ii) serangan-serangan terhadap hak orang; (iii) serangan-serangan terhadap pihak yang berkuasa; (iv) serangan-serangan terhadap keamanan umum.

3. *Attribute* yang kedua disebut *attribute of intention of universal application*. Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan yang harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa dalam masa yang akan datang.
4. *Attribute* yang ketiga disebut *attribute of obligation.* Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pemegang kuasa itu harus mengandung perumusan dari kewajiban pihak ke satu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu. Di dalam hal ini pihak kesatu dan pihak kedua harus terdiri dari individu-individu yang hidup. Kalau keputusan tidak mengandung perumusan dari kewajiban maupun dari hak tadi, maka keputusan tak akan ada akibatnya, dan karena itu keputusan tidak akan merupakan keputusan hukum. Kalau pihak kedua itu adalah misalnya nenek moyang yang sudah meninggal, maka keputusan yang menentukan kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua itu bukan keputusan hukum, tetapi hanya suatu keputusan yang merumuskan suatu kewajiban keagamaan.
5. *Attribute* yang keempat disebut *attribute of sanction,* dan menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak berkuasa harus dikuatkan dengan sangsi dalam arti seluas-luasnya. Sangsi itu bisa berupa

sangsi jasmaniah berupa hukuman tubuh dan depriviasi dari milik (yang misalnya amat dipentingkan dalam sistem-sistem hukum bangsa-bangsa Eropa), tetapi juga berupa sangsi rohani seperti misalnya: menimbulkan rasa takut, rasa malu, rasa dibenci dan sebagainya.

Demikianlah teori L. Pospisil (yang sekarang sudah menjadi gurubesar dalam antropologi di Yale University), mengenai ciri-ciri hukum adat yng memberi pembatasan antara adat dan hukum adat. Teori itu termaktub dalam dissertasinya berjudul *The Kapauku Papuans and Their Law* (1956), yang menyebabkan bahwa ia mendapat Ph.D.-nya dari Universitas Yale dengan judisium *cum laude.*

6

APAKAH SISTEM NILAI-BUDAYA?

KINI dalam pidato-pidato dan sambutan-sambutan resmi, istilah "sistem nilai-budaya", istilah "sikap mental" dan istilah "mentalitas" muncul dengan frekwensi yang tinggi, dan demikian juga dalam pertemuan-pertemuan di mana orang asyik membicarakan soal-soal pembangunan. Berhubungan dengan itu banyak pula orang yang sebenarnya ingin tahu dengan lebih tegas, apakah sistem nilai-budaya, apakah sikap-mental dan apakah mentalitas itu.

Sistem nilai-budaya, seperti apa yang pernah saya terangkan dalam tulisan lain dalam karangan no 3 di atas, merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai-budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai-budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai-budaya itu.

Sebagai bagian dari adat-istiadat dan wujud ideel dari kebudayaan, sistem nilai-budaya seolah-olah berada di luar dan di atas diri para individu yang menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Para individu itu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsepsi-

konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai-budaya tadi sukar diganti dengan nilai-nilai-budaya lain dalam waktu singkat.

Istilah kedua, ialah sikap mental, walaupun sering dikacaukan dengan istilah sistem nilai-budaya, sebenarnya mempunyai arti yang samasekali berlainan. Konsep sistem nilai-budaya atau *cultural value system* itu banyak dipakai dalam ilmu-ilmu sosial, yang terutama memfokus kepada kebudayaan dan masyarakat, dan baru secara sekunder kepada manusia sebagai individu dalam masyarakat. Sebaliknya, konsep sikap mental atau *attitude* itu, banyak dipakai dalam ilmu psikologi, yang terutama memfokus kepada individu dan baru secara sekunder kepada kebudayaan dan masyarakat yang merupakan lingkungan dari individu. Suatu sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan manusia atau masyarakatnya, baik lingkungan alamiahnya, maupun lingkungan fisiknya). Walaupun berada di dalam diri seorang individu, sikap itu biasanya toh juga dipengaruhi oleh nilai-budaya, dan sering juga bersumber kepada sistem nilai-budaya.

Istilah ketiga, ialah mentalitas, bukan istilah buat suatu konsep ilmiah dengan suatu arti yang ketat. Istilah itu adalah suatu istilah sehari-hari dan biasanya diartikan sebagai: Keseluruhan dari isi serta kemampuan alam pikiran dan alam jiwa manusia dalam hal menanggapi lingkungannya. Pokoknya, istilah itu mengenai sistem nilai-budaya maupun sikap mental, dan bisa kita pakai kalau kita membicarakan kedua hal tersebut, tanpa maksud untuk secara ketat mengkhusus terhadap salah satu dari keduanya.

Karena merupakan bagian dari adat, suatu sistem nilai-budaya biasanya dianut oleh suatu persentase yang besar dari warga sesuatu masyarakat. Sebaliknya, karena berada dalam jiwa individu, suatu sikap sering hanya ada pada individu-individu tertentu dalam

masyarakat. Sungguhpun demikian, toh ada juga sikap-sikap tertentu yang karena terpengaruh oleh sistem nilai-budaya, bisa didapatkan secara lebih meluas pada banyak individu dalam masyarakat.

Contoh-contoh dari sistem nilai-budaya akan banyak diberikan di bawah nanti. Contoh dari suatu sikap yang biasanya hanya ada pada individu-individu tertentu saja, adalah misalnya *sikap congkak* dalam hal menghadapi orang lain yang berkedudukan sebagai bawahan, atau orang yang bersifat lebih kurang dan lemah secara fisik, mental, dan material. Contoh dari suatu sikap yang bisa didapatkan secara lebih meluas pada banyak individu dalam masyarakat karena terpengaruh oleh sistem nilai-budaya, adalah *sikap segan terhadap pekerjaan yang bersifat memberi pelayanan pada orang lain.* Dasarnya adalah mungkin sikap congkak seperti tersebut di atas, tetapi sikap ini kemudian terpengaruh oleh nilai-budaya yang menganggap bahwa mencapai kedudukan tinggi di mana orang dapat dilayani orang lain, tetapi tidak usah melayani orang lain, menjadi tujuan utama yang memberi arti kepada segala usaha dari karya manusia dalam hidupnya.

Kini banyak juga orang yang bertanya: "Suatu sistem nilai-budaya dalam suatu kebudayaan itu sebenarnya mengenai masalah-masalah apa?" Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menunjuk kepada suatu kerangka dari masalah yang dapat diterapkan secara universal, untuk menganalisa semua sistem nilai-budaya dari semua kebudayaan yang ada di dunia. Kerangka itu mulai dikembangkan oleh seorang ahli antropologi, Clyde Kluckhohn. Sesudah ia meninggal, konsepnya dikembangkan lebih lanjut oleh isterinya Florence Kluckhohn, yang dengan kerangka itu kemudian melakukan suatu penelitian yang nyata. Uraian tentang konsep itu bersama hasil penelitiannya dimuat dalam sebuah buku berjudul *Variations in Value Orientation* (1961), yang ditulisnya bersama dengan seorang ahli sosiologi bernama F.L. Strodtbeck.

Menurut kerangka Kluckhohn, semua sistem nilai-budaya dalam semua kebudayaan di dunia itu, sebenarnya mengenai lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok itu adalah:

1. Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia (selanjutnya disingkat MH);
2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia (selanjutnya disingkat MK);
3. Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu (selanjutnya disingkat MW);
4. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (selanjutnya disingkat MA);
5. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (selanjutnya disingkat MM).

Cara berbagai kebudayaan di dunia itu mengkonsepsikan masalah-masalah universal tersebut di atas itu bisa berbeda-beda, walaupun kemungkinan untuk bervariasi itu terbatas adanya. Misalnya mengenai masalah pertama (MH), ada kebudayaan yang memandang hidup manusia itu pada hakekatnya suatu hal yang buruk dan menyedihkan, dan karena itu harus dihindari. Kebudayaan-kebudayaan yang terpengaruh oleh agama Buddha misalnya dapat disangka mengkonsepsikan hidup sebagai suatu hal yang buruk. Pola-pola kelakukan manusia akan mementingkan segala usaha untuk menuju ke arah tujuan untük bisa memadamkan hidup itu (*nirvana* = meniup habis), dan meremehkan segala kelakuan yang hanya mengekalkan rangkaian kelahiran kembali (*samsara*). Adapun kebudayaan-kebudayaan lain memandang hidup manusia itu pada hakekatnya buruk, tetapi manusia dapat mengusahakan untuk menjadikan hidup suatu hal yang baik dan menggembirakan.

Mengenai masalah kedua (MK), ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup; kebudayaan lain menganggap hakekat dari karya manusia itu untuk memberikannya suatu kedudukan yang penuh kehormatan dalam masyara-

kat; sedangkan kebudayaan lain lagi menganggap hakekat karya manusia itu sebagai suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.

Kemudian mengenai masalah ketiga (MW), ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang penting dalam kehidupan manusia itu masa yang lampau. Dalam kebudayaan-kebudayaan serupa itu, orang akan lebih sering mengambil pedoman dalam kelakuannya contoh-contoh dan kejadian-kejadian dalam masa yang lampau. Sebaliknya, banyak pula kebudayaan yang hanya mempunyai suatu pandangan waktu yang sempit. Warga dari suatu kebudayaan serupa itu tidak akan memusingkan diri dengan memikirkan zaman yang lampau maupun masa yang akan datang. Mereka hidup menurut keadaan yang ada pada masa sekarang ini. Kebudayaan-kebudayaan lain lagi malahan justru mementingkan pandangan yang berorientasi sejauh mungkin terhadap masa yang akan datang. Dalam kebudayaan serupa itu perencanaan hidup menjadi suatu hal yang amat penting.

Selanjutnya mengenai masalah keempat (MA), ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang alam itu suatu hal yang begitu dahsyat, sehingga manusia pada hakekatnya hanya bisa bersifat menyerah saja tanpa ada banyak yang dapat diusahakannya. Sebaliknya, banyak pula kebudayaan lain yang memandang alam itu sebagai suatu hal yang bisa dilawan oleh manusia, dan mewajibkan manusia untuk selalu berusaha menaklukkan alam. Kebudayaan lain lagi menganggap bahwa manusia itu hanya bisa berusaha mencari keselarasan dengan alam.

Akhirnya mengenai masalah kelima (MM), ada kebudayaan-kebudayaan yang amat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Dalam pola kelakuannya, manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan serupa itu akan berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior, atau orang-orang atasan. Kebudayaan lain lebih mementingkan hubungan horisontal antara manusia dengan sesama-

nya. Orang dalam suatu kebudayaan serupa itu akan amat merasa tergantung kepada sesamanya, dan usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggap amat penting dalam hidup. Kecuali itu banyak kebudayaan lain yang tidak membenarkan anggapan bahwa manusia itu tergantung kepada orang lain dalam hidupnya. Kebudayaan-kebudayaan yang amat mementingkan individualisme serupa itu, menilai tinggi anggapan bahwa manusia itu harus berdiri sendiri dalam hidupnya, dan sedapat mungkin mencapai tujuannya dengan sedikit mungkin bantuan dari orang lain.

Untuk memudahkan para pembaca, maka kerangka Kluckhohn terurai di atas akan saya cantumkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL I

Kerangka Kluckhohn Mengenai Lima Masalah Dasar Dalam Hidup Yang Menentukan Orientasi Nilai-Budaya Manusia

Masalah dasar dalam hidup	Orientasi Nilai-budaya		
Hakekat hidup (MH)	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik
Hakekat karya (MK)	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dan sebagainya.	Karya itu untuk menambah karya
Persepsi manusia tentang waktu (MW)	Orientasi ke masa depan	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Pandangan manusia terhadap alam (MA)	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam
Hakekat hubungan antara manusia dengan sesamanya (MM)	Orientasi kolateral (horisontal), rasa ketergantungan pada sesamanya (berjiwa gotong-royong)	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh atasan dan berpangkat	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

7

APAKAH MENTALITAS PEMBANGUNAN?

PERTANYAAN itu kini sering diajukan kepada saya, berhubungan dengan salah satu pernyataan kesimpulan yang dihasilkan oleh *Seminar Perkembangan Sosial-Budaya dalam Pembangunan Nasional* dari LIPI tahun 1970, yang berbunyi bahwa "sikap mental orang Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan." Pertanyaan itu telah menimbulkan banyak sekali tanggapan dan pertanyaan dari berbagai pihak.

Adapun suatu jawab yang tepat, secara logis terlebih dahulu memerlukan suatu bayangan ke depan mengenai bentuk masyarakat seperti apa yang ingin kita capai dengan pembangunan kita. Hal itu masih belum dikonsepsikan oleh bangsa kita. Berbagai suku-bangsa, berbagai aliran, dan berbagai golongan dalam negara kita yang demikian banyaknya itu mungkin sudah mempunyai konsepsinya masing-masing yang berlainan satu dengan yang lain; tetapi suatu konsepsi konkret untuk dituju bersama belum ada. Jelaslah bahwa model dari masyarakat-masyarakat yang sekarang sudah maju tak mungkin dapat kita contoh begitu saja, karena memang sukar untuk mengajar suatu hal yang sudah terlampau jauh di depan. Bahkan model masyarakat Jepang pun tidak dapat kita tiru, karena lingkungan alam, komposisi penduduk negara, struktur masyarakat, aneka-warna kebudayaan, sistem nilai-budaya, dan agama-agama di negara kita memang berbeda dengan di Jepang.

Walaupun demikian, walaupun kita belum mempunyai bayangan mengenai bentuk masyarakat apa yang sebenarnya ingin kita capai bersama, tetapi jelas bahwa kita harus berusaha untuk menjadi lebih makmur dari sekarang, bahwa kita harus berusaha untuk lebih menyempurnakan demokrasi kita, dan bahwa kita harus berusaha untuk menghasilkan karya yang lebih dapat kita banggakan.

Untuk dapat mencapai suatu keadaan yang agak lebih makmur daripada sekarang saja, sudah tentu perlu suatu intensitas usaha di segala lapangan, yang jauh lebih besar daripada apa yang biasa kita gerakkan sampai kini. Berapa kali lebih intensif? Coba kita perhatikan keterangan para ahli ekonomi yang berkata sebagai berikut: Penduduk Indonesia bertambah dengan 2,8% tiap tahun (atau kira-kira 3 juta orang). Dengan demikian, agar kita dapat merasakan sedikit akibat dari kenaikan produksi kita maka laju pertumbuhan ekonomi kita harus lebih besar daripada 2,8% katakanlah 4% dari GNP tiap tahun. Baru dengan laju kenaikan sebesar itulah dapat kita jaga agar hasil produksi tidak dimakan habis oleh ketiga juta mulut yang bertambah tiap tahun itu. Kita tentu harus juga memperhitungkan faktor kebutuhan meningkat. Kebutuhan yang meningkat disebabkan karena dalam rangka hubungan dan pergaulan internasional sekarang ini kita memang tak mungkin mengisolasikan diri dari pengaruh benda-benda mewah yang datang dari negara-negara makmur. Hal itu berarti bahwa suatu laju pertumbuhan 4% setahun sebenarnya masih kurang dan perlu dipercepat menjadi misalnya 6% dari GNP. Katanya ekonomi kita sekarang tumbuh dengan laju 7% (akan menjadi 7,5%), tetapi harus diingat bahwa kecepatan itu hanya karena kapasitas tak-terpakai selama zaman aktivitas ekonomi kita masih amat rendah, baru sekarang tampak menonjol. Namun, anggap saja bahwa kita bisa mempertahankan laju 7,5% itu, maka hal itu berarti bahwa kita memerlukan investasi modal lebih dari 22%. (Kira-kira tiga kali,

menurut perhitungan ICOR atau *increment capital output ratio).* Kalau diingat bahwa kita masih memerlukan biaya rutin untuk menjalankan administrasi, pendidikan, pertahanan dan sebagainya, yang besarnya katanya kira-kira 10% dari GNP, maka tiap tahun kita harus bersedia menyisihkan paling sedikit 10% + 22% = 32% dari GNP. Padahal katanya guna pembangunan, termasuk kredit luar negeri, sekarang kita hanya baru mampu menyisihkan kira-kira 14%, atau atas kemampuan kita sendiri hanya kira-kira 10% dari GNP. Demikian hanya untuk menjadi sedikit lebih makmur saja kita harus dapat berusaha, bekerja, menghemat dan sebagainya, paling sedikit tiga kali lebih keras dan intensif daripada sekarang. Jelas bahwa untuk suatu kenaikan tekanan intensitas usaha sebesar itu, tidak bisa tidak kita harus merobah beberapa sifat dari mentalitas kita.

Suatu nilai-budaya yang perlu dimiliki oleh lebih banyak manusia Indonesia dari semua lapisan masyarakat adalah nilai-budaya yang berorientasi ke masa depan. Suatu nilai-budaya semacam itu akan mendorong manusia untuk melihat dan merencanakan masa depannya dengan lebih saksama dan teliti, dan oleh karèna itu akan memaksa manusia untuk hidup berhati-hati dan untuk berhemat. Kita semua tahu bahwa sifat hemat yang meluas itu amat perlu untuk memungkinkan suatu bangsa menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk mengakumulasi modal.

Suatu nilai-budaya lain yang juga perlu adalah nilai-budaya yang berhasrat untuk mengexplorasi lingkungan alam dan kekuatan-kekuatan alam. Suatu nilai semacam itu akan menambah kemungkinan inovasi, terutama inovasi dalam teknologi. Pembangunan yang memerlukan usaha mengintensifkan produksi tentu tak bisa tidak harus memanfaatkan teknologi yang makin lama makin disempurnakan. Mungkin ada yang beranggapan bahwa kita tak perlu mengembangkan suatu mentalitas yang menilai tinggi inovasi, karena kita tak perlu lagi mengembangkan teknologi.

Sudah banyak bangsa-bangsa maju yang telah melakukannya, sehingga kita tinggal membeli saja teknologi yang telah mereka kembangkan. Namun banyak di antara kita sudah mengalami pahit getirnya membeli teknologi asing itu. Lagipula teknologi asing tidak bisa begitu saja kita pakai, tetapi memerlukan suatu adaptasi yang saksama. Adapun usaha untuk melakukan adaptasi itu, sering merupakan suatu proses yang sama sulitnya dengan mengembangkan teknologi yang baru. Usaha mengadaptasi teknologi juga memerlukan suatu mentalitas yang menilai tinggi hasrat berexplorasi, tetapi juga mutu dan ketelitian.

Suatu mentalitas yang menilai tinggi mutu dan ketelitian itu sebenarnya memerlukan suatu orientasi nilai-budaya yang menilai tinggi hasil dari karya manusia. Sasaran orientasi dari karya seharusnya merupakan hasil dari karya itu sendiri, dan bukan misalnya hasil berupa harta untuk dikonsumsi, atau hasil berupa kedudukan sosial yang menambah gengsi. Tujuan orientasi dari karya demi hasil karyanya dan kepuasan dari karya itu sendiri, adalah apa yang oleh seorang ahli psikologi bernama D.C. McClelland, disebut *achievement orientation* (lihat misalnya bukunya yang terkenal: *The Achieving Society*, New York: The McMillan Company, 1961).

Menurut hemat saya masih ada satu nilai-budaya lagi yang perlu dikembangkan oleh tiap bangsa yang ingin memperbesar tekanan intensitas berusahanya guna mempertinggi produksinya dan menjadi agak lebih makmur sedikit. Hal itu adalah terutama nilai-budaya yang menilai tinggi usaha orang yang dapat mencapai hasil, sedapat mungkin atas usahanya sendiri. Suatu nilai semacam itu kalau diextremkan tentu ada bahayanya akan menuju ke arah individualisme, dan kalau berkembang ke arah yang lebih extrem lagi, akan menjadi isolisme. Tentu kita harus mencegah bahaya ke arah perkembangan secara extrem seperti itu, karena suatu nilai seperti itu akan menghilangkan dasar dari rasa keamanan hidup kita. Namun kalau kita ingat

bahwa nilai-budaya kita menunjukkan kontras yang amat besar dengan individualisme, yaitu nilai yang terlampau berorientasi vertikal ke arah atasan, ke arah orang yang senior, ke arah orang yang berpangkat tinggi, yang selalu harus dimintai restu dulu, maka kita mengerti bahwa kita toh harus berobah sedikit. Nilai yang terlampau berorientasi vertikal ke arah atasan akan mematikan jiwa yang ingin berdiri sendiri dan berusaha sendiri, dan akan menyebabkan timbulnya sikap tak percaya kepada diri sendiri. Nilai seperti itu juga akan menghambat tumbuhnya rasa disiplin pribadi yang murni, karena orang hanya akan taat kalau ada pengawasan dari atas, tetapi akan merasa tak terikat lagi kalau pengawasan tadi menjadi kendor atau pergi. Akhirnya nilai yang terlampau berorientasi ke arah atasan akan juga mematikan rasa tanggung jawab sendiri, tetapi akan membiakkan rasa yang condong untuk selalu melemparkan tanggung jawab ke atas, atau kalau tidak bisa, untuk selalu membagi rata tanggung jawab itu dengan orang lain sehingga rasa tanggung jawab sendiri itu menjadi sekecil mungkin.

Dengan singkat: Suatu bangsa yang hendak mengintensifkan usaha untuk pembangunan harus berusaha agar banyak dari warganya lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan, dan demikian bersifat hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan; lebih menilai tinggi hasrat explorasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi; lebih menilai tinggi orientasi ke arah *achievement* dari karya; dan akhirnya menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri sendiri, berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri.

8

APAKAH KELEMAHAN MENTALITAS KITA UNTUK PEMBANGUNAN?

PENDAHULUAN

SEBELUM saya menjawab pertanyaan itu mungkin ada baiknya kalau saya mengadakan pembedaan dahulu, antara dua golongan besar dalam masyarakat kita yang menunjukkan suatu mentalitas yang berbeda, ialah orang desa yang merupakan lebih dari 84% dari seluruh penduduk dan orang kota.

Orang desa biasanya bekerja dalam sektor pertanian, dan mentalitas mereka adalah suatu mentalitas yang khas, yang kita sebut saja mentalitas petani. Sebaliknya, orang kota bekerja sebagai buruh, pedagang, usahawan atau pegawai. Baik kelas buruh maupun kelas pedagang dan usahawan masih lemah, sehingga kehidupan kota dikuasai oleh kelas pegawai yang amat bergengsi, dan mentalitas penduduk kota didominasi oleh mentalitas pegawai (di kota-kota di Jawa Tengah dan Timur oleh mentalitas priyayi). Orang ABRI yang berkuasa di kota-kota dapat disamakan dengan pegawai, baik dalam sifat pekerjaan mereka, maupun dalam gaya hidup dan mentalitas mereka.

Dalam hal membicarakan kelemahan-kelemahan dalam mentalitas kita untuk pembangunan, perlu dibedakan antara dua hal, ialah (1) konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita, yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran kita, karena terpengaruh atau bersumber

kepada sistem nilai-budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu; dan (2) konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita, yang baru timbul sejak zaman revolusi, dan yang sebenarnya tidak bersumber pada sistem nilai-budaya kita. Tulisan ini akan memfokus dahulu terhadap hal yang tersebut pertama, dan di dalam hal itu akan dipergunakan kerangka Kluckhohn mengenai masalah-masalah pokok dalam hidup yang menjadi orientasi dari sistem nilai budaya manusia, ialah kerangka MH-MK-MW-MA-MM, yang telah diuraikan dalam tulisan-tulisan lain, yaitu no 6 dan 7 di atas.

MH-MK (NILAI BUDAYA MENGENAI HAKEKAT DARI HIDUP DAN KARYA MANUSIA)

Mentalitas petani tidak biasa berspekulasi tentang hakekat dari hidup, dari karya dan hasil karya manusia, dan apabila mereka kita tanyai mengenai hal-hal itu, maka mereka akan melihat terheran-heran dan akhirnya mengajukan jawaban yang amat logis, ialah bahwa manusia itu bekerja keras untuk dapat makan.

Adapun mentalitas priyayi Jawa menghubungkan hakekat karya dengan konsep *amal*. Konsep itu berbeda dengan arti katanya dalam bahasa Arab (*'aml*) yang hanya berarti "perbuatan", tetapi juga berbeda dengan konsep *karma* dalam alam pikiran Hindu-Buddha dahulu. Konsep *amal* dalam alam pikiran Jawa tidak dikaitkan dengan wujud hidup kelak, dalam rangkaian kelahiran kembali, dan sebenarnya juga tidak dengan hidup di akhirat. Konsep *amal* dibayangkan sebagai hasil karya yang mewujudkan kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup ini. Menurut konsepsi orang priyayi, kebahagiaan-kebahagiaan itu adalah misalnya: kedudukan, kekuasaan, dan lambang-lambang lahiriah dari kemakmuran (banyak rumah priyayi dahulu kamar depan dan kamar tamunya tampak megah, kaya dan mengagumkan, tetapi dapurnya gelap, kotor dan tak terurus, sedangkan kamar mandi dan w.c.-nya rusak dan kotor).

Suatu hal yang tidak cocok dengan jiwa pembangunan dalam hal ini adalah bahwa konsep terurai di atas tidak bersumber kepada suatu nilai-budaya yang berorientasi terhadap hasil dari karya manusia itu sendiri (tidak *achievement oriented)*, tetapi hanya terhadap amal dari karya (ibarat orang sekolah yang tidak mengejar ketrampilan yang diajarkan, tetapi hanya ijazahnya saja).

MW (NILAI BUDAYA MENGENAI PERSEPSIA MANUSIA MENGENAI WAKTU)

Mentalitas petani mempunyai persepsi waktu yang terbatas. Irama waktu ditentukan oleh cara-cara adat untuk memperhitungkan tahap-tahap aktivitas pertanian dalam lingkaran waktu. Sebagian besar dari keputusan-keputusan penting dan arah orientasi hidup petani ditentukan oleh keadaan masa kini.

Sebaliknya, mentalitas priyayi Jawa mempunyai persepsi waktu yang banyak ditentukan oleh masa lampau. Rutin kehidupan kantor dan rumah tangga priyayi yang rata serupa dari hari ke hari, diisi dengan suatu rasa sentimen yang agak berlebih-lebih untuk benda-benda pusaka dari nenek moyangnya, dengan perhâtian terhadap mitologi, silsilah, dan karya-karya pujangga-pujangga kuno, serta diselingi dengan upacara-upacara rumit untuk memelihara benda-benda pusaka. Hal itu semuanya tentu bukan hal yang melemahkan mentalitas mereka; hanya saja suatu orientasi yang terlampau banyak terarah ke zaman yang lampau akan melemahkan kemampuan seseorang untuk melihat ke masa depan. Hal ini sebaliknya melemahkan motivasi untuk menabung dan hidup hemat. Unsur mentalitas tersebut terakhir inilah, yang kurang cocok dengan keperluan pembangunan.

MA (MASALAH HAKEKAT HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM)

Konsep mengenai pengaruh nasib yang amat kuat dalam mentalitas petani di Indonesia pada umumnya,

bersumber kepada suatu nilai-budaya yang tidak aktif terhadap alam sekelilingnya. Namun petani Indonesia itu biasanya tidak merasa tunduk terhadap alam; sebaliknya mereka juga tidak merasa mampu untuk menguasainya. Konsepsi bahwa orang itu harus hidup selaras dengan alam adalah suatu konsepsi yang lazim dalam mentalitas petani di Indonesia.

Adapun priyayi di kota-kota di Jawa Tengah dan Timur yang hidupnya dalam kantor, tentu tidak banyak sangkut pautnya dengan alam dalam kenyataan hidupnya. Walaupun demikian mereka toh suka banyak berspekulasi tentang masalah hubungan antara manusia dengan alam, serta arti dari konsep nasib. Spekulasi-spekulasi itu dilakukan dalam pertemuan-pertemuan yang disebut *saraséyan*. Pertemuan-pertemuan serupa itu dahulu, di mana orang duduk berdiskusi sambil minum teh atau kopi dengan gula batu dan menikmati makanan kecil, amat digemari para priyayi sebagai pengisi waktu senggang apabila mereka sedang tidak main judi. *Saraséyan* serupa itu, memang telah banyak menghasilkan ide-ide baik yang telah banyak menjiwai pergerakan nasional kita misalnya. Sebaliknya, dalam kenikmatan berdiskusi dan berkhayal, ada kesempatan untuk melarikan diri dari kesulitan-kesulitan hidup sehari-hari di dalam dunia yang sedang terganggu oleh zaman pancaroba ini, dan bersembunyi dalam alam kebatinan. Pelarian dari dunia nyata ke dunia kebatinan ini, yang menjadi suatu unsur penting dalam gaya hidup seorang priyayi inilah, yang tidak begitu cocok dengan jiwa rasionalisme yang kita perlukan untuk mempercepat pembangunan.

Kecuali itu, terutama dalam pandangan hidup priyayi ada suatu konsep yang penting, ialah konsep bahwa manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh masyarakat dan alam semesta sekitarnya, dan di dalam sistem makrokosmos tersebut ia harus merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang mahabesar itu. Terutama dalam mentali-

tas priyayi dari pandangan hidup itu, telah berkembang suatu mentalitas yang terlampau banyak menggantungkan diri kepada *nasib*. Suatu mentalitas seperti itu tidak begitu cocok dengan jiwa pembangunan.

MM (NILAI BUDAYA MENGENAI HUBUNGAN MANUSIA DENGAN SESAMANYA)

Mentalitas petani Indonesia (tidak hanya di Jawa) menilai tinggi konsep sama-rata-sama-rasa. Dalam rangka ide ini ada suatu konsep penting, ialah bahwa di dunia manusia itu pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, bahwa ia selalu bisa mendapat bantuan dari sesamanya, terutama dari kaum kerabatnya dalam masa kesusahan. Konsep itu memberi suatu landasan yang kokoh bagi rasa keamanan hidup kepadanya. Sebaliknya, konsep sama-rata-sama-rasa juga memberi beberapa kewajiban kepadanya, yaitu kewajiban untuk terus-menerus berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya, terus-menerus memperhatikan keperluan-keperluan sesamanya, dan sedapat mungkin selalu membagi rata keuntungan-keuntungan dengan sesamanya. Suatu konsep gotong-royong seperti itu tentu amat bernilai, hanya saja segi negatifnya adalah bahwa konsep itu juga mewajibkan suatu sikap konformisme yang besar (artinya, orang sebaiknya menjaga agar jangan dengan sengaja berusaha untuk menonjol di atas yang lain). Sikap konformisme inilah agak bertentangan dengan jiwa pembangunan yang justru memerlukan usaha jerih payah dengan sengaja dari pihak individu untuk maju dan menonjol di atas yang lain.

Adat sopan-santun pegawai di seluruh Indonesia (tidak hanya pada orang *priyayi* di Jawa) amat berorientasi ke arah atasan. Segi negatif dari suatu orientasi nilai-budaya yang terlampau terarah kepada orang-orang yang berpangkat tinggi, yang senior, dan orang-orang yang tua itu adalah bahwa hasrat untuk berdiri dan berusaha sendiri akan dimatikan; begitu juga dengan rasa disiplin pribadi yang murni (karena

orang hanya akan taat apabila ada pengawasan dari atas); dan rasa tanggung jawab sendiri. Mentalitas menunggu-restu-dari-atas jelas tidak cocok dengan jiwa pembangunan.

Kelemahan mentalitas kita yang lain, yang baru timbul setelah zaman revolusi, akan diuraikan dalam tulisan berikutnya.

9

APAKAH KELEMAHAN MENTALITAS KITA YANG TIMBUL SESUDAH REVOLUSI?

PENDAHULUAN

DALAM rangka menjawab pertanyaan yang kini sering diajukan orang, ialah pertanyaan mengenai: "Apakah sebenarnya sifat kelemahan dari mentalitas kita untuk pembangunan?" saya telah membicarakan beberapa dari sifat kelemahan itu dalam karangan yang lalu. Sifat-sifat yang saya sebutkan dalam karangan yang lalu itu adalah sifat-sifat kelemahan dari mentalitas kita yang sudah ada sejak lama dalam sistem nilai budaya kita yang tradisional. Dalam karangan ini akan saya sebutkan sifat-sifat kelemahan dari mentalitas kita yang baru timbul dalam zaman sesudah revolusi.

AKIBAT REVOLUSI

Kita memang patut bangga dan kagum atas semangat spontan dari rakyat dan para pejuang kemerdekaan, yang dengan suatu revolusi fisik telah berhasil mencapai suatu tahap yang konkret dalam proses pembentukan bangsa kita, ialah suatu negara yang berdaulat, suatu rasa harga-diri sebagai bangsa, dan suatu hasrat untuk bersatu sebagai landasan kuat guna pembinaan lebih lanjut dari proses mengintegrasi kebudayaan dan nasion Indonesia.

Sebaliknya, revolusi kita, serupa dengan semua revolusi yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, telah membawa akibat-akibat post-revolusi berupa kerusakan-kerusakan fisik dan mental, dalam masyara-

kat bangsa kita. Suatu revolusi pertama-tama mematahkan kontinuitas kehidupan masyarakat, dengan konsekuensi timbulnya improvisasi dari pola-pola kehidupan baru yang tidak mantap, dan yang menimbulkan keragu-raguan dalam suatu kehidupan tanpa pedoman. Suatu konsekuensi lain adalah terabaikannya prasarana-prasarana ekonomi dan kehidupan ekonomi yang menjadi kacau.

Dalam masa sesudah-revolusi, kalau kemerdekaan formal sudah tercapai, timbul banyak masalah lain, dan biasanya dengan segera mulai suatu proses yang oleh para ahli ilmu politik sering disebut proses dekolonisasi. Dalam proses itu norma-norma serta peraturan-peraturan lama yang dianggap feodal atau kolonial dijebol dengan maksud untuk diganti dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang baru. Namun biasanya fungsi semula dari anjuran-anjuran supaya meninggalkan norma-norma lama itu menjadi kabur; penjebolan norma-norma lama itu sendiri menjadi tujuan yang utama, dan norma-norma serta peraturan-peraturan baru tak dibina dan disusun. Dengan demikian keragu-raguan dalam kehidupan tanpa pedoman bertambah lagi.

Masalah post-revolusi dan proses dekolonisasi yang dalam negara kita berlangsung terlampau lama, telah mengakibatkan bahwa usaha untuk merehabilitasi prasarana ekonomi diabaikan, dan jalan-jalan, jembatan-jembatan, peralatan kereta api, terusan-terusan, pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya menjadi makin rusak. Demikian bertambah lagi keberantakan ekonomi.

Adapun bagaimana keberantakan ekonomi tersebut berjalan sejajar dengan kemunduran-kemunduran dalam sektor-sektor kehidupan sosial-budaya yang lain, seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi, dan korupsi menyeluruh, sudah kita alami semuanya, dan karena itu tak perlu diperinci lebih lanjut di sini. Hal yang amat serius adalah bahwa di belakang kemunduran-kemunduran dalam kehidupan ekonomi dan sosial-

budaya yang tampak lahir itu, dalam zaman post-revolusi tumbuh juga beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia, yang lebih menjauhkan kita lagi dari jiwa pembangunan itu. Sifat-sifat kelemahan tersebut, yang bersumber pada kehidupan penuh keragu-raguan dan kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas itu, adalah:
(1) Sifat mentalitas yang meremehkan mutu; (2) Sifat mentalitas yang suka menerabas; (3) Sifat tak percaya kepada diri sendiri; (4) Sifat tak berdisiplin murni; dan (5) Sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.

Adapun kedua sifat yang tersebut pertama (no. 1 dan 2) akan dibicarakan dengan lebih luas di bawah ini. Ketiga sifat yang tersebut kemudian (no. 3, 4 dan 5) akan dibicarakan dalam karangan no. 10 dalam bunga rampai ini.

MENTALITAS YANG MEREMEHKAN MUTU

Kebutuhan akan kualitas dari hasil karya kita, dan rasa peka kita terhadap mutu, sudah hampir hilang. Hal itu rupa-rupanya adalah akibat otomatis dari kemiskinan menghebat yang melanda bangsa kita. Demikian kita sampai tak sempat memikirkan mengenai mutu dari pekerjaan yang dihasilkan dan mutu dari barang dan jasa yang kita konsumsi. Kita sudah gembira apabila suatu pekerjaan dapat mencapai penyelesaian atau suatu barang dan jasa ada tersediakan. Mungkin dengan meningkatnya kemakmuran dan lebih banyak tersedianya barang dan jasa, persyaratan akan meningkat pula, dan rasa kepekaan kita terhadap mutu akan tumbuh kembali.

Erat bersangkut paut dengan itu adalah tak adanya unsur saingan dalam hal menghasilkan pangan, sandang, dan barang ekspor, dalam memberi jasa, dan dalam hal karya ilmiah. Memang masih terlampau terbatas kapasitas produksi kita dalam segala lapangan di negara kita. Serupa dengan di banyak negara yang sedang berkembang, di sini sebagian besar dari

produksi masih dimonopoli oleh sejumlah orang mampu dan tenaga ahli yang amat terbatas.

Kecuali tidak adanya kesempatan dan stimulasi untuk bersaing, rupa-rupanya jiwa bersaing memang tak ada dalam banyak kebudayaan suku-bangsa di Indonesia, baik dari lapisan petani di desa-desa, maupun dari lapisan-lapisan penduduk di kota-kota (kecuali mungkin pada para perantau dalam kebudayaan suku-suku-bangsa di Sumatra dan Sulawesi Selatan, tetapi ketetapan mengenai hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut). Kalau demikian, maka kurangnya jiwa bersaing itu juga merupakan suatu sifat dalam sistem nilai-budaya orang Indonesia yang tidak cocok dengan jiwa pembangunan. Seperti apa yang telah kita lihat dalam karangan no. 8 dalam seri ini, orientasi nilai-budaya kita memang terlampau mementingkan konsep ketergantungan kepada atasan atau kepada sesama manusia dalam komunitas. Adapun pembicaraan mengenai hal hubungan antara jiwa penyaing dan orientasi nilai-budaya orang Indonesia, yang sebenarnya suatu hal yang komplex, ditangguhkan saja untuk suatu karangan lain dalam seri ini.

Kembali kepada masalah mentalitas yang meremehkan mutu, perlu disebutkan bahwa mentalitas itu dalam masyarakat kita juga jelas disebabkan karena proses penyebaran, pengluasan, pemerataan, dan extensifikasi dari sistem pendidikan kita yang tak disertai dengan perlengkapan sewajarnya dari prasarana-prasarana pendidikan.

MENTALITAS YANG SUKA MENERABAS

Mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuannya secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara langkah demi selangkah, yang untuk mudahnya kita sebut saja "mentalitas menerabas", merupakan akibat dari mentalitas yang meremehkan mutu tersebut di atas. Dalam masyarakat Indonesia sekarang ini tampak terlampau banyak usahawan baru yang mau saja mencapai dan memamerkan taraf hidup

yang mewah dalam waktu secepat-cepatnya, dengan cara-cara yang tidak lazim, atau dengan cara "menyikat keuntungan sebesar-besarnya mumpung ada kesempatan", tanpa mau untuk juga mengunyah pahit getirnya masa permulaan berusaha. Sekarang ini tampak pula terlampau banyak pegawai yunior yang ingin segera mencapai fasilitas-fasilitas pangkat-pangkat tinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan cara-cara menerabas, tanpa rela berkorban dan berjuang melawan kesukaran-kesukaran dalam mencapai suatu ketrampilan dan kepandaian ilmu yang diperlukan. Ditinjau dari sudut contoh-contoh tersebut, mungkin juga bisa dikatakan bahwa mentalitas menerabas itu bukan suatu akibat dari sikap tak sadar akan arti dari kualitas; sebaliknya, mentalitas tersebut terakhir itu merupakan suatu akibat dari mentalitas menerabas. Menurut hemat kami, kedua-duanya memang saling pengaruh-mempengaruhi, tetapi yang terang ialah bahwa kedua-duanya juga disebabkan oleh gejala krisis norma-norma terurai di atas.

Sudah tentu suatu mentalitas menerabas itu pada dasarnya juga dapat disamakan dengan "mentalitas mencari jalan paling gampang", dan ditinjau dari sudut itu mentalitas menerabas itu pada hakekatnya suatu sikap yang boleh dikata universal, dan ada pada hampir semua manusia dalam segala macam bentuk dan lingkungan kebudayaan di dunia. Walaupun begitu, berbeda dengan apa yang secara sepintas lalu dapat diobservasi dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, dalam banyak masyarakat lain mentalitas mencari jalan paling gampang itu kurang tampak menonjol. Di sana kegiatan yang terdorong oleh mentalitas serupa itu memang masih dapat dikendali dan dikekang. Dikendali, karena dalam pandangan umum pada masyarakat-masyarakat lain tadi masih ada kesadaran akan guna dari garis panjang kemajuan hidup, dan dikekang karena di sana ada norma-norma yang memaksa orang menuruti garis panjang kemajuan hidup itu secara langkah demi selangkah.

Dalam masyarakat Indonesia yang tradisional, rupa-rupanya ada pula konsep-konsep adat yang berfungsi sebagai pengekang mentalitas mencari jalan paling gampang itu. Di situ tampak dari peribahasa-peribahasa atau dari beberapa kepercayaan tertentu, bahwa ayah-ayah dan nenek-nenek kita juga menjunjung tinggi konsepsi mengenai garis panjang kemajuan hidup. Teringatlah kita misalnya nasehat seorang ibu: "Orang yang belum mantu, yang belum mengawinkan anaknya yang pertama, pantang membangun rumah. Kalau pantangan itu dilanggar dan ia toh membangun rumah, tentu rumah itu akan membawa malapetaka dalam hidupnya". Nasehat orang tua serupa itu tentu akan kita tertawakan sebagai takhayul, tetapi kalau kita renungkan inti dari kepercayaan itu secara lebih mendalam, maka tampak di belakangnya suatu maksud mengintensifkan pandangan akan garis panjang kemajuan hidup, dan suatu maksud mencegah mentalitas menerabas.

Apakah sebenarnya yang menyebabkan mulai menjalarnya dengan meluas mentalitas menerabas itu akhir-akhir ini? Gejala ini sebenarnya sudah mulai pada zaman pendudukan Jepang. Waktu itu banyak timbul lowongan dalam kedudukan-kedudukan tinggi dalam masyarakat akibat penangkapan dari pegawai-pegawai tinggi Belanda. Kedudukan dari pegawai-pegawai pribumi Indonesia meloncat ke atas, dan gejala ini terulang lagi beberapa kali dalam aparatur negara, dalam zaman Republik Perjuangan di Jogja, di zaman sesudah penyerahan kemerdekaan, selama proses ambil alih perusahaan-perusahaan Belanda mulai tahun 1957—1958, dan dalam masa sesudah 1963 waktu sistem pemerintah Sukarno mulai dengan metode-metodenya yang tak konvensional. Proses meloncat-loncat kedudukan yang terjadi berkali-kali itu menyebabkan bahwa orang-orang yang seangkatan, dan yang berada dalam kondisi yang sama, banyak yang berhasil menempati kedudukan-kedudukan tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Sistem meloncat-loncat itu tentu

juga menyebabkan kemunduran daripada keahlian di Indonesia. Hal itu disebabkan karena sebelum seorang ahli, yang terpandai sekalipun, mendapat kemantapan dalam suatu tahap tertentu dari keahliannya, ia sudah disedot ke atas untuk tugas-tugas yang baru.

10

APAKAH ORIENTASI VERTIKAL ITU COCOK DENGAN PEMBANGUNAN?

PENDAHULUAN

DALAM menjawab pertanyaan yang kini sering diajukan orang mengenai: "Apakah sebenarnya sifat kelemahan dari mentalitas kita untuk pembangunan?" dalam karangan yang lalu, telah saya bicarakan sifat-sifat kelemahan dari mentalitas kita yang sudah ada sejak lama dalam sistem nilai-budaya kita yang tradisional. Kemudian saya bicarakan juga sifat-sifat kelemahan dari mentalitas kita yang baru timbul dalam zaman sesudah revolusi. Di antara sifat-sifat tersebut terakhir ini ada tiga sifat yang walaupun merupakan suatu sifat post-revolusi, toh dapat dikembalikan juga pada suatu nilai-budaya yang tradisional dalam adat-istiadat kita, ialah nilai-nilai-budaya yang terlampau banyak terorientasi vertikal terhadap pembesar, orang-orang berpangkat tinggi, dan orang-orang tua dan senior. Kecuali itu ketiga sifat kelemahan itu adalah: (1) sifat tak percaya kepada diri sendiri; (2) sifat tak berdisiplin murni; dan (3) sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab sendiri.

SIFAT TAK PERCAYA KEPADA DIRI SENDIRI

Sifat tak percaya kepada diri sendiri itu, dalam suatu penelitian yang pernah saya lakukan, tampak membu-ruk terutama di antara golongan-golongan di Indonesia yang hidup dalam kota-kota, ialah golongan pegawai (di antara golongan petani di desa-desa, suatu penelitian

mengenai kepercayaan terhadap kemampuan sendiri itu tidak amat relevan karena jalan kehidupan petani sudah ditentukan dengan mantap). Sikap tak percaya terhadap diri sendiri yang memburuk itu rupa-rupanya adalah suatu konsekuensi dari serangkaian kegagalan, terutama dalam bidang usaha pembangunan, yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam zaman post-revolusi, sejak saat tercapainya kemerdekaan sampai sekarang.

Walaupun sifat mentalitas tersebut tampaknya seakan-akan memburuk sejak zaman post-revolusi, namun sifat itu rupa-rupanya dapat dikembalikan kepada nilai-budaya dalam mentalitas para pegawai dan priyayi, yang terlampau banyak beorientasi vertikal terhadap tokoh-tokoh atasan dan senior. Dalam zaman kolonial nilai-budaya itu telah menimbulkan rasa kekurangan akan kemampuan sendiri, dibandingkan dengan si penjajah berkulit putih. Rasa itu tadi hanya dengan lambat sekali dapat hilang dari mentalitas generasi-generasi orang Indonesia yang pernah mengalami konsekuensi-konsekuensi sistem kolonial. Untuk waktu yang lama, sesudah tidak ada penjajah lagi, masih ada juga orang-orang Indonesia yang selalu lebih lekas percaya atau lebih mendengarkan pendapat orang asing yang berkulit putih, daripada pendapat ahli bangsa sendiri. Sebaliknya, banyak pula orang Indonesia yang secara berlebih-lebihan menentang dan bersifat agresif terhadap orang asing yang berkulit putih, sebagai kompensasi untuk menutupi rasa kurang harga diri.

SIFAT TAK BERDISIPLIN MURNI

Sifat tak berdisiplin secara murni juga merupakan suatu sifat yang justru dalam zaman setelah revolusi tampak makin memburuk dan yang merupakan salah satu pangkal daripada banyak masalah sosial-budaya yang sekarang ini kita hadapi. Walaupun demikian, sifat itu sebenarnya dapat dikembalikan kepada nilai-budaya dalam mentalitas pegawai dan priyayi, yang

terlampau banyak berorientasi vertikal tadi. Banyak orang Indonesia, terutama di kota-kota, hanya berdisiplin karena takut akan pengawasan dari atas. Pada saat pengawasan itu kendor atau tak ada, maka hilanglah juga hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat menaati peraturan-peraturan. Dalam zaman kolonial, para pegawai Indonesia rupa-rupanya terlampau tergantung kepada pengawasan dari atas untuk sektor-sektor hidup yang tidak ada sangsi-sangsinya, seperti dari agama atau adat yang keramat. Mungkin sifat itu juga disebabkan karena dalam pola pengasuhan dan pendidikan anak-anak Indonesia secara tradisional, anak dibiarkan (dalam bahasa Jawa: *diumbar*) berkeliaran, mencari irama hidupnya sendiri tanpa disiplin dan irama pembagian waktu sehari-hari yang ketat. Mengenai hal ini para ahli psikologi tentu akan lebih tahu daripada saya.

SIFAT TAK BERTANGGUNG JAWAB

Dalam zaman setelah revolusi, sifat ini terutama tampak memburuk dalam kalangan pegawai dan priyayi di kota-kota, dan terutama dalam hal mengenai perjanjian-perjanjian yang bersifat ekonomis. Sikap tak bertanggung jawab dalam pekerjaan mata pencaharian hidup sehari-hari mudah dapat kita mengerti sebab-sebabnya. Kesukaran hidup, kemiskinan, dan kekurangan tenaga banyak memaksa orang Indonesia untuk membagi perhatiannya kepada lebih dari satu pekerjaan dan kewajiban. Demikian sikap tak bertanggung jawab ini sebenarnya merupakan suatu keadaan tak mampu dari orang yang hidup dalam suatu keadaan serba-kurang yang tak ada taranya.

Kecuali itu tanggung jawab dalam kewajiban pekerjaan sehari-hari, sesudah zaman kemerdekaan itu tak pernah dipupuk dengan sungguh-sungguh. Dalam zaman kolonial dahulu, orang diajar bertanggung jawab, dan memang banyak orang zaman itu memperlihatkan suatu rasa tanggung jawab terhadap peker-

jaannya walaupun sebagian besar rupa-rupanya hanya memperlihatkan rasa itu karena takut pada atasannya yang tidak akan ragu-ragu menjatuhkan sangsi-sangsi yang keras. Dengan demikian tanggung jawab dalam mentalitas manusia ditanamkan dengan sangsi-sangsi, yang sebaliknya tergantung kepada norma-norma tertentu. Dalam proses penjebolan norma-norma kolonial, norma-norma yang juga penting dalam hubungan dengan memupuk rasa tanggung jawab itu, ikut terjebol. Maka orang menjadi ragu-ragu tentang hal-hal yang mana dan kepada siapa ia harus bertanggung jawab.

Kalau ditinjau dari sudut itu, maka sifat tak adanya rasa tanggung jawab sekarang ini sebenarnya dapat pula dikembalikan kepada nilai-budaya tradisional yang terlampau banyak berorientasi vertikal itu tadi, sehingga tanggung jawab terhadap kewajiban itu hanya kuat apabila ada pengawasan yang keras dari atas. Dengan kendornya pengawasan dari norma-norma itu, maka hilang pulalah rasa tanggung jawab. Dengan analisa serupa itu, maka menurunnya rasa tanggung jawab itu dapat disamakan dengan menurunnya rasa disiplin yang akhir-akhir ini juga tampak sebagai suatu gejala yang meluas dalam masyarakat Indonesia.

Segala hal terurai di atas itu tentu lepas dari keadaan bahwa sikap tak bertanggung jawab itu juga disebabkan karena kurangnya pendidikan dan kematangan watak. Manusia yang berasal dari suatu kalangan yang kurang memperhatikan pendidikan dan terutama perkembangan watak, biasanya menunjukkan sikap tak bertanggung jawab.

Adapun sikap tak bertanggung jawab dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat urusan keuangan dan transaksi ekonomis, sebenarnya juga merupakan suatu perwujudan dari suatu mentalitas yang bersandar kepada suatu nilai-budaya lama. Di atas telah kita lihat adanya pandangan bahwa pola perasaan bersalah seorang Indonesia itu adalah berdasarkan unsur "menyesal karena bersalah" (seorang ahli antropologi,

R. Benedict, pernah membedakan antara adanya kebudayaan-kebudayaan yang bersifat *shame cultures* dan *guilt cultures*). Perasaan bersalah tersebut hanya timbul kalau kelihatan banyak orang, tetapi tidak didasarkan atas suatu rasa menyesal karena perbuatan-perbuatan kesalahan itu sendiri. Dalam lapangan-lapangan hidup yang berakar ke dalam kebudayaan lama, seperti dalam sistem hubungan kekerabatan, dalam pergaulan sosial, dalam kehidupan beragama, dan dalam kesenian, akibat-akibat kurang baik yang mungkin berasal dari suatu mentalitas serupa itu sudah dikendalikan oleh norma-norma lama, tetapi dalam lapangan-lapangan hidup yang baru saja mulai berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti misalnya dalam kehidupan ekonomi, dalam hal memelihara alat-alat modern, maka norma-norma baru yang berhubungan dengan itu belum sempat berkembang juga.

Sopan-santun yang bersangkutan dengan urusan keuangan dan transaksi-transaksi yang bersifat ekonomi, memang masih amat diremehkan dalam sistem nilai-budaya orang Indonesia. Dalam rangka itu sikap tak bertanggung jawab tadi lebih-lebih menonjol karena dalam keadaan berhadapan muka orang sering bersikap positif, padahal maksudnya adalah bersikap negatif. Kontradiksi ini disebabkan oleh suatu motif lain yang dianggap penting dalam sopan-santun pergaulan dalam banyak kebudayaan di Indonesia, ialah bahwa dalam keadaan berhadapan muka, orang sungkan untuk menimbulkan rasa kecewa pada orang yang dihadapinya. Maka di hadapan muka orang ia berkata: "Ya," tetapi di belakangnya ia tidak menepati janjinya. Dengan makin mundurnya keadaan ekonomi Indonesia, sikap serupa itu tampak makin luas dalam masyarakat Indonesia.

Dalam hal pemeliharaan alat-alat modern, yaitu juga suatu lapangan hidup yang baru, sikap tak bertanggung jawab itu disebabkan karena bangsa Indonesia, terutama generasi-generasi sesudah zaman kemerdekaan,

tak pernah mempunyai kesempatan luas untuk dididik dalam hal-hal itu. Pada generasi-generasi tua dari zaman kolonial sikap itu pada sebagian memang sudah mulai merasuk ke dalam jiwa mereka, tetapi pada sebagian yang lain, hanya ada pada lahirnya saja. Orang hanya bersikap bertanggung jawab terhadap kewajiban memelihara peralatan modern, kalau ada pengawasan dari atas.

11

APAKAH GOTONG-ROYONG ITU SEBENARNYA?

SEJARAH TIMBULNYA ISTILAH GOTONG-ROYONG

WALAUPUN kini frekuensi munculnya istilah gotong-royong sudah tidak lagi sebesar waktu dalam zaman Sukarno, toh ada beberapa cendekiawan yang dalam suatu diskusi mengenai masalah aspek-aspek sosial-budaya dalam pembangunan, secara serius mengajukan kepada saya pertanyaan: "Apakah sebenarnya gotong-royong itu?"

Konsep gotong-royong yang kita nilai tinggi itu merupakan suatu konsep yang erat sangkut-pautnya dengan kehidupan rakyat kita sebagai petani dalam masyarakat agraris. Istilahnya istilah Jawa, tetapi rupa-rupanya tidak amat tua. Saya pernah bertanya kepada ahli bahasa Jawa Kuno dan lexikograf ulung kita, Prof. Zoetmulder, tentang soal itu. Beliau berkata bahwa dalam seluruh kesusasteraan Jawa Kuno maupun Jawa Madya (*Kakawin, kidung* dan sebagainya) sudah pasti tidak ada istilahnya. Rupa-rupanya juga dalam kesusasteraan Jawa Baru (*Babad*, *serat* dan sebagainya) istilah itu tidak ada.

Tidak adanya suatu istilah dalam kesusasteraan, tentu belum berarti bahwa dalam kenyataan bahasa sehari-hari antara rakyat di desa-desa, istilah itu juga tidak ada. Hanya saja dari mana di Jawa istilah itu berasal, tidak jelas lagi. Di berbagai daerah di Jawa ada istilah-istilah khusus yang berbeda-beda satu dengan lain. Istilah gotong-royong untuk pertama kali tampak dalam bentuk tulisan dalam karangan-karangan ten-

tang hukum adat dan juga dalam karangan-karangan tentang aspek-aspek sosial dari pertanian (terutama di Jawa Timur) oleh para ahli pertanian Belanda lulusan Wageningen.

GOTONG-ROYONG DALAM BERCOCOK TANAM

Dalam kehidupan masyarakat desa di Jawa, gotong-royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di sawah. Untuk keperluan itu, dengan adat sopan-santun yang sudah tetap, seorang petani meminta beberapa orang lain sedesanya, misalnya, untuk membantunya dalam mempersiapkan sawahnya untuk masa penanaman yang baru (memperbaiki saluran-saluran air dan pematang-pematang, menyangkul, membajak, menggaru dan sebagainya). Petani tuan-rumah hanya harus menyediakan makan siang tiap hari kepada teman-temannya yang datang membantu itu, selama pekerjaannya berlangsung. Kompensasi lain tidak ada, tetapi yang minta bantuan tadi harus mengembalikan jasa itu dengan membantu semua petani yang diundangnya tadi, tiap saat apabila mereka memerlukan bantuannya. Dengan demikian sistem gotong-royong sebagai suatu sistem pengerahan tenaga seperti itu, amat cocok dan flexibel untuk teknik bercocok tanam yang bersifat usaha kecil dan terbatas, terutama waktu unsur uang belum masuk ekonomi pedesaan. Tenaga tambahan dapat dikerahkan bilamana perlu, dan segera dibubarkan lagi bila pekerjaan selesai. Di desa-desa di Jawa, kerjasama tolong-menolong dalam bercocok tanam seperti itu biasanya dilakukan antara para petani yang memiliki bidang-bidang sawah yang berdekatan letaknya.

Dengan masuknya uang menjadi unsur penting dalam kehidupan ekonomi pedesaan, yang di beberapa daerah di Jawa sudah mulai dalam abad ke-19 yang lalu,

tetapi di beberapa daerah lain mungkin baru setengah abad yang lalu, maka sistem pengerahan tenaga seperti itu mulai dianggap kurang praktis. Memang seorang ahli pertanian Belanda yang pernah bekerja di daerah Blitar di Jawa Timur bernama G.H. van der Kolff, menulis dalam tahun 1920, bahwa di daerah pedesaan di Blitar itu banyak petani mulai meninggalkan adat gotong-royong dalam produksi pertanian, dan menganggap lebih praktis untuk menyewa saja buruh tani yang diberi upah berupa uang. Di daerah Blitar katanya, yang dalam tahun 1920 sudah merupakan daerah yang cukup padat, banyak petani sudah tidak mempunyai tanah lagi, sehingga terdapat penawaran buruh tani yang tinggi dengan upah yang sangat rendah. Kecuali itu, menurut laporan Van der Kolff, murid-murid dari pesantren yang banyak terdapat di desa-desa situ, juga sering menawarkan jasa mereka sebagai buruh tani. Dalam tahun 1920-an, di daerah Blitar jasa buruh tani juga banyak ditawarkan oleh penduduk wanita di desa-desa. Mereka banyak dikerahkan untuk pekerjaan memindahkan bibit padi dari pesemaian untuk ditanam di sawah. Untuk itu mereka juga diberi upah harian berupa uang (lihat karangan G.H. van der Kolff, De Historische Ontwikkeling van de Arbeidsverhoudingen bij de Rijstcultuur in een Afgelegen Streek op Java. *Volkscredietwezen*, 1937: hlm. 3-72).

Saya sendiri pernah mengadakan penelitian yang khusus mengenai aktivitas-aktivitas gotong-royong di beberapa desa di Jawa Tengah bagian selatan (Kebumen, Karanganyar) dalam tahun 1958 dan 1959. Di desa-desa di daerah itu, gotong-royong disebut *sambatan*, dan memang mempunyai fungsi seperti terurai di atas. Istilah *sambatan* itu berasal dari kata *sambat*, artinya "minta bantuan". Menarik adalah di sini persamaan dengan istilahnya dalam bahasa Jerman *bitarbeit*, artinya "pekerjaan bantuan yang diminta" (dari kata *bitten* = minta) untuk aktivitas gotong-royong seperti itu juga, yang kira-kira setengah abad yang lalu masih juga dilakukan di daerah pedesaan di Jerman.

Waktu saya mengadakan penelitian di daerah Karanganyar-Kebumen itu, juga sudah ada anggapan bahwa menyewa buruh tani dengan upah uang itu jauh lebih praktis daripada *menyambat* orang tetangga dengan sopan-santun adat dan dengan kewajiban menjamu yang amat merepotkan. Memang daerah Karanganyar-Kebumen merupakan salah satu daerah yang paling padat di Jawa, maka buruh tani di sana sangat murah.

Adat *sambatan*, walaupun oleh sebagian besar petani di daerah Karanganyar-Kebumen sudah dianggap kurang praktis, toh masih dilakukan oleh suatu bagian cukup besar dari para petani di sana sekitar tahun 1959 itu. Istilah gotong-royong, baru saja dikenal para petani di sana, ketika tiga-empat tahun sebelumnya, istilah itu diintroduksi di daerah itu selama kampanye pemilu berlangsung.

AKTIVITAS TOLONG-MENOLONG LAIN DALAM MASYARAKAT DESA

Kecuali dalam *sambatan* dalam produksi pertanian, aktivitas tolong-menolong juga tampak dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang lain, ialah:

1) Aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, misalnya: menggali sumur, mengganti dinding bambu dari rumah, membersihkan rumah dan atap rumah dari hama tikus dan sebagainya. Adat untuk meminta bantuan tetangga guna pekerjaan-pekerjaan serupa itu di daerah Karanganyar-Kebumen dikonsepsikan sebagai suatu hal yang berbeda dengan *sambatan*, dan disebut dengan istilah yang lain, ialah *guyuban*.
2) Aktivitas tolong-menolong antara kaum kerabat (dan kadang-kadang beberapa tetangga yang paling dekat) untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau upacara-upacara adat lain sekitar titik-titik peralihan pada lingkaran hidup individu (hamil tujuh bulan, kelahiran, melepaskan tali pusat, kontak pertama dari bayi dengan tanah, pemberian

nama, pemotongan rambut untuk pertama kali, pengasahan gigi dan sebagainya). Adat tolong-menolong antara kaum kerabat seperti itu di daerah Karanganyar-Kebumen disebut *njurung*.

3) Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara spontan pada waktu seorang penduduk desa mengalami kematian atau bencana. Adat untuk membantu secara spontan seperti itu, di daerah Karanganyar-Kebumen disebut *tetulung layat*.

Di antara keempat bentuk aktivitas tolong-menolong tersebut di atas, yaitu *sambatan, guyuban, njurung* dan *tetulung layat*, ada suatu perbedaan dalam hal sifat spontanitas yang menjiwai keempat aktivitas itu. *Sambatan* dilakukan dalam suasana yang tidak spontan, melainkan dalam suasana memperhitungkan jasa dan kompensasinya secara tajam dan berazasguna, demikian juga dengan *guyuban*, walaupun suasana spontan dan persaudaraan antara tetangga dekat sudah lebih tampak. Adapun suasana spontan tanpa pamrih yang paling besar tampak dalam peristiwa *tetulung layat*, pada waktu orang membantu orang lain pada peristiwa adanya kematian dan bencana.

KERJA BAKTI

Akhirnya perlu disebut satu aktivitas pengerahan tenaga yang sering juga disebut gotong-royong, ialah pengerahan tenaga tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah. Sistem itu berasal dari zaman kerajaan-kerajaan kuno, di mana rakyat di desa dapat dikerahkan untuk bekerja tanpa bayaran dalam proyek-proyek pembangunan bagi raja, bagi agama, atau bagi kerajaan. Dalam zaman penjajahan sistem kerja bakti itu dipergunakan untuk mengerahkan tenaga bagi proyek-proyek pemerintah kolonial. Dalam zaman kemerdekaan, sistem itu digunakan secara leluasa dalam pembangunan. Di daerah Karanganyar-

Kebumen sistem itu disebut *kerigan*, sedangkan di tempat-tempat lain di Jawa, ada sebutan-sebutan seperti *gugur gunung*, *rodi*, *kompenian* dan lain-lain.

PENUTUP

Bagaimanakah sejarahnya konsep gotong-royong tolong-menolong, yang mula-mula hanya berwujud sebagai suatu sistem pengerahan tenaga tambahan pada masa-masa sibuk dalam produksi bercocok tanam, sebagai sistem tolong-menolong antara tetangga dan kerabat dalam kesibukan-kesibukan sekitar rumah tangga, waktu berpesta, dan pada peristiwa-peristiwa kematian dan bencana, dijadikan satu dengan sistem rodi itu? Rupa-rupanya, sejarahnya mulai waktu Panitya Persiapan Kemerdekaan dalam zaman Jepang, mengangkat konsep itu menjadi suatu unsur yang amat penting dalam rangkaian prinsip-prinsip dasar dari negara kita.

12

APAKAH NILAI GOTONG-ROYONG ITU MENGHAMBAT PEMBANGUNAN?

SUATU pertanyaan penting yang sampai sekarang sering diajukan kepada saya adalah: "Apakah gotong-royong itu sebenarnya?" Jawab yang biasanya saya berikan terhadap pertanyaan tersebut sudah saya tulis dalam karangan yang lalu dalam seri ini. Sebagai lanjutan sering diajukan suatu pertanyaan lain, ialah: "Apakah nilai gotong-royong itu menghambat pembangunan?"

Untuk menjawab pertanyaan itu perlu diidentifikasi dulu dengan tajam konsep "nilai gotong-royong". Nilai yang merupakan latar belakang dari segala aktivitas tolong-menolong antara warga sedesa, yang telah diuraikan dalam tulisan yang lalu dalam seri ini, harus dikelaskan dalam golongan nilai-nilai-budaya yang mengenai masalah dasar MM (hakekat hubungan manusia dengan sesamanya). Dalam sistem nilai-budaya orang Indonesia nilai itu mengandung empat konsep, ialah (1) Manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan alam semesta sekitarnya. Di dalam sistem makrokosmos tersebut ia merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang mahabesar itu. (2) Dengan demikian dalam segala aspek kehidupannya manusia pada hakekatnya tergantung kepada sesamanya. (3) Karena itu ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sama-rata-

sama-rasa, dan (4) selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama-tinggi-sama-rendah.

Tema cara berpikir dalam konsep yang pertama berpangkal kepada alam semesta dan masyarakat besar, dan memperkuat suatu konsep lain ialah konsep *nasib*, yang menjadi amat penting dalam pandangan hidup manusia Indonesia pada umumnya. Tema cara berpikir ini tentu amat kontras dengan tema cara berpikir yang lazim dalam kehidupan orang Eropa Barat dan Amerika misalnya, yang berpangkal kepada individu dan yang seolah-olah melihat keluar untuk menanggapi masyarakat dan alam semesta itu sebagai obyek analisa dari akal manusia. Dalam suatu pandangan hidup seperti itu sudah barang tentu hampir tak akan ada tempat untuk konsep *nasib*. Sebaliknya, tema cara berpikir dalam konsep yang pertama membuat kita lebih mudah menerima penderitaan, kesedihan, kesukaran, bencana dan maut.

Tema pertama bersama dengan tema kedua mengenai sifat ketergantungan kita kepada sesama kita, memberi kepada kita suatu rasa keamanan nurani yang amat dalam dan mantap. Dalam mentalitas kita sering melayang pikiran bahwa kalau kita tertimpa bencana, pasti toh ada sesama kita dalam masyarakat yang akan dapat memberi bantuan. Dalam suatu pandangan hidup seperti itu hampir tak akan ada tempat untuk perasaan terisolasi dan perasaan sebatangkara.

Tema cara berpikir ketiga menjadi nilai-budaya yang boleh dikata telah mendominasi kehidupan kita, orang Indonesia, sampai kepada peri-kelakuan dan perbuatan kita yang kecil-kecil sehari-hari dalam hal hubungan kita dengan sesama kita. Nilai itu merupakan latar belakang dari misalnya sopan-santun kita untuk membagi dengan tetangga dekat apabila kita kebetulan mempunyai sesuatu hasil bumi atau makanan dalam jumlah yang lebih. Nilai itu merupakan latar belakang dari sopan-santun kita untuk memberi oleh-oleh

kepada tetangga apabila kita baru pulang dari suatu perjalanan jauh dan nilai itu menjadi latar belakang dari segala aktivitas tolong-menolong dalam pertanian dan dalam kehidupan antara tetangga atau antar kaum kerabat dalam komunitas para petani kita di desa, seperti apa yang telah saya uraikan dalam karangan yang lalu dalam bunga rampai ini.

Tema ketiga dalam nilai gotong-royong tadi tentu amat baik dan positif sifatnya. Ada orang yang berkata bahwa nilai ini juga mempunyai segi negatifnya karena mencegah kita untuk maju secara ekonomis. Hal itu disebabkan karena segera setelah kita memiliki harta sedikit agak banyak saja daripada tetangga atau kaum kerabat kita, maka terdorong oleh tema sama-rata-sama-rasa, kita segera membagi harta atau keuntungan kita. Mungkin hal itu benar, tetapi asalkan sifat itu dapat kita kendalikan agar tidak menjadi terlampau extrem, maka tak perlulah sifat itu menghambat kemajuan ekonomi kita. Pada hakekatnya semua nilai, semua konsep, dan semua ide manusia, apabila dilaksanakan dengan terlampau extrem akan menjadi negatif dan kurang baik.

Lain daripada itu adalah tema keempat, yang juga amat kuat berakar dalam alam pikiran banyak orang dalam masyarakat kita, terutama yang hidup dalam komunitas kecil seperti desa. Menurut hemat saya, tema inilah yang merupakan satu-satunya unsur negatif dari nilai gotong-royong. Hal itu disebabkan karena konsep sama-tinggi-sama-rendah sebagai suatu kekuatan, mencegah bakat dan keistimewaan dari individu untuk berkembang dan menonjol atas yang lain. "Apakah konsep sama-tinggi-sama-rendah itu bukan suatu konsep yang menjadi landasan dari demokrasi asli Indonesia?" tanya beberapa teman sejawat. Hal itu memang benar, dan berfungsi nyata misalnya dalam komunitas *nagari* di Minangkabau atau daerah-daerah lain di Sumatra dan di seluruh Indonesia di mana kelompok-kelompok kekerabatan yang luas itu (keluar-

ga luas, klen dan sebagainya) merupakan dasar susunan komunitas desa.

Memang demokrasi asli Indonesia di dalam masyarakat desa itu sebenarnya adalah suatu demokrasi yang terbatas fungsi dan ruang-lingkupnya, karena hanya mengenai kehidupan dalam batas-batas struktur kekerabatan. Kalau prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu berfungsi luas dalam masyarakat desa seperti misalnya prinsip-prinsip ikatan *suku* dalam masyarakat *nagari* di Minangkabau, atau prinsip ikatan *marga* dalam masyarakat *kuta* di Batak Toba, atau prinsip-prinsip ikatan *dadia* dalam masyarakat *banjar* di Bali Selatan, maka konsep sama-tinggi-sama-rendah itu memang bisa menggerakkan demokrasi desa dalam banyak lapangan hidup. Sebaliknya, kalau seperti dalam desa-desa di Jawa, prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu tidak mempunyai peranan penting dalam komunitas desa, maka jiwa sama-tinggi-sama-rendah itu ditumpangi dan dimatikan oleh suatu nilai-budaya lain, ialah nilai yang berorientasi vertikal ke atas, ke pembesar-pembesar yang berpangkat tinggi, orang senior dan sebagainya.

Apa yang disebut demokrasi dalam masyarakat pedesaan di Jawa bukan demokrasi yang berdasarkan konsep sama-tinggi-sama-rendah, tetapi mengenai prosedur untuk mengambil keputusan-keputusan dalam rapat-rapat desa (ialah prosedur berapat yang disebut musyawarah).

Saya merasa sudah terlampau panjang melantur mengenai masalah demokrasi asli Indonesia ini, padahal sebenarnya tidak perlu, karena sudah ada suatu studi oleh seorang ahli hukum adat Belanda, B.J. Haga. Hal-hal yang terurai di atas dapat ditemukan secara luas dengan banyak contoh dan data dalam disertasinya, *Indonesische en Indische Democratie* (1924). Saya sekarang akan kembali kepada pertanyaan pangkal dari karangan ini, ialah: "Apakah nilai gotong-royong itu menghambat pembangunan?"

Kalau apa yang dimaksud dengan gotong-royong adalah aktivitas-aktivitas tolong-menolong dan sistem tukar menukar tenaga antara petani dalam produksi bercocok tanam, aktivitas-aktivitas tolong-menolong antara tetangga, atau antara kaum kerabat dalam masyarakat desa kecil (semua itu sudah dibicarakan dalam karangan yang lalu dalam seri ini), maka sudah tentu gotong-royong tak ada banyak sangkut pautnya dengan pembangunan dan karena itu tidak menghambat pembangunan. Kalau kehidupan masyarakat desa sudah menjadi lebih komplex dan kalau para petani sudah tidak merasakan lagi manfaat dari sistem-sistem tolong-menolong seperti tersebut di atas, maka gotong-royong dalam arti tersebut akan menghilang tanpa banyak ketegangan atau pertentangan dari penduduk desa sendiri.

Kalau apa yang dimaksud dengan gotong-royong itu adalah sistem kerja bakti, maka mungkin malahan bisa menunjang pembangunan. Hanya saja soalnya adalah bahwa sistem itu tak sesuai lagi dengan ethik zaman sekarang. Hal itu karena membangun berdasarkan gotong-royong kerja bakti itu, sebenarnya adalah membangun dengan mengexploitasi tenaga murah rakyat (menjadi berbau feodal dan kolonial). Lain halnya kalau rakyat mengerjakan suatu proyek berdasarkan gotong-royong dengan rasa rela karena yakin bahwa proyek itu bermanfaat bagi mereka. Barulah mereka akan melakukan kerja bakti dengan sungguh-sungguh dan bukan kerja rodi.

Kalau yang dimaksud dengan gotong royong itu adalah komplex nilai-budaya yang terdiri dari keempat tema terurai di atas, maka gotong-royong menurut hemat saya tidak menghambat pembangunan kecuali tema kedua, kalau tema itu telampau banyak berkembang kearah suatu mentalitas yang terlampau terorientasi terhadap nasib, dan tema keempat, ialah tema sama-tinggi-sama-rendah tadi. Dengan singkat, apa

yang bisa kita ambil dari gotong-royong untuk pembangunan kita sekarang ini terutama adalah semangatnya.

13

APAKAH ADA NILAI TRADISIONAL YANG BISA MENDORONG PEMBANGUNAN?

SEPERTI apa yang telah kita lihat dalam karangan-karangan yang lain dalam bunga rampai ini, dalam sistem nilai-budaya dari berbagai suku-bangsa dan lapisan sosial dalam masyarakat kita, ada beberapa nilai tradisional yang memang tidak cocok dengan jiwa pembangunan. Misalnya, nilai yang telampau banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh pembesar, atasan dan senior. Nilai itu mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu, seperti kemauan untuk berusaha atas kemampuan sendiri, rasa bertanggung jawab sendiri, rasa disiplin murni. Sifat mentalitas lain yang perlu dirobah adalah nilai yang terlampau terorientasi terhadap nasib. Nilai-nilai seperti tersebut di atas memang harus kita robah.

Kemudian ada sifat-sifat mental yang tak berdasarkan atas sistem nilai-budaya kita yang tradisional, tetapi yang timbul sebagai akibat kekacauan zaman revolusi dan post-revolusi, ialah: hilangnya rasa kepekaan terhadap mutu dan timbulnya "mentalitas menerabas". Sifat-sifat mental seperti itu harus kita robah pula.

Akhirnya masih ada sifat-sifat mental yang kita perlukan untuk mempertinggi kapasitas membangun kita, ialah: nilai yang berorientasi terhadap *achievement* dari karya, nilai yang mementingkan explorasi, sifat hemat, dan jiwa bersaing. Mengenai sifat-sifat mental tersebut terakhir ini, tidak ada masalah merobah nilai-nilai, tetapi mempelajari nilai-nilai baru; jadi bukan soal *afleren* melainkan soal *aanleren*.

Para teman berdiskusi sering menggelengkan kepala dan dengan nada seakan-akan putus asa, ada beberapa yang berkata: "Alangkah banyaknya sifat-sifat mental yang harus kita *afleren* dan *aanleren!*". Kemudian mereka bertanya: "Tak adakah sifat-sifat dalam mentalitas kita yang tradisional yang lebih positif, dan yang justru bisa mendorong usaha kita untuk membangun ini?" jawab saya adalah selalu: "Ada!"

Pertama-tama nilai-budaya kita (dari semua sukubangsa) yang berorientasi vertikal ke arah atasan, yang dalam karangan-karangan yang lalu dalam bunga rampai ini telah saya tanggapi secara negatif, toh ada aspek positifnya. Cara memecahkan kontradiksi itu adalah dengan menanamkan nilai-nilai yang lebih terorientasi terhadap kemampuan sendiri (jadi kurang menanamkan sifat ketergantungan kepada atasan) kepada generasi anak-anak kita, tetapi menarik manfaat dari aspek positif yang ada pada nilai-budaya itu untuk generasi kita (yang sudah terlanjur dijiwai oleh nilai itu). Aspek positif dari nilai-budaya itu adalah bahwa ia dapat memudahkan taktik untuk mengajak rakyat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara memberi contoh. Asalkan banyak pembesar dan pemimpin mau hidup sederhana dan hemat, maka rakyat di bawahnya akan turut hidup sederhana dan hemat; asal saja banyak pembesar dan pemimpin sendiri mau hidup ketat berdisiplin, menaati hukum dan aturan-aturan, maka rakyat di bawahnya akan turut hidup ketat berdisiplin, menaati hukum dan aturan-aturan.

Sebenarnya proses pembangunan Jepang untuk waktu yang lama mempergunakan nilai-budaya yang terorientasi vertikal ke arah atasan itu (yang juga amat kuat dalam mentalitas orang Jepang), untuk menggerakkan rakyat, untuk mendisiplin rakyat, dan untuk memelihara loyalitas mutlak dalam jiwa rakyat Jepang terhadap pekerjaan dan negara. Hanya bedanya dengan di Jepang ialah, bahwa di negara kita tidak ada suatu tokoh kaisar-keramat-keturunan-dewa yang jauh dari pandangan mata rakyat, dan yang bisa dipakai sebagai

titik tujuan dari orientasi. Di dalam masyarakat kita, titik tujuan orientasi adalah manusia-manusia biasa, yang memang berpangkat tinggi, tetapi yang penuh dengan kesalahan-kesalahan duniawiah, yang tampak terang benderang di depan mata rakyat.

Sifat mentalitas lain (dari semua suku-bangsa) yang sebenarnya juga mempunyai aspek positif guna pembangunan adalah adanya nilai-budaya yang memuji sifat "tahan penderitaan". Nilai-budaya ini rupa-rupanya bersumber kepada beberapa nilai dan konsep lain, ialah misalnya: konsep yang beranggapan bahwa hidup itu sudah dari mula-mula harus kita terima sebagai suatu hal yang pada hakekatnya penuh penderitaan, dan bukan sebagai suatu karunia yang penuh kenikmatan. Di satu pihak nilai ini ada juga aspek-aspek negatifnya, karena dalam bentuk extrem-nya akan memberi kesempatan kepada berkembang-nya aliran-aliran kebatinan yang memfokus kepada fungsi menderita untuk kenikmatan rasa menderitanya itu sendiri. Sebaliknya, justru keuletan untuk hidup menderita sekian lama, tetapi toh masih tetap menun-jukkan suatu kesanggupan untuk mengikuti proses gerak hidup masyarakat, merupakan suatu sifat positif yang menguntungkan untuk pembangunan, yang secara tak sadar telah diexploitasi selama ini. Upah dan gaji rendah yang mengkompensasi jasa yang disum-bangkan kepada masyarakat oleh rakyat dan pegawai di negeri kita ini, adalah sebenarnya suatu pengganti bagi sifat hemat, yang masih harus kita pelajari sebagai suatu nilai yang baru itu.

Kecuali itu, ada suatu sifat positif yang lain dalam mentalitas kita (terutama dari suku-bangsa Jawa). Konsepsi itu mewajibkan kepada kita untuk tetap berikhtiyar walaupun hidup itu pada hakekatnya harus dialami sebagai suatu masa ujian yang penuh penderita-an, agar penderitaan hidup itu diperbaiki. Dengan perkataan lain, kita wajib berusaha dalam hidup kita. Sebenarnya konsep *ihtiyar* ini, yang termaktub dalam ajaran-ajaran pujangga-pujangga kita zaman dahulu,

yang masih tercakup dalam berbagai peribahasa kita, kalau digali kembali dan diajarkan kembali kepada anak-anak kita, dapat membantu kita dalam hal mengembangkan sifat-sifat mental seperti: kemauan untuk berusaha atas kemampuan sendiri, rasa tanggung jawab sendiri, dan nilai yang berorientasi terhadap *achievement* dalam karya.

Sifat mental kita yang lain yang bersifat positif adalah (terutama yang berasal dari suku-bangsa Jawa, yang beragama Islam Jawa), untuk bersikap toleran terhadap pendirian-pendirian lain; tentunya selama pendirian lain itu tidak mengganggu sendi-sendi kehidupan kita, maka pendirian lain itu kita biarkan hidup dan kita usahakan untuk tidak memerangi atau membasminya. Suatu sifat mental seperti itu tentu amat penting untuk disebarkan lebih luas di antara generasi anak-anak kita, guna kebahagiaan mereka dalam masa yang akan datang, apabila mereka nanti harus hidup dalam suatu masyarakat majemuk seperti masyarakat bangsa Indonesia ini.

Akhirnya, suatu sifat positif dalam mentalitas kita (dari semua suku-bangsa) adalah konsep yang merupakan salah satu unsur dalam nilai gotong-royong. Unsur itu sebenarnya merupakan suatu tema berpikir: bahwa manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh sistem sosial dari komunitas dan masyarakat sekitarnya, di mana ia merasa dirinya hanya sebagai suatu unsur yang ikut terbawa dalam proses peredarannya. Suatu tema cara berpikir seperti itu, tentu membawa suatu rasa keamanan nurani yang amat dalam dan mantap kepada kita, karena pada latar belakang dari pikiran kita tetap ada bayangan bahwa dalam keadaan malapetaka dan bencana, pasti ada saja yang akan membantu kita, dan bahwa kita tak pernah perlu takut untuk hidup terisolasi sebagai sebatangkara.

Ketika soal terakhir ini didiskusikan, ada beberapa rekan yang menyatakan bahwa suatu sifat mental seperti itu, akan mengurangi kegigihan kita untuk

belajar berusaha berdasarkan kemampuan kita sendiri, dan karena itu lebih bersifat negatif daripada positif. Rekan-rekan yang berpendirian demikian memang benar, tetapi saya tetap berpendirian bahwa nilai tersebut ada aspek positifnya yang perlu kita pelihara, asal saja diadakan pemisahan tajam antara konsepsi "usaha sendiri dalam hal mencapai hasil karya" dan konsepsi "rasa aman karena ada yang membantu dalam bencana". Pada hakekatnya, bangsa Jepang juga dapat berhasil membangun dengan tetap memelihara nilai-nilai gotong-royongnya, malahan dengan mengembangkan beberapa tema berpikir yang khusus dalam nilai-budaya itu, yang menyebabkan bahwa kapasitasnya untuk memelihara solidaritas dengan kelompok yang mutlak amat dipertinggi, dan untuk menyelenggarakan aktivitas kelompok secara spontan.

14

BAGAIMANAKAH CARANYA MEMBINA MENTALITAS PEMBANGUNAN?

PADA beberapa kesempatan telah diajukan kepada saya suatu pertanyaan yang amat penting, ialah: "Bagaimanakah kita bisa membina dan mengembangkan suatu mentalitas yang berjiwa pembangunan itu?" Pertanyaan itu tak mudah bagi saya untuk menjawabnya secara sistematis, karena masalahnya tidak berada dalam bidang keahlian saya. Sebenarnya pertanyaan serupa itu harus dijawab oleh ahli-ahli pendidikan, oleh ahli-ahli komunikasi dan media massa, serta para ahli psikologi massa yang mahir dalam metode-metode persuasi dan kampanye. Walaupun demikian saya toh sering berusaha mengajukan pendirian saya mengenai masalah itu sebagai seorang awam.

Sebenarnya harus kita ingat kembali bahwa mentalitas pembangunan itu, seperti apa yang pernah saya bicarakan dalam salah satu karangan yang lalu dalam seri ini, mewajibkan sebagai syarat suatu nilai-budaya yang berorientasi ke masa depan, suatu sifat hemat, suatu hasrat untuk berexplorasi dan berinovasi, suatu pandangan hidup yang menilai tinggi *achievement* dari karya, suatu nilai-budaya yang kurang berorientasi vertikal, suatu sikap lebih percaya kepada kemampuan sendiri, berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri. Sifat-sifat itu belum secara mantap berada dalam mentalitas dari sebagian besar bangsa kita. Bertambah pula bahwa terutama sesudah zaman revolusi sifat-sifat seperti tak percaya kepada kemampuan sendiri, mengendornya disiplin, dan berku-

rangnya rasa bertanggung jawab, makin menjadi buruk; sedangkan di samping itu timbul sifat-sifat mentalitas lemah lain seperti, menghilangnya rasa kepekaan terhadap mutu, dan "mentalitas menerabas." Jelaslah bahwa banyak yang masih harus kita robah kalau kita hendak mengatasi penyakit-penyakit sosial-budaya yang parah seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi, dan korupsi menyeluruh yang sekarang mengganas dalam masyarakat kita itu. Bagaimana caranya merobah mentalitas lemah itu, dan membina suatu mentalitas yang berjiwa pembangunan? Menurut hemat saya ada empat jalan, ialah: (1) dengan memberi contoh yang baik; (2) dengan memberi perangsang-perangsang yang cocok; (3) dengan persuasi dan penerangan; dan (4) dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil, dalam kalangan keluarga.

Dalam hal memberi contoh yang baik kita bisa memanfaatkan suatu nilai-budaya yang sebenarnya kurang cocok dengan jiwa pembangunan, ialah nilai-budaya yang terlampau berorientasi vertikal ke arah atasan itu, justru sebagai alat untuk merobah beberapa sifat lemah dalam mentalitas kita. Asumsinya ialah bahwa karena banyak orang Indonesia mempunyai suatu mentalitas yang terlampau berorientasi ke arah pembesar-pembesar, maka asal saja orang-orang pembesar itu memberi contoh yang benar, maka banyak orang bawahan akan menurutinya. Dengan contoh dari atas itu dapat dikembangkan misalnya sifat hemat. Dengan contoh dari atas dan pengawasan yang lebih ketat dari atas, dapat dikembangkan kembali misalnya sikap berdisiplin, dan keberanian untuk bertanggung jawab sendiri.

Jawab itu tentu segera akan menimbulkan pertanyaan lain, yaitu: "Tetapi bagaimanakah para pembesar dan tokoh-tokoh berpangkat tinggi akan bisa memberi contoh untuk hidup hemat, untuk hidup berdisiplin, dan untuk berani bertanggung jawab sendiri, kalau mereka sendiri tidak hidup hemat, tidak berdisiplin,

dan sering mencoba menghindari tanggung jawab?" Pertanyaan itu tentu tidak bisa saya jawab, dan saya juga tidak merasa bahwa saya harus menjawabnya. Kalau demikian, kalau dengan jalan "contoh-dari-atas" harapan akan berhasilnya hanya sedikit, baiklah kita coba jalan lain, ialah misalnya jalan "memberi perangsang yang cocok".

Dalam hal itu saya sendiri tidak bisa memberi contoh-contoh yang konkret, karena masalahnya menyangkut suatu lapangan masalah motivasi dan untuk mencapai suatu pengertian mengenai motivasi yang bisa menggerakkan beraneka warna orang Indonesia itu supaya bersikap begini atau berbuat begitu, memang masih amat banyak penelitian yang perlu dilakukan. Walaupun demikian, toh ada hal-hal yang jelas untuk disebut sebagai contoh. Misalnya, perangsang yang bisa mendorong orang menjadi lebih berhasrat untuk menabung uangnya di bank, adalah tentunya bunga yang menarik. Namun bagi orang Indonesia, walaupun perangsang seperti itu penting, toh perlu ada perangsang lain, ialah pelayanan yang baik.

Saya pernah melakukan penelitian mengenai biaya hidup rumah tangga petani di daerah Pasar Rebo sebelah selatan Jakarta. Di desa-desa di situ terdapat plakat-plakat Tabanas yang besar, yang menganjurkan rakyat petani untuk menabung di bank. namun sedikit sekali petani di daerah Pasar Rebo yang pergi ke bank untuk menabung. Padahal sebagai petani buah mereka cukup makmur dan mampu untuk menabung, dan saya yakin bahwa mereka itu tidak bodoh, dan sungguh mengerti mekanisme dan manfaat dari bunga tinggi yang dapat mereka peroleh dari menabung pada Tabanas itu. Kalau demikian, maka apakah sebenarnya soalnya? Terbukti tak lain daripada rasa segan dan sungkan dari para petani untuk menghadapi pegawai bank yang bertahta di kantornya itu, yang bersikap dan bermentalitas pegawai yang merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat petani kecil, sedangkan sebenarnya pegawai

tadi harus bersedia bersikap melayani rakyat yang datang ke bank itu sebagai langganan dan tidak sebagai pihak yang datang seolah-olah untuk minta-minta.

Persuasi dan penerangan merupakan jalan lain yang sebenarnya harus diintensifkan oleh para ahli penerangan dan ahli media massa. Sekarang mungkin sudah tiba waktunya untuk meningkatkan pelaksanaan dari suatu kampanye pembangunan. Dalam hal itu tidak terutama poster-poster besar dengan slogan-slogan kosong tentang pembangunan yang harus diperbanyak, tetapi misalnya kemampuan persuasi dari pihak agama. Jangan salah tangkap, dan mengira bahwa saya mau mempergunakan agama untuk berpropaganda! Samasekali tidak; tetapi saya yakin bahwa di dalam semua agama ada ajaran-ajaran yang menganjurkan manusia untuk bekerja keras, hidup hemat dan sederhana, hidup berdisiplin dan bertanggung jawab. Tidakkah mungkin untuk mengadakan suatu usaha untuk mengumpulkan ajaran-ajaran serupa itu ke dalam suatu buku pedoman untuk khotbah? Kemudian tidakkah mungkin untuk mengadakan suatu anjuran, dalam rangka suatu kampanye pembangunan yang menyeluruh, agar para pemuka agama dari semua agama yang ada di Indonesia, benar-benar mempergunakan anjuran-anjuran tadi dalam khotbah-khotbah mereka. Cara-cara persuasi dan penerangan lain memang harus dipikirkan oleh ahli penerangan yang mempunyai imajinasi yang besar.

Akhirnya masih ada lagi suatu jalan keempat, tidak untuk merobah mentalitas yang lemah, tetapi untuk menanamkan suatu mentalitas pembangunan yang baru. Hal itu tentu hanya mungkin pada generasi yang baru. Anak-anak kita harus diasuh dan dibina dengan sadar dan sengaja, agar nanti 15 tahun lagi mereka akan menjadi manusia Indonesia baru yang bangga akan usaha dan kemampuannya sendiri, yang mempunyai suatu *achievement orientation* yang tinggi, yang mempunyai suatu rasa disiplin yang murni, yang berani

bertanggung jawab sendiri, dan yang mempunyai suatu perasaan peka terhadap mutu. Bagaimana caranya menanamkan sifat-sifat mentalitas itu, adalah tugas seorang ahli pendidikan, tetapi yang jelas adalah bahwa sifat-sifat itu tidak hanya selalu harus diajarkan kepada para pelajar di sekolah, tetapi malahan jauh lebih dahulu daripada itu, ialah dalam periode pengasuhan dan pembinaan daripada anak-anak pada usia yang masih amat muda, dalam lingkungan keluarga.

Sungguhpun saya tidak tahu cara untuk merobah prinsip-prinsip pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga, agar pada mereka dapat dibina sifat terurai di atas, saya dapat menyebut satu cara, hanya sebagai contoh saja, ialah kebutuhan dan kebiasaan anak-anak untuk banyak membaca di luar sekolah. Di situlah dapat diusahakan agar ada tema-tema tertentu yang dapat menunjang berkembangnya dalam jiwa anak-anak kita sifat terurai di atas. Suatu penelitian mengenai sejarah kesusasteraan Inggeris telah membuktikan bahwa perkembangan ekonomi Inggeris dan peningkatan kemakmuran masyarakat Inggeris dalam pertengahan abad ke-18 itu diawali suatu periode selama beberapa dasawarsa di mana kesusasteraan, bacaan rakyat, dan ceritera-ceritera rakyat Inggeris itu diisi oleh tema-tema yang berorientasi terhadap *achievement* yang tinggi (bacalah karangan: N.M. Bradburn, D.E. Berlew. "Need for Achievement and English Industrial Growth" dalam *Economic Development and Culture Change*, X. 1961 : hlm. 8-20).

Tentu masih akan timbul pertanyaan lain lagi, ialah: "Apakah kita baru bisa mulai membangun kalau mentalitas dari suatu bagian besar dari rakyat Indonesia itu sudah berjiwa pembangunan?" Jawabnya mudah: Kita tidak usah menunggu, dan harus mulai membangun dengan penuh kegigihan. Beberapa sifat mentalitas yang lemah itu pasti akan terseret ikut terbangun, tetapi toh saya yakin bahwa kita tak dapat menunggu pasif sampai sifat-sifat mentalitas dan jiwa pembangunan itu akan timbul dan tumbuh sendiri. Usaha untuk

merobah dan membina mentalitas baru harus dijalankan simultan dengan usaha pembangunan itu sendiri, sehingga menjadi suatu usaha penunjang pembangunan yang penting.

15

APAKAH ARTINYA PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMBANGUNAN?

AKHIR-AKHIR ini sering terdengar anjuran dari pihak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, agar diusahakan supaya rakyat berpartisipasi dalam pembangunan. Namun di berbagai propinsi (tidak semuanya) dan terutama di daerah administratif di bawah propinsi, sering masih belum ada pengertian yang jelas mengenai konsep "partisipasi rakyat dalam pembangunan" itu. Seringkali "partisipasi rakyat yang intensif" disamakan dengan frekuensi tinggi turut sertanya rakyat pedesaan dalam aktivitas-aktivitas bersama. Dalam hal itu maka fokus diletakkan pada frekuensi mengadakan pengarahan aktivitas bersama itu, dengan kurang menilai mutu kerjanya serta relevansinya dalam rangka kebijaksanaan yang menjadi pedoman pembangunan.

Partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, ialah: (1) Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus; (2) Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Dalam tipe partisipasi yang pertama, rakyat pedesaan diajak, dipersuasi, diperintahkan atau dipaksa oleh wakil-wakil dari beraneka warna Departemen atau oleh Pamong Desa, untuk berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek-proyek pembangunan yang khusus, yang biasanya bersifat fisik. Kalau rakyat ikut serta berdasarkan atas keyakin-

annya bahwa proyeknya itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar, tanpa mengharapkan upah tinggi. Sebaliknya, kalau mereka diperintah dan dipaksa oleh atasan mereka untuk ikut menyumbangkan tenaga atau harta mereka kepada proyeknya tadi, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat kerja rodi. Contoh-contoh dari tipe partisipasi seperti terurai di atas adalah misalnya: partisipasi orang desa dalam proyek mengeraskan atau melebarkan jalan desa, dalam membuat saluran irigasi, dalam membuat jembatan desa, dalam proyek penghijauan, dalam kursus buta huruf, dan sebagainya.

Dalam tipe partisipasi yang kedua tidak ada proyek aktivitas bersama yang khusus, tetapi ada proyek-proyek pembangunan, biasanya yang tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan suatu partisipasi rakyat atas perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi selalu atas dasar kemauan mereka sendiri. Contoh dari tipe partisipasi seperti terurai dalam alinea ini adalah misalnya: partisipasi dalam Bimas, menjadi akseptor keluarga berencana, menabung uang di Tabanas dan sebagainya.

Karyawan dan petugas yang harus menginstruksi rakyat di pedesaan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek aktivitas bersama (partisipasi tipe pertama) biasanya tidak dapat melampaui pamong desa dan pimpinan desa yang resmi. Dalam zaman kolonial dulu struktur pemerintahan adalah sedemikian rupa, sehingga segala instruksi dari atas itu harus disalurkan melalui garis hierarki pamongpraja (dulu namanya pangreh praja). Memang dalam zaman kolonial belum banyak jawatan yang turun ke bawah sampai ke desa, sehingga usaha koordinasi dari instruksi-instruksi kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah masih bisa dikuasai oleh pamong praja. Sekarang jumlah departemen-departemen, direktorat-direktorat jenderal, direktorat-direktorat, dinas-dinas ABRI, bahkan kadang-kadang biro-biro,

yang mempunyai ujung-ujung jarinya dalam masyarakat pedesaan dan ingin ikut serta menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sudah terlampau banyak. Demikian usaha koordinasi dari semua instruksi dari atas itu menjadi amat sulit untuk dikuasai oleh pamong praja. Walaupun demikian, sampai sekarang jalan yang terbaik untuk menginstruksikan (bukan memaksa) rakyat pedesaan untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek yang bersifat aktivitas-aktivitas bersama, masih tetap melalui saluran pamong praja.

Karyawan dan petugas yang harus mengajak, mempersuasi, dan menginstruksikan rakyat pedesaan itu untuk ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan sebagai individu (partisipasi tipe kedua), menghadapi masalah yang jauh lebih rumit. Karena partisipasi rakyat itu berdasarkan suatu keputusan mereka sendiri sebagai individu, maka hanya perintah dari lurah atau camat saja tidak cukup. Keputusan seorang warga desa untuk menjadi akseptor dalam keluarga berencana misalnya, tidak bisa hanya berdasarkan atas perintah lurah atau camat, melainkan atas suatu keyakinan yang mendalam bahwa partisipasinya itu sungguh bermanfaat, pertama untuk dirinya sendiri dan keluarganya dan kemudian untuk masyarakat dan negara. Hal itu hanya bisa dicapai dengan suatu proses persuasi dan penerangan yang intensif dan lama.

Ada beberapa ahli ilmu sosial yang berpendirian bahwa berhasilnya persuasi dan penerangan kepada rakyat pedesaan itu toh tak akan menjamin bahwa rakyat pedesaan akan ikut serta berpartisipasi (tipe kedua), tanpa adanya restu dari lurah atau pihak atasan. Sekali lagi di sini muncul nilai-budaya yang terlampau berorientasi vertikal ke arah atasan, yang telah berapa kali saya sebut dalam karangan-karangan terdahulu dalam seri ini, dan yang akan menghambat suatu keputusan progresif dari rakyat pedesaan. Menurut hemat saya peranan menghambat dari pihak lurah di

sini terlampau dibesar-besarkan. Memang saya bisa mengerti adanya lurah-lurah atau pamong desa yang merasa tersinggung kalau mereka tidak diikut sertakan, dan karena itu dengan mentalitas pegawainya ingin menyabot perkembangan ide-ide baru yang dikembangkan pihak lain, dengan alasan kesalahan prosedur dan protokol. Soal itu dengan begitu hanya merupakan soal sopan-santun saja dan kesukaran-kesukaran yang timbul karena sabotase dari pihak pegawai-pegawai desa, bisa dihindari dengan mengikut-sertakan mereka dalam permasalahannya.

16

APAKAH SEBENARNYA TUJUAN PEMBANGUNAN KITA?

BANYAK orang kini menanyakan soal itu, tetapi sukar mendapatkan jawabnya. Karena sibuknya kita membangun memang soal yang mahapenting itu sekarang, malah belum sempat kita pikirkan dengan mendalam. Sudah tentu sebagai individu yang menjadi anggota suatu golongan masyarakat atau warga suatu suku-bangsa tertentu, dengan gaya hidup, struktur masyarakat dan latar belakang kebudayaan yang khas, banyak di antara kita masing-masing sudah mempunyai bayangan dan cita-cita kita sendiri-sendiri mengenai soal apa dan bagaimana masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu. Namun, konsep konkret untuk tujuan kita semua secara nasional sebenarnya belum ada.

Memang jalan yang kita tempuh sekarang sudah baik. Keadaan negara kita sudah terlampau parah, ekonomi sudah terlampau berantakan, rakyat sudah terlampau menderita, maka pokoknya kita mulai saja menstabilisasi dan membangun dahulu, soal perumusan tujuan secara saksama itu adalah soal nanti. Sambil berjalan kita mencari pengalaman, belajar dan mencontoh dari proses-proses pembangunan di negara-negara lain yang sedang berkembang di sekeliling kita. Sambil membangun tiap kali kita mawas diri dan selalu sanggup mengadakan koreksi-koreksi bilamana perlu.

BELAJAR DARI KESALAHAN BANGSA - BANGSA LAIN

Kita memang belum mempunyai konsepsi nasional yang jelas mengenai masyarakat seperti apa yang ingin

kita tuju dengan usaha pembangunan kita (kecuali bahwa kita semua ingin menjadi agak lebih makmur dan ingin agar demokrasi kita menjadi lebih sempurna; suatu kehidupan nasional yang lebih sempurna yang dapat memberi akomodasi kepada aneka-warna kebudayan bangsa kita; dan bahwa kita dapat menghasilkan lebih banyak karya yang bisa kita banggakan sebagai bangsa).

Kita juga tidak bisa mengambil alih mentah-mentah contoh pembangunan dari Amerika, Uni Soviet, RRC, Jepang ataupun Brasilia (yang kini katanya termasuk salah satu negara yang tumbuh dengan laju yang paling cepat di dunia, yaitu lebih dari 10% dari GNP-nya), karena semua negara tersebut mempunyai beberapa sifat dasar yang berbeda dengan kita.

Kalau demikian, maka guna memberi sedikit pengarahan kepada pembangunan kita, sambil mulai mengembangkan suatu konsepsi yang jelas mengenai tujuan dari usaha itu, kita harus mencoba memahami akibat-akibat serta aspek-aspek negatif dan bahaya dari kemakmuran serta demokrasi yang terlampau extrem. Dengan mempelajari gejala-gejala itu di negara-negara yang telah membangun lebih dahulu daripada kita, kita sejak-awal sudah dapat mencoba menghindarinya. Akibat-akibat dan bahaya itu menurut pandangan saya sendiri adalah: (1) individualisme extrem serta isolasi individu; (2) keretakan prinsip-prinsip kekeluargaan; (3) hilangnya nilai-nilai hidup rohaniah yang mempertinggi mutu hidup; (4) penggunaan kelebihan harta dan waktu luang yang tak wajar; dan (5) polusi dan pencemaran lingkungan hidup.

INDIVIDUALISME EXTREM SERTA ISOLASI INDIVIDU

Penilaian tinggi terhadap mutu dan karya individu adalah suatu hal yang amat penting dalam tiap proses pembangunan; tidak hanya dalam proses pembangunan negara Eropa Barat dalam abad ke-16, di mana individu yang berjasa diganjari oleh agama dan

etik Protestan, tetapi juga di negara-negara komunis masakini, di mana para manajer, sarjana, cendekiawan, dan seniman yang berjasa terhadap partai dan negara diberi ganjaran besar sebagai individu. Sejarah memang telah membuktikan bahwa pembangunan yang sebenarnya hanyalah berhasil berdasarkan atas hasil inovasi individu, dan bukan gerakan massa.

Demikian kita juga bisa mengerti bahwa demokrasi itu akan menjadi lebih matang apabila pendirian individu itu mulai dirasakan dan dinilai oleh umum sebagai suatu hal yang penting. Demikian pula kita bisa membayangkan bahwa penegakan hukum itu bisa lebih lancar apabila individu mau dan mampu menuntut hak-haknya.

Walaupun demikian, kita ngeri juga melihat adanya ekses-ekses di negara-negara yang telah maju, yang mungkin timbul karena individualisme yang terlampau extrem. Hak milik individu didewa-dewakan, nilai kemesraan hubungan antar-individu menjadi tak penting, rasa keamanan yang murni dalam hidup hilang, dan hidup individu dalam segala aspeknya menjadi tergantung kepada perusahaan-perusahaan asuransi.

Dilema kita adalah bahwa memang ada beberapa sifat dari nilai individualisme yang mutlak perlu untuk membangun, tetapi bahwa nilai-nilai gotong-royong kadang-kadang menghambat pembangunan. Namun kita juga tidak mau begitu saja membuang jauh nilai-nilai gotong-royong yang kita miliki itu. Soal keselarasan antara kedua nilai itulah yang merupakan soal yang masih harus kita pikirkan dan cari bersama. (Adapun nilai orientasi vertikal ke arah tokoh-tokoh berpangkat tinggi, orang-orang senior dan orang tua, yang juga merupakan unsur penting dalam mentalitas kita, juga merupakan unsur penting dalam mentalitas kita, sebaiknya kita buang saja).

Individualisme yang extrem seperti apa yang kita lihat dalam masyarakat negara-negara yang telah maju

(terutama dalam pendidikan anak-anak), juga menimbulkan pandangan hidup yang berpendirian bahwa: ".....hidup ini milik individu, karena itu dia sendirilah yang berhak menentukan dan berbuat dengan hidupnya itu menurut kemauannya sendiri." Kita bisa membayangkan bagaimana suatu pandangan hidup seperti itu bisa mengisolasikan individu dari lingkungan sosialnya, dan bagaimana individu akan kehilangan tempat berlindung apabila ia sedang dikejar oleh masalah-masalah yang menekan jiwanya. Ngeri juga membayangkan hidup sebagai sebatang kara. Memang akibat pembangunan seperti inilah yang sejak semula harus kita jaga, agar jangan sampai terjadi dalam masyarakat kita.

KERETAKAN PRINSIP IKATAN KEKELUARGAAN

Apalagi kalau prinsip ikatan kekeluargaan kita sampai retak, tak ada malapetaka yang lebih besar yang bisa kita bayangkan. Namun usaha berlebih-lebihan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang cepat rupa-rupanya dengan mudah akan mendatangkan keretakan keluarga itu. Sistem komunisme malahan dengan sengaja berusaha menghancurkan sistem keluarga, demi kemajuan ekonomi. Toh ada contoh dari suatu masyarakat yang bisa membangun cepat tanpa meretakkan sendi-sendi hubungan kekeluargaan, ialah masyarakat Jepang. Bangsa itu berhasil membangun cepat dengan sistem keluarganya yang tetap utuh untuk waktu yang lama. Hanya sejak kira-kira satu-dua dasawarsa terakhir ini kehidupan keluarga Jepang juga mengalami keretakan, tetapi hal itu disebabkan karena bangsa Jepang menjadi buta karena suksesnya yang luar biasa dalam membangun ekonominya, sehingga tak bisa mengendali diri lagi, meninggalkan sifat-sifat kemanusiaan, dan menjadi "binatang ekonomi." Dari proses itu kita sekarang bisa belajar, agar tetap sadar akan titik di mana kita harus berhenti.

HILANGNYA NILAI-NILAI HIDUP ROHANIAH

Orang Jepang dapat mempertahankan prinsip-prinsip ikatan kekeluargaannya, mungkin karena kehidupan kekeluargaan di Jepang erat bersangkutan dengan agama Shinto, dan karena agama Shinto justru dipakai sebagai salah satu tenaga penggerak yang penting dalam pembangunan Jepang dalam abad ke-19 (lihat tentang hal itu bab yang ditulis oleh Josefa M. Saniel dalam buku P.N. Bellah, *Religion and Progress in Modern Asia*, 1965: hlm. 124-149). Di Eropa Barat abad ke-16 agama Protestan dengan ajaran-ajarannya juga menyokong usaha pembangunan di beberapa negara di sana, tetapi pada waktu kemakmuran tercapai serta kebutuhan akan kehidupan serba-komfort dan kenikmatan jasmaniah meningkat tanpa batasnya, maka tekanan intensitas usaha untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan tadi mendesak perhatian manusia terhadap nilai-nilai keindahan dan nilai-nilai rohaniah yang memberi arti dan mutu dalam hidup. Walaupun dengan kemakmurannya manusia di negara-negara maju dapat membeli keindahan dan unsur-unsur kehidupan rohaniah sekali pun, manusia tetap toh tidak akan dapat menikmatinya apabila dalam jiwanya ia tak dapat menemukan keselarasan antara komfort dan kehidupan rohaniah itu. Menjaga agar keselarasan yang melandasi hidup bermutu itu tidak pecah itulah yang sejak awal harus menjadi perhatian kita.

KELEBIHAN KEMAKMURAN DAN LUANG WAKTU

Kemakmuran yang berlebihan juga membawa luang waktu yang berlebihan, dan bagi manusia soal penggunaan kelebihan-kelebihan itu secara wajar agaknya merupakan soal. Kalau kemakmuran masih dalam taraf perkembangan, manusia sering masih bisa sadar dan menginvestasikan kelebihan hartanya itu untuk bisa menjadi lebih makmur lagi. Ia juga

mempergunakan kelebihan waktunya untuk bekerja lebih lama untuk bisa memperbesar hasil produksinya, dan dengan demikian juga menjadi lebih makmur lagi.

Kalau kemakmuran sudah tiba, biasanya manusia tak bisa menyadari batas dari kebutuhannya yang meningkat secara tak wajar. Terdorong oleh rasa bersaing untuk meninggikan gengsi, maka kalau mereka sampai pada batas jumlah dan frekuensi dari kemewahan, dari rumah, perabot, perhiasan, kendaraan dan pesta-pesta, maka ia akan mencari penonjolan gengsinya dalam sifat keanehan dari rumah, perabot, perhiasan, kendaraan, dan pesta-pesta itu. Kelebihan luang waktu akan bersifat lebih berbahaya lagi; apalagi kalau hal itu bersamaan dengan rasa kekosongan hidup akibat isolasi individu, atau akibat tak-adanya keselarasan hidup, mutu hidup, dan arti hidup.

Mulai sekarang ini kita juga sudah harus menjaga jangan sampai timbul bahaya-bahaya tersebut, karena gejala-gejala tersebut bisa timbul sekonyong-konyong; tanpa kita sadari sudah ada di tengah-tengah kita. Sekarang saja meskipun kita samasekali belum bisa digolongkan bangsa setengah makmur toh sudah ada individu-individu di Jakarta yang tak mampu mempergunakan surplus kemakmurannya secara wajar dan berarti. Memang masyarakat Jakarta kadang-kadang sudah dapat kita pakai sebagai contoh yang konkret dan nyata dari apa yang dapat kita harapkan kalau kemakmuran yang mendadak tiba itu tidak kita kendalikan.

POLUSI

Masalah polusi dan pencemaran lingkungan hidup bukan lapangan keahlian saya, walaupun memang akhir-akhir ini banyak ahli antropologi yang tertarik akan masalah-masalah ekologi. Soal polusi yang sekarang menjadi bidang khusus dari para ahli biologi, ahli geografi, ahli kimia dll., hanya disebut di sini

sekedar untuk melengkapi daftar dari berbagai akibat negatif dari ekses-ekses pembangunan yang tak dikendalikan.

17

APAKAH KITA BISA MENIRU POLA PEMBANGUNAN JEPANG ?

PERTANYAAN yang sampai sekarang masih juga sering dilancarkan orang, sebenarnya berdasarkan logika bahwa orang Jepang seperti halnya orang Indonesia, juga merupakan suatu bangsa Asia yang tidak beragama Kristen Protestan. Karena itu bangsa Jepang tentu kurang-lebih sama sifatnya dengan bangsa kita. Ditambah pula, masyarakat Jepang juga menilai tinggi nilai-budaya, gotong-royong, dan mereka pada umumnya — seperti kita juga — mempunyai suatu mentalitas yang berorientasi vertikal ke arah atasan, ke arah orang-orang senior dan orang-orang berpangkat tinggi. Dengan sendirinya banyak orang mengira bahwa cara-cara yang telah dipergunakan orang Jepang untuk membangun ekonominya dapat kita tiru.

Dalam kenyataan, perbandingannya tidak semudah itu, dan saya berpendirian bahwa kita tidak bisa meniru contoh Jepang. Hal itu disebabkan karena orang Jepang mulai membangun ekonominya sudah 100 tahun yang lalu, dalam suatu keadaan dunia yang sangat berbeda daripada sekarang dan di mana kesempatan dan ruang-gerak untuk pembangunan masih sangat terbuka. Memang, dalam usaha ekonomi pada umumnya, faktor kesempatan adalah sangat penting untuk dapat maju. Namun, di samping faktor kesempatan, kebudayaan Jepang mempunyai beberapa sifat yang tidak ada dalam kebudayaan Indonesia, sedangkan suatu persentase besar orang

Jepang mempunyai sifat-sifat yang jelas tidak atau belum dimiliki oleh suatu persentase besar orang Indonesia. Sifat-sifat itu adalah: (1) Keseragaman yang amat besar dari kebudayaan Jepang; (2) pendorong psikologis yang memberi motivasi kepada orang Jepang untuk membangun satu abad yang lalu; (3) kesiap-siagaan mental orang Jepang pada saat pembangunan dimulai, terutama karena sifat hemat mereka; (4) sistem hukum adat waris dalam masyarakat Jepang yang amat cocok untuk memecahkan masalah tenaga kerja pada permulaan pembangunan; (5) agama Shinto yang amat mendorong kegiatan manusia dalam dunia yang fana ini amat cocok untuk pembangunan.

KESERAGAMAN KEBUDAYAAN JEPANG

Berbeda sekali dengan kebudayaan Indonesia yang terdiri dari banyak kebudayaan suku-suku-bangsa yang amat berbeda satu dengan lain, yang mengenal banyak agama yang berbeda-beda, yang mengenal banyak bahasa dan logat yang saling tak dapat atau sukar difahami oleh orang yang tidak memakainya, maka kebudayaan, agama dan bahasa Jepang adalah seragam dan difahami oleh semua orang Jepang di mana pun mereka tinggal atau berada (tentu ada beberapa terkecualian). Walaupun kita sering justru sangat bangga akan sifat keaneka-warnaan kebudayaan bangsa kita, kita bisa membayangkan bahwa sifat keseragaman kebudayaan akan lebih memudahkan nyusunan rencana dan kebijaksanaan yang seragam, dan sangat memudahkan komunikasi. Kecuali itu, suatu bangsa yang seragam kebudayaannya lebih dapat mengembangkan suatu tujuan nasional yang satu; sebaliknya, suatu bangsa dengan suatu tujuan nasional yang seragam dan jelas juga lebih mudah untuk dikembangkan identitasnya, dan identitas jelas memudahkan pengembangan motivasi yang perlu untuk mendorong dan memberi semangat kepada usaha jerih payahnya dalam membangun itu.

PENDORONG PSIKOLOGIS UNTUK MEMBANGUN

Kita tidak pernah mendapat suatu pendorong psikologis untuk membangun seperti orang Jepang. Pendorong psikologis yang amat kuat itu adalah rasa takut akan ancaman penjajahan yang mulai pertengahan abad ke-19 makin mendekati wilayah Jepang.

Terdorong oleh rasa takut itu para pemimpin Jepang dari golongan Meiji yang dalam tahun 1867 berhasil mengambil kekuasaan dari Tokugawa itu, dengan gigih dan amat cepat bermaksud membangun suatu kesatuan politik yang sangat kuat, yang apabila perlu dapat melawan kekuatan-kekuatan kolonial Barat dengan senjatanya sendiri, yaitu ekonomi yang kuat dan teknologi yang maju.

Para ahli psikologi bisa menerangkan kepada kita betapa besarnya kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh manusia yang dihinggapi ketakutan karena perasaan terancam itu. Bangsa kita pernah mendapat kesempatan untuk merasakan takut karena terancam, yaitu pada waktu zaman revolusi fisik; tetapi pada saat revolusi itu selesai maka hilang juga rasa terancam itu. Kita mengendorkan diri, merasa relax, memproduksi banyak anak (dalam dasawarsa 1950-1960 laju kenaikan penduduk Indonesia melonjak menjadi 22,9%, dibandingkan dengan hanya 8,8% dalam dasawarsa 1940-1950; lihat publikasi PBB, *Population Studies*, No. 41, 1961: hlm. 145), dan hilang pula semangat kita untuk bekerja keras dan gigih. Usaha untuk memperpanjang suasana revolusi memang telah dicoba, tetapi dengan tiadanya rasa takut karena terancam itu, maka hasil dari usaha tersebut malahan lebih merusak keadaan.

KESIAP-SIAGAAN BANGSA JEPANG DALAM MEMBANGUN

Menurut pada ahli (seperti misalnya K. Okhawa dan H. Rosovsky dalam buku: *Japanese Economic Growth:*

Trend Acceleration in the Twentieth Century, Standford University Press, 1970), pada waktu para pemimpin Meiji mulai dengan pembangunan mereka dalam tahun 1868, rakyat Jepang secara mental sudah jauh lebih siap untuk membangun jika dibandingkan dengan kita, ketika kita mulai membangun hampir tepat seratus tahun kemudian (tahun 1969). Mungkin jumlah sarjana yang bermutu, terutama dalam bidang teknologi, yang mendapat pendidikan mereka di universitas-universitas di Eropa waktu itu tidak jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah sarjana kita yang serupa dalam tahun 1969; tetapi yang jelas adalah bahwa rakyat Jepang dalam tahun 1868, bukan suatu rakyat yang masih 70% buta-huruf seperti rakyat kita. Dengan memakai adat lama dan agama Shinto serta kepercayaan terhadap tokoh Kaisar-Keturunan-Dewa yang keramat sebagai alat-alat untuk mempertebal motivasi untuk berbakti, loyalitas terhadap negara, serta disiplin terhadap pimpinan, para pemimpin Meiji berhasil menimbulkan suatu suasana membangun yang penuh semangat. Lebih-lebih, bangsa Jepang pada waktu itu merupakan suatu bangsa yang pada dasarnya sudah biasa untuk hidup sederhana dan hemat.

SIFAT HEMAT ORANG JEPANG

Lihat karangan no. 19 yang mengenai sifat hemat orang Jepang.

SISTEM HUKUM ADAT WARIS TANAH DALAM KEBUDAYAAN JEPANG

Hukum adat waris tanah dalam kebudayaan Jepang bersifat patrilineal-primogenitur, artinya seluruh harta pusaka tanah, rumah dan pekarangan serta perabot rumah diwariskan kepada anak laki-laki yang tertua. Demikian harta pusaka tanah tidak pecah terbagi-bagi.

Anak laki-laki lainnya tidak mendapat warisan harta pusaka, dan apabila mereka tinggal di desa sebagai petani, mereka hanya menggarap tanah pusaka yang dikuasai oleh kakak mereka. Tentu kadang-kadang mereka bisa juga membeli atau mendapat tanah sendiri, dan menjadi petani sendiri, bebas dari otorita kakaknya, tetapi sebagian besar lebih suka meninggalkan desa, mengabdi kepada seorang samurai, menjadi penyakap pada seorang tuan tanah, atau menjadi buruh tani bayaran, jauh dari desa mereka sendiri.

Ketika bangsa Jepang mulai membangun industrinya, penduduknya belum mengalami suatu explosi seperti di Jawa. Maka untung sekali bagi mereka, sejajar dengan kenaikan penduduk, industri yang sedang berkembang itu dapat menyerap pria-pria dari desa yang tidak mempunyai tanah itu. Sebaliknya, inti penduduk desa adalah pria-pria anak tertua penguasa harta pusaka yang tidak terpecah-belah, tetapi yang sebaliknya malahan bertambah secara kumulatif. Mereka itu tetap tinggal di desa dan karena itu di tiap desa itu ada suatu golongan warga inti yang mantap, yang mempunyai rasa tanggung jawab yang maximal terhadap tanah pusaka yang keramat itu, dan yang merasakan suatu loyalitas yang besar terhadap komunitasnya.

Kecuali mantap karena suatu mobilitas yang minimal dari suatu golongan inti penduduk desa, yang disebabkan karena unsur dasar dalam struktur sosialnya tadi, jumlah penduduk desa juga mantap sepanjang masa karena penyerapan tadi. Kenaikan penduduk Jepang berlangsung lambat (hanya lebih dari 1%), dan baru melonjak setelah Perang Dunia Ke-II, yang kemudian turun lagi sejak kira-kira sepuluh tahun terakhir ini (kira-kira 0,7%). Sebaliknya, penyerapan makin lama makin deras. Sekarang jumlah orang Jepang yang bekerja dalam lapangan pertanian dikabarkan berkurang dengan laju 1,5% setahun.

Keadaan desa-desa di Jawa, seperti kita ketahui, dalam semua hal tersebut di atas justru sebaliknya. Tanah pusaka terbagi-bagi dan terpecah-belah menurut hukum adat waris yang berdasarkan prinsip bilateral itu, kepada semua anak dalam suatu keluarga. Demikian tidak ada suatu golongan penduduk inti dalam desa-desa di Jawa yang mantap sifatnya, dan yang dengan rasa tanggung jawab yang telah mendarah daging menggarap tanah pusaka nenek-moyang yang keramat. Sudah tentu desa-desa di Jawa mempunyai suatu golongan penduduk yang merasakan diri keturunan dari penduduk inti dari desa, yaitu para *cakal bakal*. Tetapi golongan ini biasanya hanya membanggakan kedudukannya saja, sebagai suatu lapisan sosial yang terpandang dalam desa, dan tidak terikat oleh suatu sentimen sosial karena ikatan komunitas seperti di Jepang.

AGAMA SHINTO DAN PEMBANGUNAN

Dalam buku tentang agama Jepang yang amat baik, yang dalam terjemahannya dalam bahasa Inggeris berjudul *Japanese Religion*, tulisan beberapa ahli kebudayaan Jepang (H. Ichiro, I. Fujio, W.Tsuneya dan Y. Keiichi), dinyatakan bahwa di Jepang ada beberapa agama, tetapi yang paling dominan dalam kehidupan sebagian besar orang Jepang ada dua, ialah agama Shinto dan agama Buddha. Kedua agama tersebut tidak hanya berdampingan, melainkan juga saling terjalin erat dalam kehidupan banyak orang Jepang. Agama Shinto adalah agama Jepang yang asli, yang mengandung berbagai unsur seperti penghormatan ruh nenek moyang, penyembahan kepada dewi matahari, kepercayaan kepada dewa-dewa alam seperti dewa gunung, dewa air, dewa pohon-pohonan, atau dewa-dewa kesuburan. Di samping itu ada pula kepercayaan terhadap adanya kekuatan sakti dalam benda-benda pusaka, dalam batu, dalam jimat, dan sebagainya.

Unsur-unsur itu sebenarnya merupakan unsur-unsur religi rakyat pedesaan *(folk religion).*

Adapun agama Buddha masuk ke Jepang dari Korea dalam abad ke-6, dan telah terjalin erat dengan agama Shinto. Apabila agama Shinto itu bagi orang Jepang terarah terhadap kehidupan di dunia ini, dan memberi pemecahan terhadap soal-soal sehari-hari yang konkret, maka agama Buddha memberi pemecahan terhadap soal-soal yang berhubungan dengan dunia akhirat. Karena itu, untuk mengurus upacara kelahiran anak misalnya, orang Jepang biasanya minta bantuan pendeta Shinto, maka untuk mengurus upacara kematian dan penguburan, orang Jepang minta bantuan pendeta Buddha.

Kita tahu bahwa agama Shinto itu menjadi agama kenegaraan Jepang, dan kepercayaan rakyat kepada Kaisar-Keramat-Keturunan-Dewa dalam zaman permulaan pembangunan sistem kepercayaan itu, dapat dipergunakan oleh para pemimpin Jepang untuk melaksanakan pembangunan atas nama Kaisar yang keramat seolah-olah sebagai suatu usaha yang keramat. Lebih-lebih karena unsur-unsur agama Shinto itu terjalin langsung ke dalam kehidupan kekeluargaan dan kehidupan sehari-hari orang Jepang, maka jaminan partisipasi sepenuhnya dari rakyat dalam pembangunan bukanlah suatu masalah lagi. Sayang bahwa kebudayaan Indonesia sekarang tidak mempunyai suatu sumber penggerak motivasi pembangunan sekuat itu.

18

MENGAPA ORANG JEPANG MENGANGGAP MORAL KITA LEMAH ?

KADANG-KADANG kita perlu mulai memperhatikan dengan serius dan saksama bagaimana pendirian bangsa lain terhadap kita. Dalam usaha kita di masa yang lampau untuk mengagung-agungkan diri, hal yang amat penting tersebut di atas itu, yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita, sering kita lupakan.

Dalam bulan Oktober tahun 1971 saya pernah diundang oleh Internasional House of Japan untuk datang dan berkeliling di Negara Jepang dalam rangka suatu program pertukaran cendekiawan-cendekiawan bangsa Asia. Dalam program itu, tiap tahun diundang cendekiawan-cendekiawan dari beberapa negara Asia untuk bertukar pikiran dengan para cendekiawan serta teman-teman sejawatnya dari Jepang. Sebagian dari pertemuan-pertemuan tidak berupa rapat-rapat atau seminar resmi, melainkan omong-omong secara bebas sehingga biasanya dapat dikembangkan diskusi-diskusi dengan hati terbuka.

Dalam diskusi-diskusi itu tampak bahwa banyak cendekiawan Jepang (juga beberapa dari ahli ekonominya) mulai sadar bahwa pergolakan dan keributan-keributan yang timbul dalam masyarakat mereka sendiri adalah akibat dari tak adanya keseimbangan antara laju kemajuan ekonomi yang terlampau cepat dan perobahan struktur masyarakat serta sistem nilai-nilai-budaya Jepang yang terlampau lambat. Banyak di antara mereka mulai bertanya

kepada diri sendiri: "Sesudah tiba kemakmuran, akan ke manakah kita bangsa Jepang?"

Mengapakah para cendekiawan Jepang mengaitkan masalah-masalah perkembangan ekonomi dan masalah pergolakan sosial dalam negeri itu dengan masalah hubungan mereka dengan bangsa-bangsa Asia? Karena dua hal: pertama, orang Jepang, terutama para cendekiawannya, melihat perspektif berkembangnya pergaulan yang lebih intensif dengan bangsa-bangsa Asia itu dalam waktu yang akan datang sebagai suatu akibat dari perkembangan ekonomi serta perobahan dalam struktur politik negara mereka; kedua, orang Jepang umumnya bercita-cita menjadi pemimpin di Asia.

Ketegangan-ketegangan dan pergolakan sosial serta rasa tak puas yang akhir-akhir ini tampak menyolok dalam masyarakat Jepang adalah suatu gejala di kota-kota, terutama di daerah Jepang Tengah sekitar kota-kota raksasa pusat-pusat industri seperti Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe. Menurut taksiran para ahli, pada masa sekarang ini* hampir 45% dari seluruh penduduk Jepang tinggal di sekitar daerah itu, dan menurut perhitungan, dalam masa sepuluh tahun mendatang jumlah itu akan hampir berlipat ganda, atau lebih dari 70% dari seluruh penduduk Jepang akan hidup berjejal di situ. Hal ini, menurut tafsiran mereka sendiri, akan menambah masalah-masalah sosial di kota-kota, menambah rasa tak puas, dan menambah kekuatan dari partai-partai oposisi seperti Partai Komunis, Partai Sosial, dan partai-partai keagamaan terhadap Partai Demokrat Liberal yang sekarang memegang kekuasaan itu. Gejala ini telah tampak di Tokyo dan Osaka (walaupun tahun 1971 ini ada tendensi menurun dari kekuatan partai-partai oposisi di Tokyo). Kalau nanti dengan bertambah kuatnya partai-partai oposisi keseimbangan politik berobah, maka

---

* Karangan ini ditulis pada akhir tahun 1971.

kebijaksanaan politik ekonomi yang sekarang terlampau terorientasi terhadap Amerika Serikat harus dirobah menjadi suatu orientasi terhadap bangsa-bangsa Asia.

Sebenarnya sekarang sudah ada kecondongan dari Jepang untuk merobah orientasi pemasaran dari hasil-hasil industri. Kapasitas pasar di Amerika Serikat telah menurun sejak tahun ini. Pengembangan basis Okinawa ke tangan Jepang rupa-rupanya akan dilakukan oleh Amerika, hanya kalau ekonomi Jepang mengurangi sifat agresif daripada ekonominya di pasar-pasar di Amerika Serikat.

Dalam pergaulannya dengan bangsa-bangsa di Asia itu bangsa Jepang berambisi untuk menjadi pemimpin. Sudah nyata terang bahwa mereka pada umumnya menganggap dirinya berhak untuk memegang peranan itu, sebagai satu-satunya bangsa Asia yang telah mencapai masyarakat yang makmur. Ambisi yang sudah ada pada mereka sejak lama itu tidak dapat dihapuskan oleh kekalahan besar yang mereka derita dalam Perang Dunia ke-II.

Jugà di antara sebagian besar cendekiawan Jepang ambisi tersebut hidup, walaupun mereka mencita-citakan suatu kepemimpinan yang bertanggung jawab dan kooperatif. Apakah yang mereka maksudkan dengan *responsible cooperative leadership* itu? Pertama-tama mereka ingin mencoba mengembangkan suatu pengertian dan apresiasi terhadap keperluan-keperluan, kemauan, dan cita-cita bangsa-bangsa lain di Asia yang hendak mereka pimpin itu. Umumnya mereka juga mengerti bahwa semua bangsa di Asia itu ingin mencapai suatu perbaikan dari taraf kemakmuran mereka melalui pembangunan ekonomi; bahkan ada beberapa cendekiawan Jepang yang begitu progresif sehingga mengemukakan agar bangsa-bangsa dan negara-negara Asia yang sedang berkembang itu hendaknya jangan didorong dengan bantuan ekonomi,

melainkan justru dengan ajakan untuk ikut serta sebagai kawan, sebagai partner, dalam usaha.

Sebaliknya, gagasan-gagasan yang amat progresif dan yang praktis mungkin toh tidak pernah akan dapat dilaksanakan, mereka bantah sendiri dengan pendirian bahwa bangsa-bangsa yang sedang berkembang itu sukar untuk dijadikan partner karena mentalitasnya yang belum cocok untuk irama kehidupan ekonomi modern yang sekarang menjadi landasan kehidupan manusia dalam negara yang telah maju seperti Jepang. Tanpa tedeng aling-aling seorang teman sejawat bangsa Jepang yang mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang Indonesia pernah mengucapkan kepada saya kata-kata sebagai berikut: "Banyak orang Indonesia lemah dalam hal moral!" Dengan agak terkejut saya tanyakan apa yang dimaksudnya dengan kata "moral" itu. Terbukti bahwa faham "moral" pada orang Jepang itu berbeda isinya dengan apa yang biasa kita asosiasikan dengan istilah itu. Menurut orang Jepang faham "moral" mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) bertanggung jawab sampai sejauh-jauhnya, kalau perlu dengan mengorbankan diri sendiri, terhadap suatu tugas yang telah disanggupi; (b) loyalitas mutlak terhadap kesatuan sosial yang sudah dipilih untuk diikuti.

Kalau kata-kata tersebut kita tanggapi secara serius, maka hal itu artinya adalah bahwa orang Jepang itu menilai tinggi kedua sifat kemanusiaan tadi, dan bahwa mereka itu hanya mau menganggap orang-orang yang mempunyai kedua sifat kemanusiaan tadi sebagai patner dalam usaha dan sebagai bangsa yang sederajat dengan mereka. Hal itu juga berarti bahwa penilaian mereka terhadap bangsa Indonesia itu masih rendah sehingga bangsa Indonesia itu sebenarnya belum cocok untuk mereka ajak sebagai partner.

Sekali lagi, kita perlu lebih sering memperhatikan apakah pendirian bangsa-bangsa lain mengenai kita. Apalagi kalau stereotip dan gambaran tentang diri kita seperti itu tadi berasal dari suatu bangsa yang dengan

ambisinya sebenarnya merupakan suatu bangsa yang amat berbahaya bagi kita, maka sungguh penting kiranya apabila ucapan-ucapan serupa itu benar-benar menjadi bahan perhatian kita.

19

APAKAH BENAR BAHWA ORANG JEPANG BERSIFAT HEMAT?

BANYAK di antara kita kenal dengan pandangan stereotip yang mengatakan bahwa bangsa Belanda bersifat hemat. Sebaliknya, orang tidak pernah mengembangkan suatu pandangan stereotip bahwa orang Jepang bersifat hemat. Memang kalau orang berkunjung ke Jepang sebagai tamu, ia akan tertarik akan keramahan hati yang telah tertanam ke dalam adat sopan-santun mereka, dan khususnya ia akan tertarik akan suatu adat untuk menyerahkan pemberian atau kado kecil pada waktu bertemu, berkunjung, atau berpisah.

Bahwa adat sopan-santun pergaulan bangsa Jepang itu mengandung gaya yang merefleksikan suatu keramahan yang besar, memang benar. Bahwa adat memberikan kado pada waktu bertemu dan adat untuk memberi pelayanan kepada tamu sampai si tamu itu merasa benar-benar puas merefleksikan suatu kemurahan hati yang besar, memang benar juga. Sebaliknya, apakah hal itu berarti bahwa orang Jepang itu pemboros dan tidak bersifat hemat? Kalau saya berkunjung ke Jepang, saya banyak mendapat kesempatan untuk bergaul dengan rekan-rekan orang Jepang, tidak hanya pada taraf tamu resmi, melainkan sebagai sahabat-sahabat yang telah berinteraksi secara bebas. Dari pengalaman itu terbukti bahwa banyak orang Jepang menilai sifat hemat itu sebagai sifat yang amat terpuji sehingga dalam sifat extremnya orang Jepang

kadang-kadang bisa juga bersifat kikir. Dalam hal itu mereka tidak berbeda dengan orang Belanda.

Keramahan yang tertanam dalam adat sopan-santun pergaulannya itu terbukti hanya suatu gaya lahir saja. Perhatikanlah bahwa kado-kado kecil itu biasanya hanya berupa barang-barang sederhana saja, sedangkan biaya jamuan makan dan minum yang mewah lezat di restoran itu, biasanya dibebankan kepada jawatan atau perusahaan.

Sifat hemat orang Jepang memang tampak pada beberapa hal dalam kehidupan sehari-harinya. Menyebut seorang Jepang "pemboros" merupakan penghinaan amat besar, yang akan dapat menimbulkan reaksi yang agresif. Sebaliknya, apabila seorang Indonesia disebut "pemboros", ia jarang akan benar-benar marah. Pujian yang menyatakan kekaguman akan sifat mahal dari suatu barang milik seorang Jepang akan benar-benar membuatnya malu (bukan malu yang dibuat-buat). Seorang Indonesia, terutama pada masa kini, bahkan akan puas hatinya apabila kita kagumi kemewahan rumahnya dan cahaya gemerlapan dari perhiasan isterinya.

Orang Jepang memang tak bisa tidak, pada dasarnya harus bersifat hemat; kalau tidak tak mungkin mereka dapat membangun ekonomi mereka seabad yang lalu dengan kekuatan sendiri, dengan bantuan modal asing secara minimal sekali. Menurut rumus ekonomi yang elementer, akumulasi modal adalah selisih antara GNP dan konsumsi, ditambah dengan selisih antara impor dan expor. Dalam waktu yang lama dalam fase-fase pertama dari pembangunannya, impor negara Jepang lebih besar dari expornya, dan karena GNP-nya tentu belum tinggi, maka sudah tentu tekanan terutama terletak pada konsumsi. Berbeda dengan di negeri kita, di mana perusahaan-perusahaan yang belum tampak berkembang justru mulai dengan membangun gedung-gedung yang mewah, bangsa Jepang biasanya justru menekan kepada biaya *overhead*, dan hal ini memang tampak konkret pada keadaan perumahan rakyat

Jepang yang pada umumnya memang sampai sekarang masih sangat buruk, dan juga pada keadaan jalan-jalan di Jepang, yang di luar kota metropolitan sama buruk keadaannya seperti di Indonesia saja, namun di samping itu terang sekali bahwa orang Jepang menekan berat kepada kehidupan rumah tangga sehari-hari dari rakyat. Kalau kita tinjau angka *rate of saving* dari Jepang, maka tampak angka 38,3% dari NNP, suatu angka yang lebih tinggi dari angka *rate of saving* sesuatu bangsa yang biasanya terkenal sebagai bangsa yang hemat, yaitu bangsa Belanda (kurang dari 30%).

Menurut keterangan seorang ahli ekonomi Jepang yang terkenal, bernama Dr. Shinichi Ichimura, kecuali sikap mentalnya yang menilai tinggi sifat hemat itu, bangsa Jepang juga dapat mengakumulasi modal yang demikian besarnya itu berkat sistem dan pola-pola pembayaran gaji, upah dan bonus, ditambah pula adat orang Jepang umumnya untuk mantap tetap tinggal dalam satu jabatan secara kontinu selama hidupnya. Hal itu adalah apa yang disebut pola senioritas dalam sistem pembayaran gaji.

Gaji dinaikkan secara berangsur-angsur; pada waktu seseorang mulai bekerja pada usia muda, gajinya rendah, tetapi sepadan dengan keperluan hidup yang sederhana dan wajar. Waktu seorang sudah menikah, maka gaji juga naik, tetapi keperluan hidup sudah tambah, dan secara berangsur bertambah sampai tiba waktunya bahwa anak-anak harus mengunjungi sekolah menengah dan menjadi mahasiswa. Pada tingkat itu dalam kehidupan seseorang keperluan sudah demikian meningkat hingga melebihi gaji dan pendapatannya. Demikian orang terpaksa dan terlatih untuk hidup dengan amat sederhana serta hemat selama hampir sepuluh tahun. Kemudian kalau orang menginjak umur tua, dan anak-anaknya sudah mempunyai mata pencaharian sendiri serta sudah menikah pula, maka keperluan hidupnya berkurang lagi. Toh ia tetap akan hidup sederhana dan hemat,

karena memang sudah menjadi kebiasaannya. Sebaliknya, gajinya yang selalu naik, pada waktu itu akan melebihi keperluan hidup, dan selisih itu merupakan simpanan di tingkat rumah tangga yang mempunyai potensi yang amat besar.

Adapun bonus yang kadang-kadang diterimanya oleh orang Jepang dianggap sebagai suatu pendapatan di luar rutine sehingga dianggap di luar keperluan hidupnya yang biasanya. Dengan demikian bonus itu biasanya ditabung. Kita tahu bahwa sikap mental kita terhadap pendapatan extra adalah bahwa kita anggap hal itu merupakan rezeki yang tidak harus ditabung, akan tetapi justru harus dikonsumsi habis berdasarkan dalil "mumpung".

Banyak ahli ekonomi berkata bahwa sistem dan pola senioritas dalam kenaikan gaji dan upah itu adalah suatu sistem yang dapat dianggap kuno dan feodal. Hal itu disebabkan karena yang diberi ganjaran bukan kualitas kerja, melainkan hanya jangka waktu kerja saja. Dengan demikian akan timbul misalokasi tenaga kerja dan sebagainya. Tetapi menurut Dr. Ichimura sistem itu sementara ini tidak akan dirobah di Jepang, karena kecuali sudah mendarah daging, menurut analisa, sistem itu terbukti telah menambah *rate of saving* dan *household investment* dari bangsa Jepang. Adapun soal kurangnya kualitas katanya dapat diimbangi dengan loyalitas kepada jawatan atau perusahaan. Orang yang telah masuk sesuatu jawatan atau perusahaan biasanya tidak ada pikiran untuk pindah ke tempat pekerjaan lain. Hal ini amat berbeda dengan di Amerika misalnya, di mana orang muda justru berpindah-pindah pekerjaan untuk mencari tempat yang paling cocok dan menguntungkan, dan baru mulai menetapkan pada satu tempat apabila ia sudah agak tua. Loyalitas pada satu pekerjaan di Jepang biasanya bersamaan dengan suatu rasa identitas dan kebanggaan besar dengan jawatan atau perusahaan yang bersangkutan. Loyalitas yang besar dari seorang pegawai Mainichi Shinbun, atau dari Toyota Motors,

terhadap perusahaannya masing-masing tadi, dengan sendirinya akan menambah kualitas kerjanya juga.

Indonesia juga mempunyai pola senioritas, tetapi di Indonesia rupa-rupanya pola itu tidak menambah *rate of saving*, dan tidak merangsang mutu kerja. Memang di sini agaknya soal mentalitas juga yang menentukan. Mentalitas orang Jepang berbeda dengan mentalitas orang Indonesia. Suatu hal lain yang juga menyukarkan penerapan analisa Ichimura kepada keadaan di Indonesia, yaitu bahwa negara kita telah dirusak oleh suatu inflasi yang kita derita sejak zaman Perang Dunia ke-II. Inflasi yang ganas itu kini sudah dikuasai, tetapi kerusakan-kerusakannya belum dipulihkan.

20

APAKAH KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA ?

KITA sering bangga bahwa ke-120 juta orang Indonesia yang menduduki Kepulauan Nusantara kita ini menunjukkan suatu aneka-warna besar dalam hal kebudayaan dan bahasa; kita bangga akan rumus yang melambangkan aneka-warna bangsa kita, yaitu *bhinneka tunggal ika*, walaupun banyak di antara kita tidak begitu tahu dengan tepat apa artinya (*bhinna* = bentuk partisip-pasif dari akar kata Sanskerta *bhid* = pecah; *ika* = itu; *tunggal* = satu; jadi *bhinna ika tunggal ika* = terpecah itu satu itu).

Walaupun di satu pihak kita bangga akan sifat aneka-warna bangsa kita, di lain pihak kita prihatin juga mengingat aneka-warna masalah yang timbul karena sifat itu. Masalah yang paling dasar yang bersangkut-paut dengan sifat tersebut adalah masalah kebudayaan nasional Indonesia. Masalah itu bukan hanya suatu masalah cita-cita saja, mengenai suatu kebudayaan kesatuan yang kita bayangkan untuk kelak kemudian hari, melainkan menurut hemat saya adalah suatu masalah yang amat nyata. Hal itu disebabkan karena masalah kebudayaan nasional menyangkut masalah kepribadian nasional, dan masalah kepribadian nasional itu tidak hanya langsung mengenai identitas kita sebagai bangsa, tetapi juga menyangkut soal tujuan kita bersama untuk hidup sebagai bangsa, menyangkut soal tujuan kita bersama untuk dengan susah payah mengeluarkan tenaga banyak untuk membangun, dan menyangkut soal motivasi kita untuk membangun.

Dalam Repelita II memang ada perhatian khusus terhadap masalah Kebudayaan Nasional (yaitu buku Repelita II, bagian III, bab 24, dimuat dalam KOMPAS tanggal 11 Februari 1974). Kalau kita perhatikan isinya, maka bab tentang Kebudayaan Nasional Indonesia itu mengenai rencana-rencana program pengembangan kesenian (yang kuno, yang merupakan warisan sejarah, maupun yang daerah), pengembangan bahasa (nasional maupun daerah), dan juga ilmu pengetahuan (bukan aspek penelitiannya melainkan soal penerbitan buku-buku dan majalah ilmiah).

Adapun saya sendiri yang mengetahui dari dekat sejarah terjadinya Bab 24 dari Repelita II itu, berpendapat bahwa masih ada usaha-usaha penting lain yang sebenarnya harus erat dikaitkan dengan pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia itu, yaitu: (1) program kampanye dan penerangan besar-besaran agar rakyat Indonesia mulai menghargai barang-barang hasil produksi industri nasionalnya, dan berhenti untuk lebih menyukai barang-barang *Made in Hongkong, Made in Japan,* atau *Made in USA);* (2) usaha lebih serius untuk mengembangkan Hukum Nasional. Namun, karena orang biasanya mengasosiasikan kebudayaan dengan kesenian, dan tidak dengan barang-barang hasil produksi industri atau dengan hukum, maka kedua hal tersebut dikeluarkan dari draft semula dari Bab 24 Repelita II. Juga saran-saran bahwa pengembangan Kebudayaan Nasional itu hanya mungkin dengan usaha-usaha serius untuk meninggikan kapasitas intelektual, sofistikasi, kebiasaan membaca, pengetahuan umum, pokoknya mutu dari rakyat Indonesia pada umumnya, kurang menonjol dalam Bab 24 itu, walaupun untunglah ada kalimat-kalimat tentang rencana mengusahakan penerbitan buku-buku serta majalah-majalah ilmiah tadi.

Menurut hemat saya, agar suatu Kebudayaan Nasional dapat didukung oleh sebagian besar dari warga sesuatu negara, maka sebagai syarat mutlak

sifatnya harus khas dan harus dapat dibanggakan oleh warganegara yang mendukungnya. Hal itu perlu karena suatu kebudayaan nasional harus dapat memberi identitas kepada warganegara tadi.

Sifat khas suatu kebudayaan memang hanya bisa dimanifestasikan dalam beberapa unsur yang terbatas dalam suatu kebudayaan, yaitu dalam bahasanya, dalam keseniannya (yang kuno warisan nenek-moyang maupun yang kontemporer, termasuk misalnya gaya pakaian), dan dalam upacara-upacaranya (yang tradisional maupun yang baru). Sulit untuk menonjolkan sifat khas yang memberi identitas itu dalam unsur-unsur lain dari suatu kebudayaan. Sulit misalnya untuk memberi identitas dalam sistem teknologinya (karena teknologi itu bersifat universal), dalam ekonominya (karena ekonomi itu harus dicocokkan dengan sistem ekonomi di negara-negara maju), dalam sistem kemasyarakatannya (karena struktur masyarakat berdasarkan beberapa prinsip yang terbatas kemungkinannya), dalam ilmu pengetahuannya (karena ilmu itu harus bersifat universal, tak bisa khas, kecuali kalau ada *achievement* yang khas berupa misalnya penemuan baru), dan sulit juga dalam agama (karena agama adalah Kehendak Tuhan, jadi kalau dengan sengaja mau mengembangkan suatu agama khas Indonesia, hal itu tidak mungkin).

Walaupun demikian, ada suatu aspek lain yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan Kebudayaan Nasional sesuatu negara itu. Aspek lain itu adalah syarat bahwa agar suatu unsur Kebudayaan Nasional itu bisa memberi identitas kepada warga dari negaranya, maka ia harus bisa menimbulkan rasa bangga kepada mereka, dan sebaliknya, supaya bisa menyebabkan kebanggaan bangsa, maka mutunya harus tinggi.

Kalau Kebudayaan Nasional Indonesia itu kita dasarkan atas konsepsi sifat khas dan mutu tinggi tadi, maka soal hubungan antara kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional yang sering menjadi bahan

perbincangan orang dari dulu pada zaman Pergerakan Nasional sampai sekarang itu, menjadi tak penting lagi. Lepas dari soal daerah, maka tiap hasil karya putera Indonesia dari suku-bangsa mana pun asalnya, pokoknya asal khas dan bermutu saja, sedemikian rupa sehingga sebagian besar orang Indonesia mau dan bisa mengidentifikasikan diri dan merasa bangga dengan karya tadi, maka itulah Kebudayaan Nasional Indonesia.

Maka apabila ada suatu gaya pakaian wanita yang khas sifatnya tetapi toh indah, sehingga kita bangga mempertontonkannya, maka itulah suatu unsur dalam Kebudayaan Nasional kita. Soal apakah gaya pakaian itu berasal dari kebudayaan Bugis, Minangkabau, Jawa, Bali ataupun Maluku, menjadi tidak penting lagi. Demikian juga kalau ada suatu pementasan gamelan yang khas sifat-sifatnya dan juga indah serta tinggi mutunya, maka gamelan itulah suatu unsur lagi dalam Kebudayaan Nasional Indonesia. Soal apakah permainan gamelan itu berasal dari kebudayaan Bali, Sunda atau lain, tidak menjadi penting lagi. Apabila suatu film nasional mempunyai sifat-sifat yang khas, dan demikian tinggi mutunya sehingga mendapat suksès besar di festival-festival internasional, maka film tersebut menjadi suatu unsur. dalam Kebudayaan Nasional kita. Apakah seniman-seniman dalam film itu orang Menado, orang Jawa, orang Aceh ataupun orang Banjarmasin tak penting lagi. Bilamana terjadi seorang ahli kimia Indonesia menemukan suatu hal baru dalam bidang ilmiah yang khas sifatnya sedangkan hasilnya tadi demikian tinggi mutunya sehingga ahli kimia tadi mendapat hadiah Nobel, maka penemuan ilmiah tadi menjadi unsur dalam Kebudayaan Nasional Indonesia. Soal apakah ahli kimia tadi orang Irian, orang Lampung, orang Sunda ataupun orang keturunan Cina, menjadi tak penting lagi. Demikian, kalau orkes Simfoni Jakarta bisa mengembangkan sifat-sifat yang khas dan mencapai mutu tinggi sehingga menjadi terkenal di dunia, maka bangsa Indonesia akan bangga

dan sudi mengakui Orkes Simfoni itu tadi sebagai suatu unsur dalam Kebudayaan Nasionalnya. Soal bahwa Orkes Simfoni itu berasal dari kebudayaan Barat, dan bahwa seniman-seniman dalam Orkes tersebut orang Sunda, orang Jawa, orang keturunan Cina serta orang Indo, tidak menjadi penting lagi.

Demikianlah konsepsi saya mengenai Kebudayaan Nasional Indonesia.

21

BIDANG-BIDANG KESENIAN MANAKAH MEMBERI ISI KEPADA KEBUDAYAAN NASIONAL ?

DALAM karangan no. 20 di atas saya mengambil pendirian bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia itu, harus bisa memberi rasa kepribadian kepada bangsa Indonesia sebagai suatu keseluruhan dan sebagai suatu kesatuan nasional. Maka dari itu kebudayaan nasional Indonesia harus memiliki sifat khas. Kecuali itu, ia harus memberi kebanggaan kepada semua orang Indonesia, dan oleh karena itu ia harus bermutu amat tinggi.

Kalau kita ambil konsep kebudayaan nasional dalam arti seperti itu, ruang-lingkupnya menjadi terbatas. Memang hanya satu di antara ketujuh unsur kebudayaan universal itu bisa cocok dikembangkan secara khusus. Unsur-unsur kebudayaan yang universal, seperti tersebut dalam karangan no. 1, adalah: (1) sistem teknologi; (2) sistem mata pencaharian hidup (3) sistem kemasyarakatan; (4) bahasa; (5) sistem pengetahuan; (6) religi; dan (7) kesenian. Adalah sulit untuk mengembangkan suatu sistem teknologi khas à la Indonesia dalam abad elektronik dan atom ini, karena dalam lapangan itu bangsa Indonesia sudah terlampau terbelakang. Sulit juga untuk mengembangkan suatu sistem ekonomi berkepribadian à la Indonesia, karena bangsa Indonesia terlampau miskin untuk dapat berhasil dalam suatu usaha seperti itu. Juga untuk mengembangkan suatu organisasi masyarakat khas Indonesia adalah sulit,

karena prinsip-prinsip struktur masyarakat itu terbatas kemungkinan-kemungkinannya. Hal yang bisa kita beri sifat khas, mungkin hanya adat sopan-santun pergaulan Indonesia. Bahasa tentu merupakan alat jitu untuk mengembangkan rasa identitas Indonesia, sebaliknya sulit untuk dipakai sebagai alat untuk meninggikan rasa kebanggaan bangsa. Ilmu pengetahuan tak bisa ditonjolkan sebagai unsur Kebudayaan Nasional Indonesia, karena ilmu pengetahuan sekarang bersifat universal. Walaupun demikian, suatu hasil yang gemiliang dalam usaha ilmu pengetahuan, suatu penemuan baru oleh seorang putera Indonesia, bisa meninggikan rasa kebanggaan orang Indonesia sebagai keseluruhan. Religi dan agama sulit juga untuk dengan sengaja menurut sifat-sufatnya khas Indonesia. Agama adalah Titah Tuhan, maka sebaiknya janganlah kita berusaha untuk mengembangkan suatu aggama Islam khas à la Indonesia, atau agama Katholik khas à la Indonesia (walaupun secara nyata suatu proses ke arah itu toh sudah dan masih berlangsung, namun hal itu sulit ditonjolkan untuk mempertinggi rasa kebanggaan dan kepribadian nasional kita).

Sudah jelaskah kiranya bahwa akhirnya hanya ada satu unsur kebudayaan yang dapat menonjolkan sifat khas dan mutu, dan dengan demikian amat cocok sebagai unsur paling utama dari Kebudayaan Nasional Indonesia, yaitu *kesenian*. Kalau demikian halnya, maka masalah mengembangkan Kebudayaan Nasional Indonesia pada hakekatnya memang terbatas kepada masalah mengembangkan Kesenian Nasional Indonesia.

Dalam Repelita II (Buku III) ada suatu bab khusus (Bab 24), yang mengenai pengembangan kebudayaan nasional. Memang para ahli perencanaan pembangunan kita telah sadar akan pentingnya kebudayaan nasional bagi suatu bangsa, karena kebudayaan nasional itu memberi identitas nasional, dan identitas nasional itu

perlu untuk mendorong motivasi untuk usaha pembangunan.

Kalau kita perhatikan materi dari Bab 24 dalam Buku III Repelita II itu, maka akan tampak bahwa bab tersebut mengenai dua unsur kebudayaan, yaitu: (i) bahasa, dan (ii) kesenian nasional. Semua program dan proyek yang direncanakan dalam bab itu mengenai usaha-usaha untuk mengembangkan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, kesenian nasional maupun kesenian daerah, yang kuno maupun yang kontemporer. Saya sendiri mengetahui bahwa dalam konsep-konsep permulaan dari bab itu, materinya meliputi juga dua lapangan usaha lain, ialah: (1) usaha pengembangan hukum nasional, dan (2) kampanye besar-besaran untuk mengembangkan sikap rakyat Indonesia agar mereka lebih menghargai hasil produksi nasional. Hal yang tersebut pertama logis, karena hukum nasional harus memantapkan kehidupan masyarakat Indonesia pada taraf nasional, sedangkan suatu kebudayaan nasional Indonesia yang mantap dan sehat tak pernah akan dapat dikembangkan kalau rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari masih lebih suka mengonsumsi barang-barang *made in* Hongkong daripada hasil-hasil produksi industri nasional sendiri. Namun, karena kedua lapangan usaha tersebut terakhir itu secara konvensional biasanya tidak dimasukkan ke dalam suatu bab yang membicarakan soal-soal kebudayaan, maka kedua-duanya dikeluarkan dari Bab 24.

Dengan demikian, kalau usaha mengembangkan kebudayaan nasional itu dalam prakteknya toh menyangkut usaha mengembangkan kesenian nasional, amat perlu untuk bisa mengetahui ruang-lingkup dari kesenian itu agar bisa diketahui ruang-lingkup dari usaha mengembangkan kesenian itu. Semua bidang yang termasuk ruang-lingkup kesenian itu tercantum pada Bagan 2 di bawah.
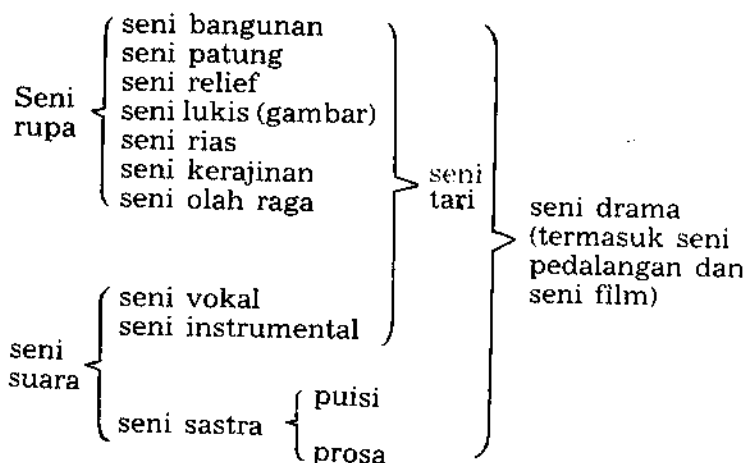
Bagan 2: Bidang-Bidang Kesenian

Seni bangunan sebenarnya adalah suatu bidang kesenian yang amat cocok untuk dapat mempertinggi rasa kebanggaan dan identitas suatu bangsa. Wujudnya sangat fisik dan lokasinya di kota-kota besar, yang sering dikunjungi bangsa-bangsa dari segala penjuru mata angin, sehingga dapat tampak dari luar. Sifat khasnya bisa mudah ditonjolkan, sedang mutunya pun mudah dapat diobservasi. Sumber untuk mengembangkan sifat-sifat khas dalam seni bangunan Indonesia dapat dicari di dalam seni bangunan dari suku-suku bangsa di daerah atau alam Indonesia seluruhnya, sedangkan pengembangan mutu ditentukan oleh standar ilmu arsitektur. Gaya nasional yang benar-benar bisa kita banggakan sebenarnya belum ditemukan oleh arsitek-arsitek kita. Suatu gedung seperti Wisma Nusantara di Jakarta, meskipun indah dan bermutu, samasekali belum mengandung unsur-unsur khas Indonesia. Banyak gedung baru di

berbagai kota di Indonesia belum memperlihatkan suatu kepribadian yang kuat walaupun usaha untuk mengolah unsur-unsur tertentu dari seni arsitektur Indonesia sudah dicoba. Untunglah bahwa kita masih mempunyai sumber lain untuk mengambil hasil-hasil dalam seni bangunan yang baik, yang mempunyai sifat khas dan bermutu. Sumber itu adalah zaman yang lampau. Bangunan-bangunan seperti stupa Borobudur, candi Prambanan, candi Panataran dan sebagainya, memang memberi rasa kebanggaan kepada sebagian besar orang Indonesia, dan sangat meninggikan kepribadian Indonesia serta mempertinggi rasa identitasnya.

Seni patung, relief, lukisan dan gambar, merupakan bidang-bidang kesenian yang paling flexibel dan mudah dipakai untuk mengembangkan sifat kepribadian kita berdasar sifat-sifat khas dan mutu yang tinggi. Sifat khas itu tak hanya dapat dikaitkan dengan wujud lahiriah dari bidang kesenian itu, tetapi juga dengan isinya, dan dengan konsepsi intelektualnya. Sumber untuk mencari unsur-unsur yang bisa memberi sifat kekhususan itu tidak hanya kehidupan zaman yang lampau, tetapi kehidupan zaman sekarang dan seluruh alam semesta Indonesia, bahkan seluruh alam semesta di dunia luas ini.

Seni rias Indonesia, terutama seni pakaian untuk wanita, sudah mempunyai sifat-sifat khas yang dapat kita banggakan keindahan dan kecantikannya, karena itu sebaiknya kita pelihara selama mungkin sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional kita yang menonjol.

Erat bersangkutan dengan seni berpakaian adalah seni kerajinan, terutama seni tenun, seni batik, seni ikat, dan seni textil Indonesia lain. Cabang kesenian itu sudah berakar dalam kebudayaan Indonesia sejak lama, tinggi mutu keindahannya, bisa menonjolkan sifat khas Indonesia, bisa memberi rasa kebanggaan kepada kita,

dan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan mempertinggi mutunya dalam rangka industri textil modern. Itulah sebabnya seni textil Indonesia merupakan suatu bidang kesenian yang utama dalam rangka seni kerajinan yang dapat mendorong perkembangan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Seni olahraga Indonesia yang harus dihubungkan erat dengan seni tari Indonesia, memang sering dipakai sebagai salah satu unsur penting dalam hal usaha mengembangkan Kebudayaan Nasional Indonesia sejak zaman Taman Siswa memulai perjuangan pendidikannya untuk menumbuhkan perasaan dan kesadaran nasional antara anak-anak Indonesia dalam zaman penjajahan Belanda. Sifat dari beberapa seni tari di Indonesia, baik yang dikembangkan dalam lingkungan istana-istana swapraja (seperti dalam kebudayaan Jawa) maupun di tengah kehidupan masyarakat desa (seperti di Bali), memang amat khas, sedangkan mutunya tak dapat diragukan lagi. Meskipun demikian rupa-rupanya baik seni tari Jawa maupun seni tari Bali sudah mencapai suatu taraf pengkhususan yang sudah sangat jauh berbeda, sehingga sukar dicampur menjadi satu tanpa merugikan masing-masing. Memang usaha penyampuran semacam itu tak perlu diusahakan untuk membentuk suatu seni tari nasional Indonesia. Seni tari Indonesia adalah seni tari Jawa dalam manifestasinya yang setinggi-tingginya (tentu disesuaikan dengan persepsi orang sekarang mengenai waktu) dan seni tari Bali juga dalam manifestasinya yang setinggi-tingginya, sedangkan harus ada kesempatan untuk perkembangan aliran-aliran seni tari yang mempunyai dasar yang lain, tetapi yang menonjolkan tema Indonesia yang khusus dengan mutu yang tinggi, baik dalam teknik seni tari maupun dalam konsepsi intelektualnya.

Seni musik Indonesia berkembang erat sejajar dengan seni tari Indonesia, tetapi di samping itu dalam

seni musik nasional Indonesia harus ada suatu tempat yang penting untuk seni musik pop Indonesia dan seni musik klasik Indonesia. Kedua-duanya memerlukan sifat khas Indonesia dan mutu yang tinggi. Seni pop Indonesia sedang mencari sifat khasnya itu, sedangkan mutunya masih bisa ditingkatkan. Seni musik klasik Indonesia belum sampai pada taraf kemampuan untuk mencari sifat khasnya karena mutunya memang masih ada di bawah standar yang semestinya. Hal itu karena dukungan dari masyarakat luas belum ada. Pendukung musik klasik di mana pun di dunia biasanya adalah golongan inteletual dalam masyarakat, padahal di Indonesia golongan itu masih sangat lemah.

Seni sastra Indonesia yang bersifat daerah ada banyak macamnya, menurut bahasa daerah yang menjadi pengembannya. Di antara kesusasteraan-kesusasteraan daerah itu ada yang mempunyai sejarah tertulis yang panjang seperti misalnya kesusasteraan Jawa, Bali, Bugis, Melayu dan lain-lain, tetapi pada masa ini seni sastra daerah yang bersifat kontemporer belum banyak berarti. Hal itu adalah suatu pratanda bahwa kehidupan intelektual dalam kebudayaan daerah pada umumnya masih sangat berorientasi ke masa yang lampau dan belum menunjukkan kemampuan dan potensi baru untuk menyesuaikan diri dengan suasana hidup masa kini. Sebab dari keadaan itu mudah dapat kita fahami. Industrialisasi dan suasana hidup modern belum berkembang secara berarti di daerah-daerah. Kota-kota di daerah masih terlampau bersifat kota administratif dengan suatu golongan pegawai atau golongan *priyayi* sebagai kelas sosial yang dominan. Baik kelas usahawan daerah maupun kehidupan intelektual di kota-kota seperti itu masih terlampau terpengaruh oleh gaya hidup dan mentalitas *priyayi*, yang umumnya belum mempunyai suatu sikap mental modern dan yang karena itu masih terlampau berorientasi ke masa yang lampau.

Seni sastra dalam bahasa nasional dalam suatu masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia, memang merupakan salah satu bidang kesenian yang paling cocok dan paling kuat untuk bisa mengembangkan Kebudayaan Nasional. Kita telah dapat melihat bagaimana pentingnya peranan kesusasteraan nasional dalam perkembangan Bahasa Nasional kita, dan sebaliknya bagaimana pentingnya peranan Bahasa Nasional kita dalam hal mengembangkan rasa kesatuan nasional dalam masa Pergerakan Nasional, maupun dalam masa Revolusi kita. Kesusasteraan Nasional kita, walaupun masih berada dalam keadaan pasang-surut, toh sudah menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan karya-karya bermutu yang menonjolkan sifat-sifat khas Indonesia. Cepat atau lambatnya perkembangan kebudayaan nasional menurut hemat saya tergantung pada cepat atau lambatnya perkembangan kesusasteraan nasional. Walaupun demikian, saya berpendirian bahwa kesusasteraan nasional Indonesia akan lebih terdorong maju, kalau diimbangi oleh kesusasteraan daerah kontemporer dalam bahasa daerah yang juga kuat. Kecuali penting dipandang dari sudut persaingan yang sehat, kesusasteraan daerah yang lebih terorientasi ke zaman sekarang akan dapat memperkaya kesusasteraan nasional. Lepas dari itu hasil-hasil karya dalam kesusasteraan daerah yang khas dan bermutu tinggi secara *an sich* dapat pula dianggap sebagai unsur dalam kebudayaan nasional untuk dibanggakan.

Seni drama, yang dapat dianggap sebagai suatu bidang kesenian perluasan dari seni kesusasteraan, seperti apa yang tergambar dalam Bagan 2, mencakup segala bidang kesenian yang lain. Masalahnya sejajar sama dengan seni kesusasteraan Indonesia. Seni drama Indonesia yang bersifat daerah ada banyak macamnya menurut kebudayaan suku-bangsa yang mendiami daerah yang bersangkutan. Seni drama Jawa, Bali,

Lombok, Banjarmasin dan lain-lain, hidup dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting di antaranya adalah seni drama atau seni *pedalangan*. Seni drama *wayang* di berbagai daerah tersebut di atas terorientasi ke zaman yang lampau, tetapi disamping itu, terutama di kota-kota di Jawa, juga ada beberapa bentuk seni drama yang bersifat kontemporer (*ludruk, sandiwara rakyat, lenong* dan lain-lain. Mutunya masih kasar karena seni drama seperti itu biasanya merupakan tontonan bagi rakyat buruh di kota-kota. Walaupun demikian, sifatnya menarik, spontan, mempunyai fungsi sosial yang penting, dan mungkin juga bisa menonjolkan sifat-sifat kekhususan kebudayaan dan kehidupan bangsa Indonesia. Hanya saja mutunya belum sedemikian tinggi, sehingga bisa kita akui sebagai suatu unsur kebudayaan nasional kita.

Seni drama dalam Bahasa Nasional sedang berkembang mencari kepribadiannya sendiri. Demikian juga halnya dengan suatu bidang seni drama yang sekarang menjadi universal, ialah seni film. Juga seni film Indonesia sedang mencari-cari kepribadiannya, dan belum mencapai suatu kemantapan. Tehniknya sudah baik, tetapi dipandang dari sudut isinya belum menemukan sifat-sifat khas kehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia, dan hanya dengan beberapa terkecualian yang menyolok, pada umumnya masih menunjukkan suatu mutu intelektual yang rendah.

Peninjauan sepintas lalu mengenai distribusi potensi dan kelemahan dari berbagai bidang kesenian yang ada di Indonesia, hanya dimaksud sebagai contoh mengenai unsur-unsur dan bidang-bidang apakah yang harus kita perhatikan apabila kita hendak merencanakan pembangunan kebudayaan nasional kita. Untuk mengembangkan ciri kekhususan dalam berbagai bidang kesenian, tetapi terutama kesusasteraan nasional Indonesia yang dapat kita banggakan, diperlukan mutu. Mutu juga diperlukan

untuk peningkatan daya kreatif para arsitek, pemahat, pelukis, penari, ahli musik, tetapi terutama daya kreatif para pengarang kita.

Daya kreatif itu biasanya timbul pada para karyawan, ahli, sarjana atau seniman, dalam suatu bidang keahlian atau kesenian, yang sadar akan kekurangan dalam lingkungan atau karya mereka. Walaupun demikian, kesadaran saja belum cukup. Banyak orang sadar akan bermacam kekurangan yang ada dalam masyarakat sekitarnya, yang sadar akan bermacam kekurangan dalam pekerjaan, karya dan hasil karya mereka sendiri, tetapi toh tak berbuat apa-apa, karena menerima saja kekurangan itu, atau karena tak mampu memperbaiki kekurangan itu. Sebaliknya, kalau karyawan, ahli, sarjana atau seniman yang bersangkutan telah mempunyai keahlian tinggi, dan memiliki suatu mentalitas untuk selalu memperbaiki mutu dari karya-karyanya, maka pada suatu ketika, ia akan mencapai suatu hasil yang belum pernah dicapainya sebelumnya, baik oleh dirinya sendiri, ataupun oleh orang lain. Dengan demikian ia telah menciptakan, mengkreasikan, suatu hasil karya yang baru, atau ia telah menciptakan suatu penemuan yang baru.

Daya kreatif di antara para karyawan, ahli, sarjana, atau seniman memang hanya bisa dikembangkan melalui peningkatan mutu karya mereka dalam teknik maupun dalam konsepsinya. Walaupun demikian, pengembangan kesenian nasional tidak hanya menyaratkan pengembangan mutu dan daya kreatif dari para karyawan, ahli, sarjana dan senimannya saja, tetapi juga menyaratkan peningkatan mutu dari para konsumennya, yaitu berbagai golongan rakyat Indonesia yang harus menikmati hasil karya dari berbagai bidang kesenian tadi. Peningkatan mutu dari rakyat di sini berarti bahwa lebih banyak di antara kita orang Indonesia dari berbagai macam golongan, harus meningkatkan pengetahuan umum kita, harus membiasakan diri kita untuk lebih banyak membaca dan untuk mengembangkan kebiasaan membaca

kepada anak-anak kita, yang akan menjadi konsumen dan pendukung kesenian nasional Indonesia di masa yang akan datang.

22

APAKAH KEPRIBADIAN MENURUT SUATU KONSEP NON-BARAT ?

ADA seorang sarjana Amerika keturunan Cina yang mengombinasikan dalam dirinya keahlian di dalam ilmu antropologi, ilmu psikologi, ilmu filsafat dan kesusasteraan Cina klasik. Sarjana tersebut yang bernama Francis L.K.Hsu, dalam sebuah karangannya berjudul *Psychological Homeostasis and Jen* (dimuat dalam majalah *American Anthropologist* jilid 73 tahun 1971: hlm. 23-44). pernah menyatakan pendapatnya bahwa ilmu psikologi yang memang berasal dan timbul dalam masyarakat Barat, di mana konsep individu itu mengambil tempat yang amat penting, biasanya menganalisa jiwa manusia dengan terlampau banyak menekan kepada pembatasan konsep individu sebagai suatu kesatuan analisa tersendiri. Sampai sekarang, kata Hsu, ilmu psikologi di negara-negara Barat itu terutama mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori mengenai aneka-warna isi jiwa, serta metode-metode dan alat-alat untuk menganalisa dan mengukur secara detail variasi isi jiwa individu itu. Sebaliknya, ilmu itu masih kurang mengembangkan konsep-konsep yang dapat menganalisa jaringan berkait antara jiwa individu dan lingkungan sosial budayanya. Dengan demikian untuk menghindari pendekatan terhadap jiwa manusia itu, hanya sebagai suatu subyek yang terkandung dalam batas individu yang terisolasi, maka Hsu telah mengembangkan suatu konsepsi bahwa alam jiwa manusia sebagai mahluk sosial budaya itu mengandung delapan daerah yang berujud seolah-

olah seperti lingkaran-lingkaran konsentris sekitar diri pribadinya. Bagan 3 pada hlm. 128 menggambarkan kedelapan daerah lingkaran itu.

Lingkaran yang diberi nomor 7 dan 6 adalah daerah dalam jiwa individu yang oleh para ahli psikologi disebut daerah "taksadar" dan "subsadar". Kedua lingkaran itu berada di daerah pedalaman dari alam jiwa individu dan terdiri dari bahan pikiran dan gagasan yang telah terdesak ke dalam sehingga tak disadari lagi oleh individu yang bersangkutan. Bahan pemikiran dan gagasan tadi sering sudah tidak utuh lagi, beberapa bagian sudah hilang terlupakan, dan unsur-unsurnya, ibarat isi impian, sudah tak lagi tersusun menurut logika yang biasa dianut oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang bersangkutan sudah lupa akan unsur-unsur pikiran dan gagasan tersebut tetapi dalam keadaan tertentu unsur-unsur itu bisa meledak keluar lagi, dan mengganggu kebiasaan hidup sehari-harinya. Daerah pedalaman dan jiwa manusia sudah banyak diteliti dan dianalisa oleh para ahli psiko-analisa seperti S. Freud dan pengikut-pengikutnya.

Kemudian ada lingkaran nomor 5 yang oleh Hsu disebut "kesadaran yang tak dinyatakan" *(unexpressed conscious).* Lingkaran itu terdiri dari pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang disadari penuh oleh si individu yang bersangkutan, tetapi disimpannya saja dalam alam jiwanya sendiri dan tak dinyatakannya kepada siapa pun juga dalam lingkungannya. Hal itu disebabkan karena ada kemungkinan bahwa: (i) ia takut salah dan takut dimarahi orang apabila ia menyatakannya, atau karena ia punya maksud jahat; (ii) ia sungkan menyatakannya, karena belum yakin bahwa ia akan mendapat respons dan pengertian yang baik dari sesamanya, atau takut bahwa walaupun diberi respons, respons itu sebenarnya tak diberikan dengan hati yang ikhlas atau juga karena ia takut ditolak mentah-mentah; (iii) ia malu karena takut ditertawakan,

atau karena ada perasaan bersalah yang mendalam; (iv) ia tak bisa menemukan kata-kata atau perumusan yang cocok untuk menyatakan gagasan yang bersangkutan tadi kepada sesamanya.

Selanjutnya ada lingkaran nomor 4 yang oleh Hsu disebut "kesadaran yang dinyatakan" *(expressed conscious)*. Lingkaran ini di dalam alam jiwa manusia mengandung pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, dan perasaan-perasaan yang dapat dinyatakan secara terbuka oleh si individu kepada sesamanya, yang dengan mudah diterima dan dijawab oleh sesamanya. Simpati, kemarahan, kebencian, rasa puas, rasa senang, kegembiraan, rasa terima kasih, konsep-konsep tentang tata cara hidup sehari-hari, pengetahuan yang difahami juga oleh umum, adat-istiadat sehari-hari, peraturan-peraturan sopan-santun dan sebagainya yang dikenal oleh semua orang, dan banyak hal lain, semuanya itu menjadi bahan aktivitas berpikir dan pencetusan emosi manusia dari detik ke detik, dan dari hari ke hari, yang bersumber pada lingkaran nomor 4 ini.

Lingkaran nomor 3, yang oleh Hsu disebut "lingkaran hubungan karib" *(intimate society)*, mengandung konsepsi-konsepsi tentang orang-orang, binatang atau benda-benda yang oleh si individu diajak bergaul secara mesra dan karib, yang bisa dipakai sebagai tempat berlindung dan tempat mencurahkan isi hati apabila ia sedang terkena tekanan batin atau dikejar-kejar oleh kesedihan dan oleh masalah-masalah hidup yang menyulitkan. Orang tua, saudara sekandung, kerabat dekat, sahabat karib, biasanya merupakan penghuni penting dari daerah nomor 3 dalam alam pikiran manusia ini, yang kecuali oleh tokoh-tokoh manusia sering juga ditempati oleh pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan terhadap binatang kesayangan, benda kesayangan, benda pusaka, dan juga oleh hal-hal, ide-ide atau ideologi-ideologi yang dapat menjadi sasaran rasa kebaktian-penuh dari jiwanya, seperti Tuhan bagi kita, ruh nenek-moyang bagi orang bereligi

animis, ideologi komunisme bagi orang komunis, Kaisar Hirohito yang keramat bagi orang Jepang zaman Perang Dunia ke-II dan sebagainya.

Sikap manusia terhadap orang, binatang atau benda dalam lingkaran nomor 2, yang dapat kita sebut "lingkungan hubungan berguna" tidak lagi ditandai oleh sikap sayang mesra, melainkan ditentukan oleh fungsi kegunaan dari orang, binatang atau benda-benda itu bagi dirinya. Bagi seorang murid, guru berada di daerah lingkungan 2 dari alam pikiranya; bagi seorang pedagang, para pembelinya ada di situ; bagi seorang tukang cukur, langgananannyalah berada di situ dan sebagainya. Kecuali manusia, juga banyak benda dan alat kehidupan sehari-hari yang dipergunakan manusia secara otomatis, tanpa banyak mengeluarkan perasaan, kecakapan atau tenaga, berada juga di daerah lingkaran nomor 2 itu. Contoh dari benda-benda yang terletak pada lingkaran itu adalah pakaian harian, alat-alat makan, perabot rumah tangga, uang dan sebagainya.

Lingkaran nomor 1, yang dapat kita sebut "lingkaran hubungan jauh" terdiri dari pikiran dan sikap dalam alam jiwa manusia tentang manusia, benda-benda, alat-alat, pengetahuan dan adat yang ada dalam kebudayaan dan masyarakatnya sendiri, tetapi yang jarang sekali mempunyai arti dan pengaruh langsung terhadap kehidupannya sehari-hari. Bagi petani Jawa di desa-desa di Jawa Tengah, pandangan mereka tentang kota Jakarta mungkin terletak dalam daerah lingkaran ini; bagi seorang mandor jalan di Jawa Timur, pandangannya tentang komputer IBM 1130 dari Departemen PUTL di Jakarta terletak dalam daerah lingkaran ini; bagi seorang ibu rumah tangga di Garut, pertandingan kejuaraan nasional renang di Jakarta terletak dalam lingkaran ini dan sebagainya. Mungkin orang-orang tadi akan kagum apabila mereka mendengar mengenai hal-hal tersebut, tetapi sesudah itu tak akan ada kelanjutan lebih jauh dari kekaguman tadi karena bagi hal-hal tersebut di atas tak ada tempat

dan fungsi langsung dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Daerah nomor 0, yang dapat kita sebut "lingkungan dunia luar" terdiri dari pikiran-pikiran dan anggapan-anggapan yang hampir sama dengan pikiran-pikiran yang terletak dalam lingkaran nomor 1, hanya saja bedanya antara yang pertama dan kedua adalah, bahwa yang pertama terdiri dari pikiran-pikiran dan anggapan-anggapan tentang orang dan hal yang terletak di luar masyarakat dan negara Indonesia, dan ditanggapi oleh individu bersangkutan dengan sikap masa bodoh. Contoh-contohnya adalah: anggapan seorang pelajar Indonesia yang tak pernah pergi ke luar negeri, tentang negara Amerika; anggapan seorang pegawai rendahan di suatu departemen di Jakarta tentang kota Kopenhagen; anggapan seorang sopir bis di Jakarta tentang negara Papua Niugini; pandangan seorang tukang kebun di Ambon tentang orang Eskimo dan sebagainya.

Pada bagan psiko-sosiogram manusia di atas, daerah lingkaran nomor 4 dibatasi oleh garis yang digambar lebih tebal daripada yang lain. Garis itu menggambarkan batas dari alam jiwa individu yang dalam ilmu psikologi disebut *personality* atau "kepribadian". Sebagian besar dari isi jiwa manusia (termasuk yang telah didesak ke dalam daerah taksadar dan subsadar), sebagian besar dari pengetahuan dan pengertiannya tentang adat-istiadat dan kebudayaannya, sebagian besar dari pengetahuan dan pengertiannya tentang lingkungannya, dan sebagian besar dari nilai-budaya dan norma-norma yang dianutnya, menurut ilmu psikologi Barat terkandung dalam kepribadian manusia. Itulah yang merupakan konsep Ego atau Akunya manusia dalam ilmu psikologi Barat.

Menurut Francis Hsu mahluk manusia masih memerlukan suatu daerah isi jiwa tambahan untuk
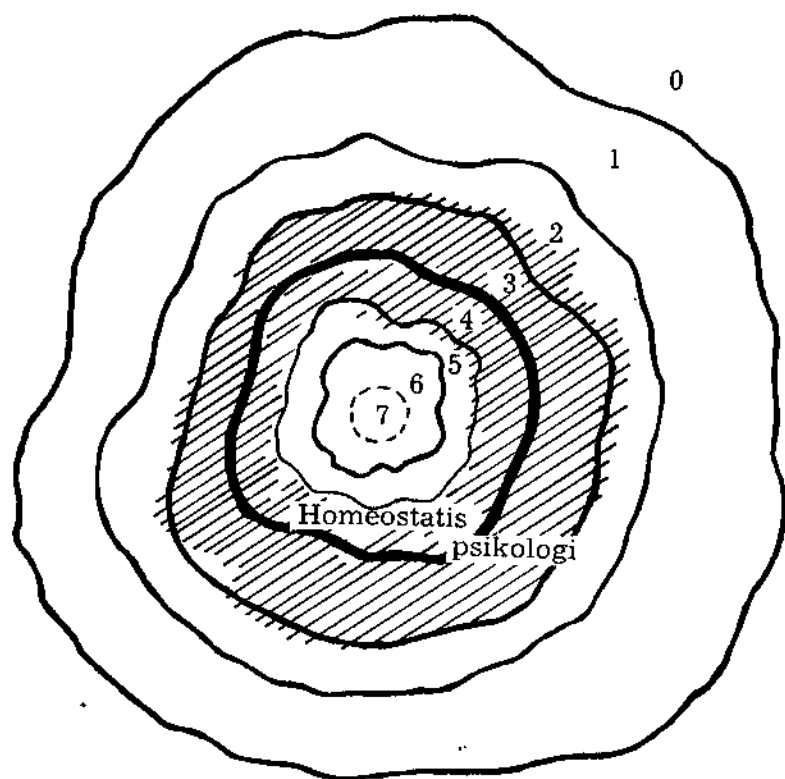
7. taksadar } konsep Freud
6. subsadar }
5. kesadaran yang tak dinyatakan
4. kesadaran yang dinyatakan } konsep manusia berjiwa selaras
3. lingkungan hubungan karib }
2. lingkungan hubungan berguna
1. lingkungan hubungan jauh
0. dunia luar

Bagan 3 : Psiko-sosiogram Manusia

memuaskan suatu kebutuhan rohaniah yang bersifat fundamental dalam hidupnya. Daerah isi jiwa tambahan terhadap lingkaran-lingkaran nomor 7, 6, 5, dan 4 yang menggambarkan kepribadian manusia tadi, adalah daerah lingkaran 3. Hubungan yang berdasarkan cinta dan kemesraan dan juga rasa untuk bisa berbakti secara penuh dan mutlak, merupakan suatu kebutuhan fundamental dalam hidup manusia. Tanpa adanya tokoh-tokoh orang atau benda-benda kesayangan, tanpa Tuhan, tanpa ide-ide atau ideologi-ideologi yang bisa menjadi sasaran dari rasa kebaktian mutlak yang semuanya menempati daerah lingkaran nomor 3 dalam alam jiwanya, hidup kerohanian manusia tak akan bisa seimbang selaras. Manusia yang tak mempunyai semuanya itu akan merupakan manusia yang sangat menderita karena ia kehilangan mutu hidup, kehilangan arti untuk hidup, dan kehilangan landasan dari rasa keamanan murni dalam hidup. Manusia seperti itu sering akan memilih jalan ke luar dari penderitaan dengan bunuh diri.

Berdasarkan konsepsi terurai di atas, maka Hsu mengusulkan untuk mengembangkan suatu konsep kepribadian yang lain, sebagai tambahan terhadap konsep *personality* yang telah lama dikembangkan oleh para ahli psikologi Barat itu. Konsep kepribadian yang lain itu perlu, terutama guna dipakai sebagai konsep untuk menganalisa alam jiwa dari manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang disebutnya masyarakat Timur, yaitu masyarakat Cina pada khususnya, masyarakat bangsa-bangsa Asia pada umumnya, dan menurut pendirian saya masyarakat bangsa Indonesia juga.

Konsep yang dapat dipakai sebagai landasan untuk mengembangkan konsep lain itu, menurut Hsu adalah konsep *Jen* dalam kebudayaan Cina. *Jen* adalah "manusia yang berjiwa selaras, manusia yang berkepribadian". Karena itu usul Hsu tidak lain kecuali agar para ahli psikologi tidak hanya memakai konsep

Barat mengenai kepribadian itu, tetapi juga memperhatikan unsur hubungan mesra dan bakti itu. Dalam konsep *Jen* tersebut di atas manusia yang selaras dan berkepribadian adalah manusia yang dapat menjaga keimbangan hubungan antara diri kepribadiannya dengan lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan sekitarnya yang paling dekat dan paling serius, kepada siapa ia dapat mencurahkan rasa cinta, kemesraan dan baktinya.

Dalam bagan kedua, daerah lingkaran no. 4 dan 3 yang dibedakan dari yang lain dengan garis-garis arser yang sedikit memasuki daerah lingkaran no. 5 dan no. 2 juga, menggambarkan konsep *Jen* atau alam jiwa dari "manusia yang berjiwa selaras" itu. Kedua lingkaran itu adalah daerah-daerah dalam individu yang ada dalam suatu keadaan psikologi yang oleh Hsu disebut *Psychological homeostatis* (judul karangannya).

Untuk mendapatkan suatu pengertian mengenai alam jiwa manusia Indonesia, tetapi juga untuk mengerti perbedaan antara pandangan hidup manusia Barat dan manusia Timur yang akan dibicarakan dalam karangan no. 23 berikut ini, konsep tambahan dari Hsu mengenai "alam jiwa manusia yang selaras" itu, menurut hemat saya merupakan konsep psikologi yang amat penting.

23

APAKAH PERBEDAAN ANTARA MANUSIA BARAT DAN TIMUR MENURUT KONSEPSI HSU ?

BANYAK orang Indonesia masih sering mempersoalkan perbedaan antara Kebudayaan Barat dan Kebudayaan Timur, padahal kedua konsep itu berasal dari orang Eropa Barat dalam zaman ketika mereka berexpansi menjelajahi dunia, menguasai wilayah luas di Afrika, Asia dan Oseania, dan memantapkan pemerintah-pemerintah jajahan mereka di mana-mana. Semua kebudayaan di luar kebudayaan mereka di Eropa Barat disebutnya Kebudayaan Timur, sebagai lawannya kebudayaan mereka sendiri yang mereka sebut Kebudayaan Barat.

Pada waktu kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat mencapai puncak kejayaannya sepanjang abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, berkembanglah berbagai macam ilmu di pusat-pusat ilmiah di negara-negara Eropa Barat tadi, yang mengkhususkan perhatiannya kepada kebudayaan-kebudayaan, bahasa-bahasa, dan agama-agama di negara-negara Timur itu (Kebudayaan India Klasik, Kebudayaan Cina Klasik, Agama Hindu, Agama Buddha, Agama Islam dan sebagainya), dan di dalam ilmu-ilmu itu, yang diberi nama *Orientalistique* (ilmu tentang dunia Timur) atau *Indologie* (Ilmu tentang Indonesia), konsep Kebudayaan Timur beserta berbagai teori tentang ciri-ciri khas dari Kebudayaan Timur itu, dikembangkan dan dimantapkan.

Sesudah Perang Dunia ke-II, kejayaan negara-negara Eropa Barat itu turun, kekuasaan-kekuasaan jajahan di mana-mana runtuh atau dihapuskan, dan dengan itu

kontras antara kebudayaan negara-negara Eropa Barat yang jaya dan kebudayaan bangsa-bangsa di Asia yang dijajah mulai hilang. Dengan demikian kedua konsep tadi, yaitu "Kebudayaan Timur" dan "Kebudayaan Barat" yang berkontras tajam menghilang dari tulisan-tulisan ilmiah. Sekarang telah timbul konsep-konsep lain yang bersifat kontras, yaitu: Dunia Barat dan Dunia Timur, dalam arti politik (artinya, negara-negara yang berideologi kapitalisme liberal dan negara-negara yang berideologi sosialisme komunisme), Negara-Negara Makmur dan Negara-Negara Sedang Berkembang dalam arti ekonomis, Negara-Negara Utara dan Negara-Negara Selatan dalam arti yang sama; Negara-Negara Dunia Pertama, Dunia Kedua dan Dunia Ketiga dalam arti politis dan ekonomis, dan sebagainya.

Walaupun istilah Kebudayaan Timur dan Kebudayaan Barat sekarang jarang tampak lagi dalam tulisan-tulisan ilmiah, namun dalam diskusi-diskusi populer kedua istilah itu masih tetap hidup dalam arti yang makin kabur, dan demikian pula halnya di kalangan para cendekiawan di Indonesia. Orang-orang yang sering mendiskusikan kontras antara kedua konsep tersebut secara populer, biasanya menyangka bahwa Kebudayaan Timur itu mementingkan kehidupan kerohanian, mistik, pikiran prelogis, keramah-tamahan dan gotong-royong, sedangkan Kebudayaan Barat menurut mereka mementingkan kebendaan, pikiran logis, hubungan asasguna (hubungan hanya berdasarkan prinsip guna), dan individualisme.

Tak perlu kiranya kita tinjau masalah itu secara terlampau mendalam untuk dapat menyadari kenyataan bahwa sifat-sifat tersebut, kecuali hal gotong-royong lawan individualisme, tidak mutlak benar. Dalam kenyataan, berbagai kebudayaan suku-bangsa di Indonesia (yang dapat digolongkan ke dalam "Kebudayaan Timur") memang mementingkan upacara-upacara adat yang bersifat religi, penuh dengan unsur-unsur prelogis; mementingkan diskusi-

diskusi tentang kebatinan; dan mementingkan mistik. Orang Indonesia memang tidak suka berusaha dengan sengaja gigih dan tekun, untuk dapat mencapai tujuan ekonomis, tetapi hal itu tidak berarti bahwa mereka tidak mementingkan materi. Sebaliknya, sukar juga untuk menyatakan bahwa Kebudayaan Barat tidak mementingkan kehidupan rohaniah. Ilmu pengetahuan (suatu usaha rohaniah yang paling berhasil dalam sejarah umat manusia) berkembang terutama dalam rangka Kebudayaan Barat; tokoh-tokoh filsafat ternama, bahkan ahli-ahli mistik terkenal, dalam Kebudayaan Barat tak kurang jumlahnya apabila dibandingkan dengan tokoh-tokoh filsafat yang timbul dalam Kebudayaan Timur. Dalam Kebudayaan Barat banyak sekali tokoh pengarang kesusasteraan yang telah mengajukan gagasan-gagasan yang mengandung arti rohaniah yang tinggi.

Kontras tersebut juga mengenai sifat keramah-tamahan dalam Kebudayaan Timur dan sifat asasguna dalam kebudayan Barat, sebenarnya hanyalah suatu kontras yang relatif. Adat sopan-santun dalam kebudayaan-kebudayaan di Indonesia pada umumnya memang menyaratkan sifat ramah, tetapi hanya keramahan lahiriah. Terutama dalam adat sopan-santun Jawa, orang harus bersikap ramah terhadap seseorang, walaupun dalam batinnya ia mungkin membenci orang tersebut. Demikian juga dalam adat sopan-santun Jepang, hanya keramahan lahiriah yang dipentingkan. Adat sopan-santun dalam berbagai kebudayaan Cina dan India malahan tidak mengutamakan sikap ramah, tetapi lebih menekan pada prinsip untuk tidak merugikan, tidak membuat malu, dan tidak merendahkan orang lain. Dalam hal itu kebudayaan-kebudayaan tersebut lebih mirip kepada adat sopan-santun dalam kebudayaan-kebudayaan Barat. Sebaliknya, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa adat sopan-santun pergaulan dalam Kebudayaan Barat samasekali tidak mengenal unsur keramahan. Malahan kalau orang Amerika bersikap

ramah, ia sungguh-sungguh ramah secara spontan, dan tidak hanya ramah secara lahiriah saja.

Adapun kontras mengenai gotong-royong dan individualisme sebagai dua sifat untuk membedakan Kebudayaan Timur dengan Kebudayaan Barat, seperti apa yang telah diuraikan dalam tulisan-tulisan lain dalam bunga rampai ini, memang ada benarnya. Dalam Kebudayaan Timur pada umumnya dan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia pada khususnya, sifat individualisme memang kecil sekali. Individualisme amat menonjol dalam kebudayaan-kebudayaan Barat, walaupun salah juga untuk mengatakan bahwa di situ tak ada gotong-royong. Juga dalam kebudayaan-kebudayaan Barat ada gotong-royong, terutama dalam lingkungan masyarakat di luar kota besar.

Adapun kontras gotong-royong lawan individualisme itu merupakan kontras berdasarkan ciri-ciri dalam orientasi nilai budaya, yang dapat dikaitkan kepada konsep kepribadian yang dikembangkan oleh F.H.L. Hsu (lihat karangannya "Psychological Homeostatis and Jen", *American Anthropologist*, 73, 1971: hlm. 23-44). Seperti apa yang telah diuraikan dalam tulisan no. 22 di atas, ahli antropologi-psikologi-filsafat-kesusasteraan Cina Klasik tersebut, telah mengajukan gagasan bahwa mahluk manusia mempunyai suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan rohaniahnya, yaitu orang-orang atau hal-hal yang bisa menjadi subyek dari perasaan hubungan intim serta karib, dan bisa menjadi tujuan dari perasaannya untuk berbakti. Baru kalau ada "masyarakat hubungan karib" dalam kehidupan rohaniah manusia, maka jiwanya hidup dalam suatu keimbangan selaras, yang oleh Hsu disebut keimbangan homeostatis psikologi *(psychological homeostatis).*

Untuk hampir semua manusia di dunia, hidup dimulai dengan orang tua dan saudara sekandungnya. "Masyarakat hubungan karib" inilah (lihat lingkaran 3 dalam bagan 3) yang merupakan bentuk masyarakat yang paling awal dalam kehidupan semua manusia.

Dalam masyarakat berbagai suku bangsa tertentu di Indonesia, dan demikian juga dalam banyak masyarakat lain di dunia yang berdasarkan prinsip keturunan matrilineal, *) saudara laki-laki ibu (*mamak* dalam bahasa Minangkabau) juga akan masuk ke dalam lingkungan "masyarakat karib" itu. Dalam masyarakat semua suku-bangsa di Indonesia, dan dalam semua masyarakat bangsa-bangsa Asia (atau bangsa-bangsa yang disebut bangsa-bangsa Timur itu), orang tua dan saudara-saudara sepupu itu akan tetap menjadi warga "Masyarakat karib" itu selama individu yang bersangkutan itu hidup. Orang-orang tersebut tadi akan menjadi obyek dari rasa kemesraannya, dan dalam masa kesulitan dan tekanan batin, maka orang-orang tadi itulah yang menjadi tempatnya berlindung serta sumber pertolongan pertama.

Di dalam masyarakat bangsa-bangsa Barat, "masyarakat karib" dari tiap individu pada mula-mulanya juga akan terdiri dari orang tua serta saudara-saudara sekandungnya. Walaupun demikian, pada saat si individu sudah merasakan dirinya dewasa, ia akan memisahkan diri dari "masyarakat intimnya", dan akan mencari orientasi dan jalan hidupnya sendiri. Arah hidup seperti itu disebabkan karena dalam kebudayaan orang Eropa Barat sejak berabad-abad lamanya telah dikembangkan suatu konsepsi yang mereka nilai amat tinggi, dan yang merupakan tema pokok dari nilai individualisme di dunia Barat, yaitu konsepsi bahwa: "Manusia yang sejati adalah manusia yang bisa mencapai suatu hal samasekali atas kemampuannya sendiri". Bagi manusia Barat yang sejati, itulah tugas hidupnya yang harus dilakukannya pada saat ia merasa dirinya dewasa.

Sebaliknya, hanya manusia yang mempunyai kapasitas mental dan psikis yang amat tinggi yang dapat melaksanakan suatu tugas hidup seperti itu

---

*) Menghitung hubungan keturunan melalui garis ibu dan kerabat wanita.

dengan berhasil. Manusia Barat yang umum, yang mempunyai kapasitas mental yang biasa, juga membutuhkan lingkungan "masyarakatnya yang karib". Namun karena sistem nilai-budayanya memang menganggap tidak pantas apabila alam jiwanya selama hidupnya berdiam tetap dalam lingkungan terbatas itu saja, maka ia terpaksa keluar dari dalamnya dan mengembarakan jiwanya untuk mencari individu-individu dalam lingkaran-lingkaran jiwanya yang lain (lingkaran no. 2 dan 1, bahkan kadang-kadang lingkaran no. 0 dalam bagan 3), yang dapat menggantikan orang tua dan saudara-saudara dekatnya yang lain: artinya ia harus mengembangkan suatu "masyarakat karib" yang baru. Mengembangkan dan memelihara hubungan karib dengan orang yang bukan orang tua atau saudara sekandung, memerlukan usaha khusus dan ketegangan batin yang terus-menerus, yang mengisi seluruh hidupnya. Kegagalan untuk menemukan atau memelihara suatu "masyarakat lingkungan karib" terus-menerus dengan orang-orang bukan orang tua atau saudara dekat, akan menimbulkan kekosongan yang tak ada taranya, dan dengan itu hidupnya akan kehilangan tujuan dari artinya, kehilangan mutunya, dan hidupnya akan dihinggapi perasaan sepi.

Demikian menurut Hsu, sumber dari sikap kegigihan manusia Barat terhadap hidup itu, tak lain adalah tidak adanya sekelompok manusia yang secara otomatis dapat dianggapnya sebagai "lingkungan karib" itu. Ia selalu harus mencari orang-orang itu, dan kalau tidak menemukannya, seekor anjing atau kucing kesayangannya pun jadi, untuk dianggap sebagai pengisi lingkungan itu. Kalau "lingkungan karib" tak saja dapat ditemukan, maka sebagai kompensasi seorang manusia Barat akan gigih mencari suatu tujuan hidup lain yang berarti. Ia secara gigih mengexplorasi lautan dan benua-benua, ia secara gigih meneliti alam, zat-zat atau hidup dalam laboratorium, ia mengorbankan diri untuk perikemanusiaan (sikap Florence Nightingale). Kegigihan hidup untuk mencari

"lingkungan karib" sudah menjadi sikap hidup bagi manusia Barat, yang dibawanya ke mana-mana, juga pada waktu ia pergi berdagang. Itulah rahasia dari sukses yang telah dicapai manusia Barat dengan segala hal yang dilakukannya. Kalau ia sukses, maka dengan sikap hidup seperti itu ia memang benar-benar akan sukses; sebaliknya kalau ia gagal, maka benar-benar ia akan sengsara (dan banyak juga manusia Barat yang gagal dalam usaha).

Manusia Timur manurut Hsu, dan menurut hemat saya juga, tidak memiliki sikap hidup yang gigih itu, karena salah satu kebutuhan yang pokok, yaitu "lingkungan karib" tadi sudah ada secara otomatis. Tak perlu ia dengan sikap gigih mencarinya. Sikap hidup yang gigih tidak menjadi kebiasaannya, dan ia hidup mengambang dengan selaras, puas dan bahagia dengan apa yang dimilikinya, menikmati keindahan hidup sekitarnya, atau kalau hidup itu tidak indah melainkan penuh dosa dan kesengsaraan, maka sikap orang Indonesia itu adalah untuk tetap mencoba dan melihat unsur-unsur keindahan dalam kesengsaraan itu.

Keterangan psikologis dari Hsu ini, yang mencoba melihat perbedaan antara manusia yang hidup dalam lingkungan Kebudayaan Timur dan manusia yang hidup dalam lingkungan Kebudayaan Barat itu, memang mencoba menyelami sumber-sumber inti dari perbedaan itu. Semua perbedaan lahiriah antara kedua tipe manusia itu, hanyalah akibat dari perbedaan inti itu. Saya sendiri memang setuju dengan konsepsi Hsu itu.

24

APAKAH MODERNISASI MEMERLUKAN WESTERNISASI ?

APABILA suatu bangsa dengan sadar memulai proses modernisasinya, maka sebenarnya ia hanya mau berusaha menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia pada zaman bangsa itu hidup. Dalam arti itu, maka segala zaman, dan tidak hanya abad ke-20 ini, pernah mengalami suatu usaha dan proses modernisasi.

Waktu dalam zaman antara abad ke-2 S.M. dan 2 M. Negara Rumawi menentukan konstelasi dunia, maka banyak kerajaan di sekitar Laut Tengah di Eropa Tengah dan Utara, dengan sadar berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan dunia yang ditentukan oleh kehidupan ekonomi, politik dan kebudayaan Negara Rumawi waktu itu. Sudah barang tentu dalam hal menyesuaikan diri itu, tiap kerajaan menjaga sifat kekhususannya masing-masing dalam melaksanakan "modernisasi" itu. Ketika antara abad ke-4 dan ke-10 kerajaan-kerajaan besar di India dan Cina menentukan konstelasi dunia, banyak kerajaan di Asia Tenggara (termasuk di Nusantara Indonesia) dan di Asia Timur dengan sadar berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan ekonomi politik dan kebudayaan kerajaan-kerajaan besar di India atau Cina tersebut. Sudah barang tentu dalam hal menyesuaikan diri, tiap kerajaan tersebut menjaga sifat kekhususannya masing-masing dalam hal melaksanakan "modernisasi" itu. Itulah sebabnya kebudayaan Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit berbeda dengan kebudayaan-

kebudayaan di India; atau kebudayaan Vietnam, Jepang atau Korea berbeda dengan kebudayaan Cina.

Dalam abad ke-20 ini konstelasi dunia ditentukan oleh negara-negara besar yang telah mencapai kemajuan ekonomis, atau *the developed world*, kata orang. Sebelum Perang Dunia ke-II negara-negara itu adalah terutama negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sesudah Perang Dunia ke-II, kita melihat lebih banyak variasi, yaitu negara-negara yang tergolong Pasaran Bersama Eropa, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Jepang. Semua negara lain yang belum mencapai kemajuan, yang hampir semua terlokasi di Afrika, Asia dan Amerika Latin dan yang disebut *the developing*, atau *the third world*, terpaksa harus menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan yang berada dalam *the developed world* itu. Kalau tidak, bangsa-bangsa di negara-negara terbelakang itu akan kandas terdesak oleh kekuasaan-kekusaan raksasa yang sedang menguasai dunia sekarang ini. Ini suatu kenyataan yang pahit, tetapi apa boleh buat.

Mungkin ada di antara para pembaca yang berpikir: apakah Dunia Ketiga itu tak dapat menggabungkan diri menjadi kekuatan yang baru, yang dapat melawan kekuatan-kekuatan yang sekarang bercokol di bumi ini? Memang suatu gagasan yang amat idealistis, tetapi dalam kenyataan sulit dilaksanakan. *Dunia Ketiga* terlampau beraneka warna dan terlampau lemah untuk bisa bersatu (ingat bahwa usaha untuk bersatu memerlukan suatu kapasitas dan taraf kekuatan juga), sedangkan empat kekuatan yang menguasai dunia masa kini, dalam kenyataan jauh lebih bersatu daripada apa yang tampak lahir. Lagipula kalau *Dunia Ketiga* mau berusaha untuk bersatu, tak dapat tidak, usaha itu akan segera diambil alih oleh salah satu dari keempat kekuatan dunia tersebut di atas. Waktu Presiden Soekarno mengambil inisiatif untuk mempersatukan sebagian dari Dunia Ketiga guna "menggempur" dua dari kekuatan tersebut di atas, maka usaha itu segera diambil alih oleh dunia komunis. Seandainya Soekarno

berhasil maka usaha modernisasi kita akan merupakan usaha menyesuaikan diri dengan dunia komunis.

Dengan demikian, bagaimanapun juga, tak bisa tidak kita harus melaksanakan modernisasi; tetapi kalau kita ambil konsep modernisasi itu dalam arti seperti apa yang saya terangkan di atas, maka sudah terjawab jelas bahwa modernisasi itu bukanlah westernisasi. Hal itu disebabkan karena kekuatan-kekuatan yang menentukan konstelasi dunia sekarang ini bukan hanya dunia Barat, tetapi suatu kombinasi dari paling sedikit empat kekuatan. Maka kalau kita tak mau hanya menjadi satelit dari salah satu dari keempat kekuatan itu, kita harus berusaha menjaga sifat kekhususan kita; sama seperti nenek-moyang kita di zaman Sriwijaya, yang dalam usaha "modernisasi" mereka, menjaga kekhususan mereka dan tidak menjadi orang India, dan sama seperti orang Vietnam zaman dahulu, yang dalam usaha "modernisasi" mereka, menjaga kekhususan mereka dan tidak menjadi orang Cina.

Sekarang tentu timbul di antara para pembaca pertanyaan yang pokok, ialah: Bukankah benar bahwa keempat kekuatan yang kini menguasai dunia itu, walaupun dengan sifat khasnya masing-masing, pada hakekatnya toh juga memakai unsur-unsur kebudayaan penting seperti teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mula-mula sebenarnya berasal dari dunia Barat. Karena itu bukankah modernisasi yang antara lain menyaratkan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan itu pada hakekatnya juga usaha untuk menipu beberapa unsur kebudayaan Barat? Hal itu memang benar, namun supaya jelas mungkin ada baiknya untuk membedakan dengan tajam antara tiga istilah, yaitu: (i) modernisasi; (ii) penggunaan unsur-unsur kebudayaan Barat, dan (iii) westernisasi.

Modernisasi adalah istilah untuk menyebut konsep yang saya terangkan di atas, atau secara singkat "usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia

sekarang." Untuk orang Indonesia hal itu berarti merobah berbagai sifat dalam mentalitasnya yang tak cocok dengan kehidupan zaman sekarang, dan membiasakan diri dengan beberapa sifat mental seperti apa yang tersebut dalam karangan no. 7 dalam bunga-rampai ini. Sifat-sifat mental itu, walaupun dimiliki oleh hampir semua bangsa Barat, tetapi toh bukan khas sifat Barat. Banyak bangsa Afrika, Asia atau Amerika Latin, dan demikian juga kita bangsa Indonesia, bisa berusaha mengembangkan sifat-sifat mental itu, tanpa hidup seperti orang Barat (orang Eropa atau Amerika), tanpa membiasakan diri suatu gaya hidup kebarat-baratan. Kita bangsa Indonesia harus mengembangkan sifat-sifat mental itu, untuk bisa menjadi lebih makmur daripada sekarang, untuk lebih menyempurnakan demokrasi kita, untuk bisa menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang bisa kita banggakan.

Soal penggunaan unsur-unsur kebudayaan Barat adalah suatu soal lain lagi. Unsur-unsur yang mula-mula berasal dari kebudayaan Barat itu dapat kita tiru, kita ambil alih, kita adaptasi, kita beli, tanpa harus menjadi seperti orang Barat, dan tanpa perlu hidup dengan suatu gaya hidup orang Barat. Sebenarnya sudah sejak lebih dari seabad lamanya kita meniru, mengambil alih atau mengadaptasi unsur-unsur kebudayaan Barat, tanpa menjadi orang Barat. Pakaian yang kita kenakan sehari-hari, sepatu yang kita pakai tiap hari, semuanya sebenarnya adalah unsur-unsur yang berasal dari kebudayaan Barat; sistem sekolah yang sekarang sudah dianggap biasa oleh rakyat Indonesia, sampai ke pelosok-pelosok desa, sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang berkembang dalam rangka kebudayaan Barat; agama Nasrani oleh berbagai suku-bangsa di Indonesia sekarang sudah tidak disadari lagi sebagai suatu unsur yang datang dalam rangka pengaruh kebudayaan Barat; demikian sistem administrasi negara kita sebenarnya juga berkembang di dunia Barat dan sebagainya. Dengan

demikian, kalau kita nanti secara lebih luas dan intensif mengambil alih teknologi yang kebetulan berkembang di dunia Barat, kita memang harus membiasakan dengan beberapa sifat mental tertentu, tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita harus menjadi orang Barat, atau membiasakan diri dengan suatu gaya hidup Barat.

Sebenarnya dengan uraian di atas sudah jelas apa yang saya sebut westernisasi. Walaupun kata *west* dalam "westernisasi" berarti barat, saya toh tak akan menyebut usaha pengambilan alih unsur-unsur kebudayaan Barat seperti tersebut di atas itu "westernisasi". Karena kalau demikian kita sudah di-westernisasi sejak lebih dari satu abad yang lalu. Maka dari itu, kalau "westernisasi" itu bukan "modernisasi" dan juga harus kita bedakan dari usaha mengadaptasi unsur-unsur kebudayaan Barat, maka apakah "westernisasi" itu? Saya berpendirian bahwa istilah westernisasi itu harus kita sisihkan untuk suatu usaha lain yang berbeda dari kedua usaha tersebut di atas, ialah usaha meniru gaya hidup orang Barat (orang Eropa Barat atau Amerika). Meniru gaya hidup berarti meniru secara berlebihan gaya pakaian orang Barat dengan cara mengikuti mode yang berobah-robah cepat; meniru gaya bicara dan adat sopan-santun pergaulan orang Barat dan seringkali ditambah dengan sikap merendahkan bahasa nasional dan adat sopan-santun pergaulan Indonesia; meniru pola-pola bergaul, pola-pola berpesta (merayakan ulang tahun), pola rekreasi dan kebiasaan minum minuman keras seperti orang Barat dan sebagainya. Orang Indonesia yang berusaha mengadaptasi suatu gaya hidup kebarat-baratan seperti itulah, yang sebaiknya kita sebut orang yang condong ke arah westernisasi. Orang Indonesia seperti itu belum tentu modern, dalam arti bahwa mentalitasnya modern. Ia bicara dengan gaya bahasa penuh ungkapan-ungkapan Belanda atau Inggris, memanggil istrinya *ling* (dari *darling*), disapa *pappie* atau *daddy* oleh anak-anaknya, minum bir Bintang pagi-siang-sore, pergi berdansa tiap hari Sabtu malam, suka menonton

Midnight Show, merayakan ulang tahun semua anggota keluarganya satu demi satu dengan pesta-pesta mewah dan meriah dan sebagainya. Sebaliknya, orang itu mentalitasnya feodal, ia tak berdisiplin dalam irama hidupnya, tak berani bertanggung jawab dalam masa-masa kesulitan dalam pekerjaannya, tak bermutu dalam karya-karyanya, tidak gigih dalam usahanya, dan ia bangga bahwa jumlah anaknya tigabelas orang. Orang Indonesia seperti ini sebenarnya samasekali tidak mempunyai mentalitas yang diperlukan untuk modernisasi, maka ia sebenarnya adalah orang yang amat kolot. Lagipula orang Indonesia seperti itu biasanya tidak hemat dalam hidupnya, padahal sifat hemat itu adalah suatu sifat yang sangat perlu bagi bangsa Indonesia untuk pembangunan; artinya bagi bangsa Indonesia sekarang, hidup hemat merupakan suatu sifat yang modern.

Dengan membedakan secara tajam antara konsep "modernisasi", konsep "mengadaptasi unsur-unsur kebudayaan Barat" dan konsep "westernisasi" seperti apa yang terurai di atas, maka terjawablah sekarang pertanyaan yang diajukan pada permulaan karangan ini. Dengan demikian jelaslah bahwa modernisasi *tidak* memerlukan westernisasi.

25

APAKAH BEDA ANTARA AGAMA, RELIGI DAN KEPERCAYAAN ?

OLEH sejumlah cendekiawan yang kini amat tertarik perhatiannya terhadap suatu studi mengenai masalah agama, religi dan pembangunan, kepada saya pernah diajukan pertanyaan: "Apakah agama merupakan bagian dari kebudayaan?" Menurut hemat saya, religi memang merupakan bagian dari kebudayaan. (Perhatikan bahwa saya sengaja menghindari istilah "agama", dan memakaki istilah yang lebih netral, "religi". Ada pendirian yang mengatakan bahwa suatu sistem religi merupakan suatu agama, hanya bagi penganutnya. Sistem religi Islam merupakan agama hanya bagi anggota umat Islam. Sistem religi Hindu Darma merupakan suatu agama bagi orang Bali. Ada juga pendirian orang lain, yaitu bahwa agama adalah semua sistem religi yang secara resmi diakui oleh negara kita. Saya sendiri condong untuk mempergunakan istilah "agama" menurut pendirian kedua).

Pendirian saya, bahwa religi adalah bagian dari kebudayaan, disebabkan karena saya telah menganut suatu konsep yang untuk sebagian berdasarkan konsep E.Durkheim mengenai dasar-dasar religi yang pernah dibentangkan olehnya dalam bukunya yang terkenal, *Les Formes Élémentaires de la Vie Réligieuse* (1912). Konsep yang saya anut adalah bahwa tiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu:

1. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap *religieus;*
2. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib *(supernatural);* serta segala nilai, norma dan ajaran dari religi yang bersangkutan;
3. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa, atau mahluk-mahluk halus yang mendiami alam gaib;
4. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut dalam sub 2, dan yang melaksanakan sistem ritus dan upacara tersebut dalam sub 3.

Keempat komponen tersebut sudah tentu terjalin erat satu dengan yang lain menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Emosi keagamaan merupakan suatu getaran yang menggerakkan jiwa manusia. Proses-proses fisiologis dan psikologis apakah yang terjadi apabila manusia dihinggapi oleh getaran jiwa tadi, sepanjang pengetahuan saya belum pernah ada ahli yang mencoba membuat suatu analisa dan deskripsi, tetapi inilah rupa-rupanya proses yang terjadi apabila jiwa manusia dimasuki cahaya Tuhan.

Karena getaran jiwa yang disebut emosi keagamaan tadi bisa juga dirasakan seseorang individu dalam keadaan sendiri, maka suatu aktivitas religius dapat dilakukan seorang diri dalam keadaan sunyi senyap. Seorang bisa mendoa, bersujud, atau melakukan salat sendiri dengan penuh khidmat, dan dalam keadaan terhinggap oleh emosi keagamaan ia akan membayangkan Tuhan, dewa, ruh atau lainnya. Wujud dari bayangan tadi akan ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang lazim hidup dalam masyarakat dan kebudayaannya, dan selanjutnya kelakuan-kelakuan keagamaan yang dijalankannya akan juga menurut adat

yang lazim. Walaupun orang bisa melakukan aktivitas religius seorang diri, ia toh tidak dapat melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, samasekali dicetuskan oleh pikirannya sendiri. Misalnya: seorang mengunjungi makam ibunya. Ia terhinggap oleh emosi keagamaan dan membayangkan ibunya lagi, serta percaya bahwa ibunya itu hidup di sorga, menjaga keselamatannya, dan bisa melihat dia dari atas. Bayangan bahwa ibunya ada di sorga dan bahwa sorga itu ada di atas, serta bahwa ibunya sebagai ruh dapat melihat segala hal yang terjadi di dunia, terutama dia sendiri, adalah suatu kepercayaan yang bukan asli berasal dari pikirannya sendiri, melainkan diambilnya dari kepercayaan yang lazim hidup dalam kebudayaannya. Kemudian, kalau ia mulai membakar kemenyan dan menaburkan bunga di atas makam, maka kelakuan-kelakuan religius itu pun telah menurut adat yang lazim dalam kebudayaannya.

Sistem keyakinan dalam suatu religi dijiwai oleh emosi keagamaan, tetapi sebaliknya emosi keagamaan juga bisa dikobarkan oleh sistem kepercayaan. Seorang yang beragama Katolik yang masuk gereja Katolik dan melihat kemegahan altar dengan salib dan patung Yesus, bisa merasakan emosi tadi dalam dirinya, padahal orang lain yang bukan Katolik bisa masuk gereja itu berperasaan dingin tanpa emosi. Dalam hal ini salib dan patung Yesus adalah dua simbol yang mengobarkan jiwa seorang Katolik, karena dalam sistem keyakinannya salib dan Yesus merupakan unsur-unsur yang utama. Demikianlah suatu keyakinan bisa menyebabkan timbulnya emosi keagamaan dalam jiwa seseorang.

Adapun suatu sistem keyakinan seperti tersebut di atas mengandung keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib, tentang hakekat hidup dan maut, dan tentang wujud dari dewa-dewa dan mahluk-mahluk halus lainnya yang mendiami alam gaib. Keyakinan-keyakinan tersebut

biasanya diajarkan kepada manusia dari buku-buku suci dari agama yang bersangkutan, atau dari mitologi dan dongeng-dongeng suci yang hidup dalam masyarakat. Sistem keyakinan erat berhubungan dengan ritus dan upacara, dan menentukan tata-urut dari unsur-unsur, rangkaian acara serta peralatan yang dipakai dalam upacara.

Adapun sistem ritus dan upacara itu melaksanakan dan melambangkan konsep-konsep yang terkandung dalam sistem keyakinan. Sistem upacara merupakan wujud kelakuan *(behavioral manifestation)* dari religi. Seluruh sistem upacara itu terdiri dari aneka macam upacara yang bersifat harian, musiman, atau kadangkala. Upacara itu masing-masing terdiri dari kombinasi dari berbagai macam unsur upacara, seperti misalnya: berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari dan menyanyi, berprosesi, bersenidrama suci, berpuasa, intoxikasi, bertapa, bersamadi. Acara-acara dan tata-urut daripada unsur-unsur tersebut sudah tentu buatan manusia dahulu kala, dan merupakan ciptaan akal manusia. Apalagi peralatan dari upacara seperti gedung pemujaan (mesjid, gereja, pagoda, stupa dan sebagainya), patung-patung orang suci, patung-patung dewa, alat bunyi-bunyian untuk membuat musik suci (orgel, genderang, gong, seruling suci) dan sebagainya, semuanya adalah hasil akal manusia, dan karena itu merupakan bagian dari kebudayaan. Walaupun demikian, upacara agama belum lengkap kalau tidak dihinggapi dan dijiwai emosi keagamaan. Di sinilah masuk komponen pertama, ialah cahaya Tuhan yang membuat suatu upacara itu menjadi suatu aktivitas yang keramat.

Suatu komponen lagi adalah kelompok-kelompok religius kesatuan-kesatuan sosial atau umat yang menganut sistem kepercayaan dan melakukan sistem upacara-upacara yang merupakan komponen yang kedua dan ketiga terurai di atas. Kelompok-kelompok religius ini bisa berupa: (i) keluarga inti atau kelompok-

kelompok kekerabatan kecil yang lain; (ii) kelompok-kelompok kekerabatan yang lebih besar seperti keluarga-luas, keluarga unilineal seperti klen, suku, marga, dadia, dan lain-lain; (iii) kesatuan komunitas seperti desa, gabungan desa dan lain-lain; (iv) organisasi-organisasi religius seperti organisasi penyiaran agama, organisasi sangha, organisasi gereja, partai politik yang berdasarkan ideologi religius, gerakan religius, orde-orde rahasia dan sebagainya. Kelompok dan kesatuan sosial seperti itu biasanya berorientasi terhadap sistem kepercayaan dari religi yang bersangkutan dan secara berulang untuk sebagian atau dalam keseluruhannya, berkumpul untuk melakukan sistem upacaranya.
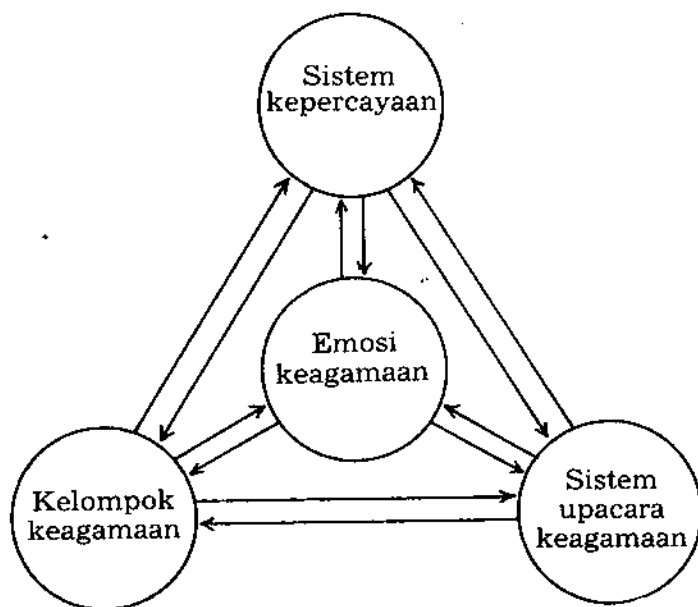
Bagan 4 : Keempat Komponen dari Religi

Kembali kepada pertanyaan yang merupakan pangkal tulisan ini, maka jawab yang lebih lengkap disimpulkan sebagai berikut: Komponen sistem kepercayaan, komponen sistem upacara dan kelompok-kelompok religius yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religius, jelas merupakan ciptaan dan hasil akal manusia. Adapun komponen pertama, yaitu emosi keagamaan, digetarkan oleh cahaya Tuhan. Religi sebagai suatu sistem merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi cahaya Tuhan yang menjiwainya dan membuatnya keramat tentunya bukan bagian dari kebudayaan.

SOAL ISTILAH AGAMA, RELIGI DAN KEPERCAYAAN

Banyak pembaca mungkin belum puas dengan jawab saya, terutama mengenai soal istilah agama dan kepercayaan. Memang kini ada kecondongan untuk membedakan antara dua istilah tersebut. Istilah agama dipakai untuk menyebut agama-agama yang resmi diakui oleh negara kita, dan kepercayaan untuk semua sistem yang berada di luar kategori itu. Saya sendiri seandainya diperkenankan memberi saran, akan membedakan akan adanya tiga konsep beserta istilahnya, ialah: *agama* yang bisa kita pakai untuk menyebut semua agama yang diakui secara resmi dalam negara kita yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu-Dharma, Buddha- Dharma, religi yang bisa kita pakai kalau kita bicara tentang sistem-sistem yang tidak atau belum diakui secara resmi, seperti Konghucu, Seventh Day Advent, Gereja Pinkster, Hindu, dan segala macam gerakan kebatinan, dan sebagainya; kepercayaan yang mempunyai arti yang khas, yaitu komponen kedua dalam tiap agama maupun religi.

RIWAYAT SINGKAT MENGENAI DIRI PENGARANG

Pengarang adalah Gurubesar dalam ilmu antropologi pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Lulus Sarjana Muda pada Universitas Gadjah Mada (1950), mendapat gelar M.A. dalam Antropologi dari Yale University di Amerika Serikat (1956), dan gelar Doctor Antropologi dari Universitas Indonesia (1958). Pada tahun 1976 mendapat gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Utrecht di Negeri Belanda, pada perayaan Dies Natalis ke-340 universitas tersebut.

Pengarang pernah menjadi *research associate* pada University of Pittsburgh di Amerika Serikat, dan diundang sebagai gurubesar tamu ke berbagai universitas di Amerika Serikat, di Negeri Belanda dan di Australi.

Karyanya sampai sekarang meliputi lebih dari 80 buah buku dan karangan yang diterbitkan di dalam maupun di luar negeri, dan di antaranya yang terpenting adalah *Villages in Indonesia* (Cornell University Press, 1967), *Metodologi Penelitian Masyarakat* (LIPI, 1973), *Anthropology in Indonesia* (Leiden, KITLV, 1974), dan *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Gramedia, 1978).

Sesudah beberapa tahun pembangunan nasional berjalan dalam semangat "rehabilitasi dan stabilitasi" perekonomian nasional maka sekitar awal tahun tujuh puluhan timbul pemikiran di antara golongan cendekiawan, para ahli kebudayaan dan ilmu-ilmu sosial bahwa dalil-dalil ilmu ekonomi tidak mampu memecahkan masalah pembangunan secara menyeluruh karena hambatan dari faktor-faktor non-ekonomis.

Seminar Perkembangan Sosial-Budaya dalam Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh LIPI pada tahun 1970 menyimpulkan bahwa sikap mental orang Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan. Sejak saat itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat ramai pendekatan sosio-kultural terhadap pembangunan.

Koentjaraningrat, guru besar dalam antropologi budaya pada beberapa universitas terkemuka di Indonesia serta mempunyai reputasi internasional di bidang kebudayaan merupakan salah seorang tokoh budayawan terkemuka Indonesia yang pada waktu itu mulai memperkenalkan pendekatan kultural terhadap pembangunan. Serangkaian karangan ilmiah populer yang pernah ditulisnya pada harian *Kompas* dengan judul: *Kini Sering Orang Bertanya,* pada awal tahun 1974 merupakan bagian terbesar dari isi buku ini. Di samping itu masih ada karangan lain yang merupakan reportase perjalanannya ke Jepang.

Golongan cendekiawan, sarjana dan calon sarjana budaya dan ilmu-ilmu sosial, ekonomi, politik serta para wartawan dan semua pihak yang berminat terhadap masalah-masalah kebudayaan akan mendapat gambaran tentang masalah itu dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa.

Penerbit PT Gramedia
Palmerah Selatan, 22 Lt IV
Jakarta Pusat